



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

# **LAPORAN KINERJA**

**(TAHUN 2025)**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Kuini No. 79 A Telp. (0751) 34475-31554

PADANG



# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

## INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 Berok Nipah, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25118  
Telp. (0751) 31961-39263, Fax. (0751) 31841  
Laman [inspektorat.sumbarprov.go.id](http://inspektorat.sumbarprov.go.id), email: [inspektorat@sumbarprov.go.id](mailto:inspektorat@sumbarprov.go.id)

---

### PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Padang, 22 Februari 2026

Inspektur



ANDRI YULIKA, SH, M.Hum, CGCAE  
Pembina Utama Madya  
NIP. 197210261997031003

## KATA PENGANTAR

**P**uji dan syukur kehadirat Allah S.W.T atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja (LKj) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 dapat diselesaikan penyusunannya dengan baik.

LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai penjabaran dari tahun kelima pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021–2026. Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan anggaran yang telah dipercayakan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat.

Penyusunan LKjIP ini juga merupakan implementasi dari amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dengan demikian, laporan kinerja ini menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

Tujuan penyusunan laporan kinerja ini adalah untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tingkat pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat, yang mencerminkan keberhasilan maupun tantangan dalam pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Penyajian LKjIP diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran dalam rangka peningkatan kualitas kinerja organisasi agar semakin efektif, efisien, relevan, dan berkelanjutan.

Akhir kata, melalui penyampaian Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang utuh dan objektif mengenai pelaksanaan kinerja instansi, khususnya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta menjadi dasar yang konstruktif bagi perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan pada tahun-tahun mendatang

Padang, 30 Januari 2026

Kepala Badan Kesbangpol  
Provinsi Sumatera Barat  
  
Mursalin, A.P.M.Si  
Pembina Utama Madya  
Nip. 19740608 199311 1 001



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan Rencana Kinerja Tahunan 2025 yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat mempunyai kedudukan dan peran strategis dalam mewujudkan Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu **"Terwujudnya Sumatera Barat Madani Yang Unggul dan Berkelanjutan"** dengan melaksanakan Misi 2 yaitu **"Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaiik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah."**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Gubernur Sumatera Barat di atas maka ditetapkan tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2021-2026). Tujuan yang akan dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2021-2026) sebagai berikut :

1. Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani dengan Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi.
2. Meningkatnya Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat dengan Indikator Kinerja Indeks Ketahanan Sosial Budaya

Adapun sasaran yang akan dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2021-2026) sebagai berikut :

1. Meningkatnya kemandirian, ketentraman dan ketertiban masyarakat, dengan Indikator Kinerja Konflik di Sumatera Barat,
2. Meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat dengan Indikator Kinerja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumatera Barat.
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD
4. Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi, dengan Indikator Kinerja Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi.



Keempat sasaran tersebut pada tahun 2025 didukung oleh 6 program, 12 kegiatan dan 29 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.22.190.378.717 (Dua Puluh Dua Milyar Seratus Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Belas Rupiah).

Hasil penilaian atas pelaksanaan kinerja selama tahun 2025 menunjukkan bahwa rata-rata capaian sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat adalah 126,11% (dikategorikan sangat tinggi) yang dapat dilihat pada table berikut :

**Tabel 1**  
**Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Pada Perjanjian Kinerja**  
**Tahun 2025**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Konflik di Sumatera Barat	1 kasus	0 kasus	200%
2.	Meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar	76,30	78,83	103,32%
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	81,15	82,05	101,11%
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	93	93	100%
<b>Rata-rata Capaian Sasaran Strategis</b>					<b>126,11%</b>

Pencapaian sasaran strategis pada tahun 2025 sebagaimana digambarkan pada tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Capaian sasaran strategis " Meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan indikator kinerja konflik di Sumatera Barat sebesar 200% (dikategorikan "sangat tinggi")
2. Capaian sasaran strategis " Meningkatkan kualitas demokrasi di Sumatera Barat dengan indikator kinerja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar sebesar 103,32% (dikategorikan "sangat tinggi")



3. Capaian sasaran strategis “Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi” dengan indikator kinerja nilai akuntabilitas kinerja OPD sebesar 101,11% (dikategorikan “sangat tinggi”)
4. Capaian sasaran strategis “Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi dengan indikator kinerja tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi sebesar 93% (dikategorikan “sangat tinggi”)

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja serta analisis capaian sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol telah berjalan dengan baik dan menunjukkan tren kinerja yang positif. Sebagian besar indikator kinerja utama mampu mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun berjalan. Capaian tersebut tidak terlepas dari komitmen pimpinan dan seluruh aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta mengoptimalkan peran forum-forum strategis dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Dalam rangka meningkatkan kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat ke depan, maka ada beberapa langkah yang akan dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat secara umum, antara lain :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan berbasis kinerja melalui penajaman indikator yang terukur, relevan, dan selaras dengan dokumen perencanaan daerah (RPJMD dan Renstra), serta memperkuat sistem monitoring dan evaluasi secara berkala.
2. Mendorong peningkatan peran dan fungsi forum-forum strategis seperti FKUB, FPK, dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dalam deteksi dini dan pencegahan konflik sosial secara lebih efektif dan berkelanjutan.
3. Memperkuat koordinasi dengan perangkat daerah terkait, aparat keamanan, serta pemangku kepentingan lainnya guna mendukung stabilitas politik, keamanan, dan ketentraman masyarakat.
4. Mengembangkan kompetensi aparatur melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan, khususnya dalam bidang analisis konflik, kewaspadaan nasional, dan pengelolaan isu-isu strategis kebangsaan.



5. Terus melakukan perbaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara berkelanjutan dengan mengacu pada hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>i</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GRAFIK</b>	<b>ix</b>
<b>BAB. I   PENDAHULUAN</b>	
1.1. Gambaran Organisasi	1
1.2. Aspek Strategis Organisasi	11
1.3. Permasalahan Utama	12
<b>BAB. II   PERENCANAAN KINERJA</b>	
2.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	15
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	15
<b>BAB. III  AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja	18
3.2 Hasil Pengukuran Kinerja	19
3.3 Capaian Kinerja Organisasi	21
3.4 Realisasi Anggaran Tahun 2025	77
<b>BAB. IV  PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan	79
4.2 Saran	80



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025	7
Tabel 1.2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025	8
Tabel 1.3	Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun 2025	9
Tabel 1.4	Komposisi Pegawai Berdasarkan Penempatan di Masing-Masing Bidang Tahun 2025	10
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kesbangpol Prov Sumbar Tahun 2021-2026	15
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Badan Kesbangpol Prov Sumbar Tahun 2025	16
Tabel 3.1	Hasil Pengukuran Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025	18
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Tujuan I	23
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra	25
Tabel 3.4	Capaian Indikator Kinerja Sasaran I	31
Tabel 3.5	Rekapitulasi Potensi Konflik di Sumatera Barat Tahun 2025	32
Tabel 3.6	Perbandingan Capaian Konflik di Sumatera Barat Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD/Renstra Tahun 2021-2026	35
Tabel 3.7	Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran I	39
Tabel 3.8	Capaian Indikator Kinerja Sasaran II	44
Tabel 3.9	Perhitungan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumatera Barat Tahun 2025	45
Tabel 3.10	Perbandingan capaian Indeks Demokrasi Indonesia di Sumatera Barat Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD/Renstra Tahun 2021-2026	49
Tabel 3.11	Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran II	53
Tabel 3.12	Realisasi Indikator Kinerja Tujuan 2	56
Tabel 3.13	Capaian Indikator Kinerja Sasaran III	58
Tabel 3.14	Hasil Evaluasi SAKIP Badan Kesbangpol Prov Sumbar Tahun 2025	59
Tabel 3.15	Perbandingan capaian nilai akuntabilitas kinerja OPD Tahun 2025 dengan target Akhir RPJMD/Renstra Tahun 2021-2026	63
Tabel 3.16	Penilaian SAKIP berdasarkan Permenpan RB No 12 Tahun 2015	64
Tabel 3.17	Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran III	66



Tabel 3.18	Capaian Indikator Kinerja Sasaran IV	69
Tabel 3.19	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Badan Kesbangpol Prov Sumbar Tahun 2025	70
Tabel 3.20	Perbandingan Capaian Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD/Renstra Tahun 2021-2026	72
Tabel 3.21	Prediket Survey Kepuasan Masyarakat	73
Tabel 3.22	Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran IV	75
Tabel 3.23	Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Langsung Program/Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian 4 Sasaran Tahun 2025	78



## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin tahun 2025	8
Grafik 1.2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan tahun 2024	9
Grafik 1.3	Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan tahun 2025	10
Grafik 1.4	Komposisi Pegawai per Bidang Tahun 2025	11
Grafik 3.1	Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2021 s.d 2025	21
Grafik 3.2	Perbandingan Capaian dan Realisasi Indikator Indeks Ketahanan Sosial Budaya	24
Grafik 3.3	Perbandingan Indeks Ketahanan Sosial Budaya Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera	26
Grafik 3.4	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Konflik di Sumatera Barat Tahun 2024-2025	33
Grafik 3.5	Perkembangan Konflik di Sumatera Barat Tahun 2021-2025	34
Grafik 3.6	Capaian Indikator Kinerja Konflik di Sumatera Barat Tahun 2021-2025	34
Grafik 3.7	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumatera Barat Tahun 2024-2025	46
Grafik 3.8	Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia di Sumatera Barat Tahun 2021-2025	47
Grafik 3.9	Capaian Indikator Kinerja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumatera Barat Tahun 2021-2025	48
Grafik 3.10	Perbandingan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumatera Barat dengan Provinsi se-Indonesia	50
Grafik 3.11	Capaian Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol Prov Sumbar per Komponen Tahun 2025	60
Grafik 3.12	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD Tahun 2024-2025	60
Grafik 3.13	Perkembangan Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol Prov Sumbar Tahun 2021-2025	61
Grafik 3.14	Capaian Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol Prov Sumbar Tahun 2021-2025	62
Grafik 3.15	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi Tahun 2024-2025	71
Grafik 3.16	Perkembangan Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi Tahun 2022-2025	71
Grafik 3.17	Capaian Indikator Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi Tahun 2022-2025	72



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Gambaran Organisasi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat atau disingkat dengan nama Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, dimana Badan Kesbangpol merupakan unsur pendukung tugas pemerintah daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pasal 438 dinyatakan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di wilayah Provinsi. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat diatur di dalam Peraturan Gubernur Nomor 58 tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik.

Dalam menyelenggarakan tugas dimaksud, Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di wilayah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta



- pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. Pelaksanaan fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi;
  6. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik provinsi; dan
  7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya

Adapun susunan organisasi dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat mengacu pada Peraturan Gubernur Sumatera Barat 29 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, terdiri dari atas Sub Bagian Keuangan  
 Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif di lingkungan Badan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan;
  - b. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, asset, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Badan;
  - c. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan;



- d. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi;
- e. penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan;
- f. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

### 3. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang Ideologi, wawasan kebangsaan, belanegara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah Provinsi;
- b. penyusunan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi;
- d. pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi;
- f. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan di kabupaten/kota; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

### 4. Bidang Politik Dalam Negeri

Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,



Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan program kerja di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik di Wilayah Provinsi;
  - b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
  - c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
  - d. pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
  - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
  - f. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
5. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan
- Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan Serta Pendaftaran Organisasi massa, Pemberdayaan Organisasi massa, evaluasi dan mediasi sengketa Organisasi massa, pengawasan Organisasi massa dan Ormas asing.



Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
  - b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
  - c. pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
  - d. pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
  - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
6. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
- Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Wilayah Provinsi



Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai fungsi sebagai berikut:

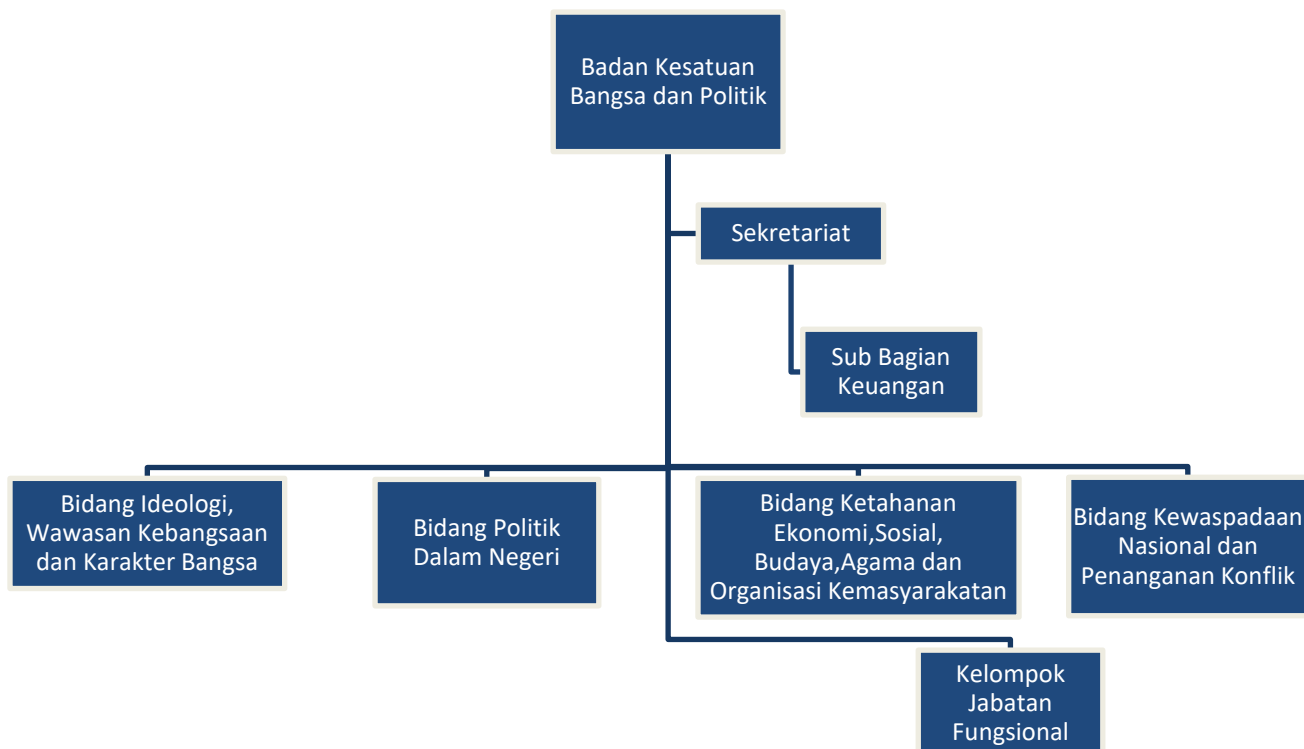
- a. penyusunan program kerja di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Di Wilayah provinsi;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
- d. pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

#### 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Pejabat Administrasi yang ditunjuk sebagai Pejabat Penilai Kinerja serta memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur organisasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat disajikan pada gambar berikut:



**Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

Jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat per Desember 2025 berjumlah 40 orang dengan komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, golongan, dan penempatan pada masing-masing bidang. Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 16 orang perempuan (40%) dan 24 orang laki-laki (60%). Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin disajikan pada tabel 1.1 berikut :

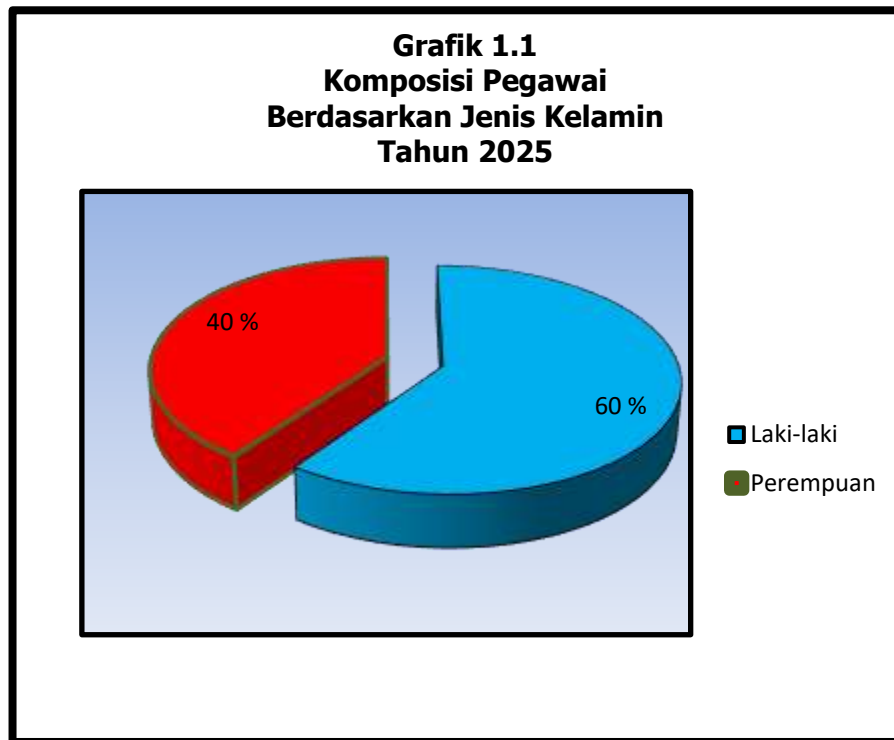
**Tabel 1.1.**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	% Terhadap Jumlah Pegawai
1	Laki-Laki	24	40
2	Perempuan	16	60
<b>Total</b>		<b>40</b>	<b>100%</b>

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Badan Kesbangpol Prov.Sumbar



Secara grafik komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin disajikan pada grafik 1.1 berikut:



Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Badan Kesbangpol Prov Sumbar

Berdasarkan tingkat pendidikan, komposisi pegawai disajikan pada tabel 1.2 berikut:

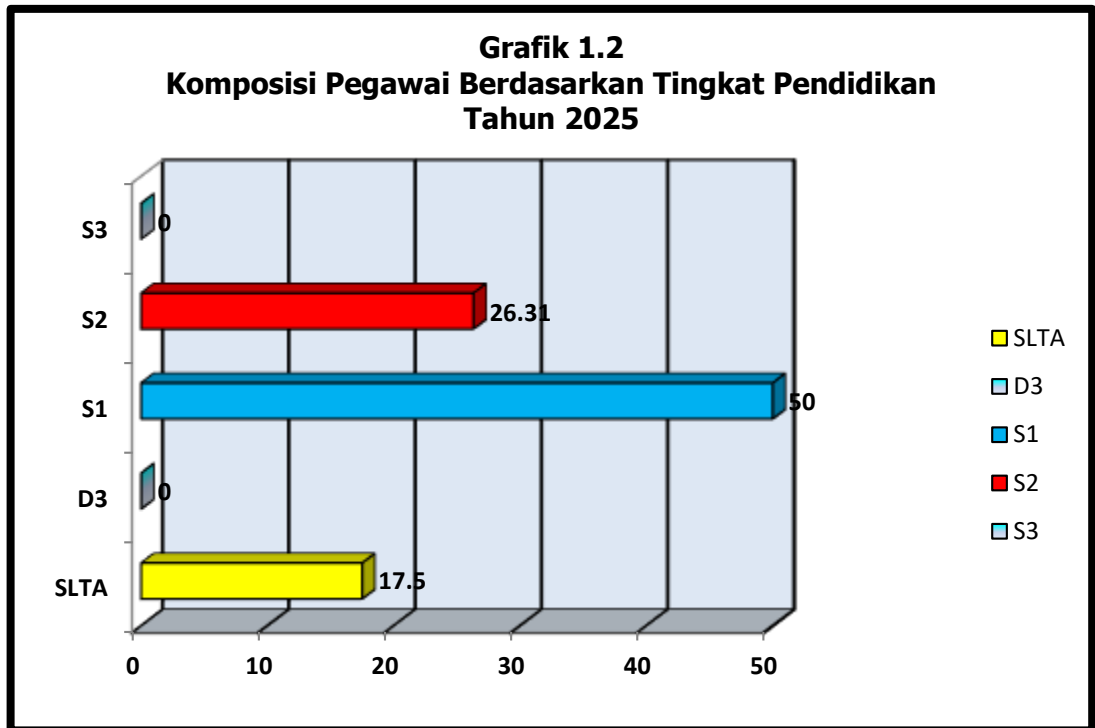
**Tabel 1.2.**  
**Komposisi pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SLTA	7	17,5%
2	DIPLOMA III/ D-3	-	-
3	STRATA 1	20	50%
4	STRATA 2	13	32,5%
5	STRATA 3	0	0%
	<b>JUMLAH</b>	<b>40</b>	<b>100%</b>

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Badan Kesbangpol Prov. Sumbar

Dilihat dari segi pendidikan, komposisi pegawai Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat cukup memadai untuk melaksanakan tugas-tugas Badan Kesbangpol yang terdiri dari 82,5% pegawai sudah berpendidikan sarjana dan 17,5% pegawai merupakan lulusan SMA. Secara grafik komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan disajikan pada grafik 1.2 berikut :





Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Badan Kesbangpol Prov Sumbar

Selanjutnya komposisi pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel di bawah:

**Tabel 1.3.**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun 2025**

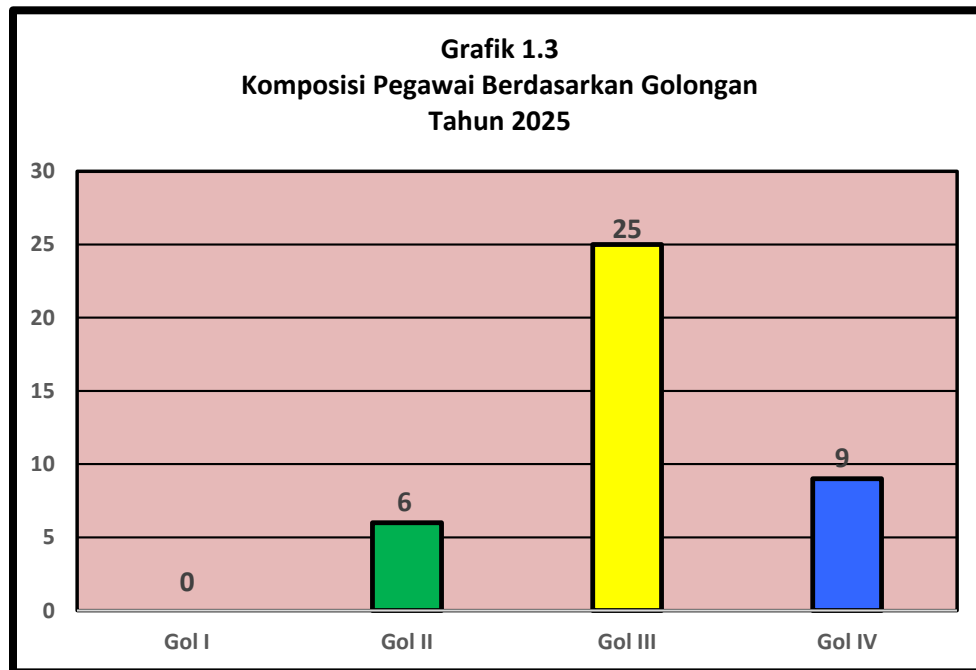
No.	Golongan	Jumlah	Persentase
1	Golongan I	0	0%
2	Golongan II	6	15%
3	Golongan III	25	62,5%
4	Golongan IV	9	22,5%
	<b>JUMLAH</b>	<b>40</b>	<b>100%</b>

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Badan Kesbangpol Prov Sumbar

Sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, tercatat 62,5% pegawai Badan Kesbangpol adalah golongan III, sedangkan pegawai golongan II sebanyak 15% dan dan golongan IV sebanyak 22,5%.

Secara grafik, komposisi pegawai berdasarkan golongan disajikan pada grafik 1.3 berikut :





Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Badan Kesbangpol Prov Sumbar

Komposisi pegawai berdasarkan penempatan di masing-masing bidang dapat dilihat pada tabel 1.4 di bawah:

**Tabel 1.4.**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Penempatan di Masing-Masing Bidang**  
**Tahun 2025**

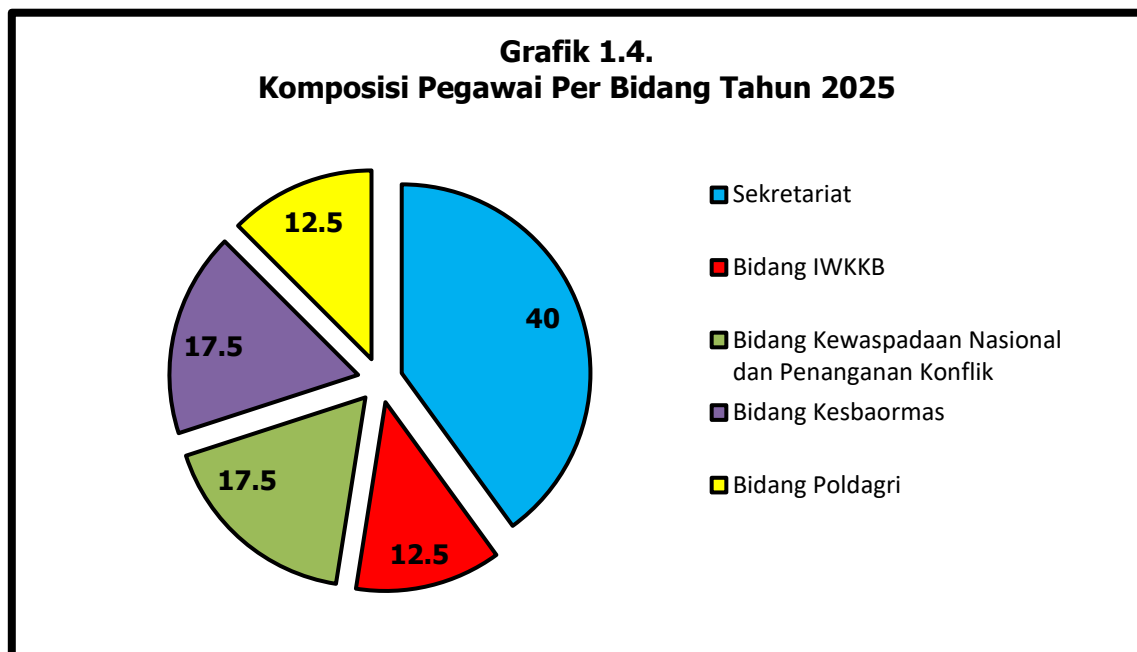
No	Bidang	Jumlah	%
1.	Sekretariat	16 org	40 %
2.	Bidang Idiologi, Wasbang & Karakter Bangsa	5 org	12,5%
3.	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	7 org	17,5 %
4.	Bidang Ket. Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Ormas	7 org	17,5%
5.	Bidang Politik Dalam Negeri	5 org	12,5%
	<b>JUMLAH</b>	<b>40 org</b>	<b>100%</b>

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Badan Kesbangpol Prov Sumbar

Sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, tercatat 40% pegawai berada di sekretariat, sedangkan jumlah pegawai yang ditempatkan pada masing-masing bidang sebanyak 5 atau 7 orang. Sehingga perlu adanya penambahan pegawai pada masing-masing bidang untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas-tugas Badan Kesbangpol.



Secara grafik komposisi pegawai berdasarkan penempatan di masing- masing bidang disajikan pada grafik 1.4 di bawah ini:



Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Badan Kesbangpol Prov Sumbar

## 1.2 Aspek Strategis Organisasi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat secara langsung mendukung pencapaian misi 2 Kepala Daerah yaitu "Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah".

Misi 2 Kepala Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai terdiri dari :

1. Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS-SBK
2. Meningkatnya budaya literasi
3. Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat berperan dalam pencapaian sasaran 1 misi 2 Kepala Daerah tersebut yaitu meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS-SBK. Sasaran ini ditetapkan menjadi tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat.

Untuk mendukung visi dan misi Kepala Daerah tersebut, berdasarkan tugas dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat memiliki peran strategis diantaranya:



1. **Penguatan pencegahan potensi konflik sosial**, khususnya terkait perbatasan wilayah, lahan/tanah ulayat, isu SARA, dan perebutan sumber daya alam.
2. **Peningkatan efektivitas pengendalian aksi penyampaian pendapat di muka umum** agar tidak berkembang menjadi tindakan yang mengganggu ketertiban dan keamanan
3. **Pengembangan budaya demokrasi yang sehat dan bertanggung jawab**, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat dalam penyampaian aspirasi tanpa pemaksaan kehendak maupun gesekan sosial.
4. **Pembentukan budaya politik yang beretika dan bermoral**, untuk mengatasi kecenderungan perilaku politik agresif, pelanggaran aturan, serta melemahnya nilai-nilai etika politik di tingkat elite maupun massa.
5. **Penguatan wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila**, terutama bagi generasi muda yang terpengaruh oleh globalisasi, arus informasi, dan budaya asing yang mengikis nasionalisme
6. **Peningkatan pembinaan kerukunan antarumat beragama**, guna mencegah intoleransi, penolakan pendirian rumah ibadat, sentimen keagamaan, serta potensi radikalisme di masyarakat.
7. **Penguatan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dan penyakit masyarakat lainnya**, melalui edukasi, pembinaan, dan kolaborasi lintas sektor.
8. **Penertiban administrasi dan legalitas Ormas** melalui penguatan pendaftaran, verifikasi, dan basis data.

### 1.3 Permasalahan Utama (*Strategis Issued*)

---

Beberapa isu-isu strategis yang berkembang saat ini terkait tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat, yaitu:

1. Peningkatan upaya pencegahan dan penyelesaian konflik di tengah masyarakat baik konflik politik dalam pemilu, konflik sosial akibat kesenjangan ekonomi, konflik keagamaan akibat perbedaan paham keagamaan, konflik industrial yang berkaitan dengan upah, konflik lahan dan sumber daya alam
2. Pemantapan Wawasan Kebangsaan, Ideologi Pancasila, Pembauran Kebangsaan, Kesadaran dan Kemampuan Bela Negara serta Pembangunan Karakter bagi masyarakat
3. Penguatan kerukunan antar umat beragama dalam menjaga ketahanan bangsa
4. Optimalisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba dan penyakit masyarakat lainnya



5. Optimalisasi pendidikan politik masyarakat untuk membangun etika dan moral politik serta kedewasaan perilaku berdemokrasi.
6. Penguatan peran partai politik dan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan



## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

### 2. 1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Untuk mendukung visi dan misi Kepala Daerah tahun 2021-2026, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat menetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah tahun 2021-2026. Adapun tujuan yang telah ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah diantaranya :

1. Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat dengan indikator kinerja Indeks Ketahanan Sosial Budaya
2. Meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani dengan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi

Sedangkan sasaran pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat adalah :

1. Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan indikator kinerja Konflik di Sumatera Barat
2. Meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat dengan indikator kinerja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumatera Barat.
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi dengan indikator kinerja nilai akuntabilitas kinerja OPD
4. Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi dengan indikator kinerja tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi.

Penetapan tujuan dan sasaran ini mendukung misi 2 Kepala Daerah yaitu ***Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah.***" dengan tujuan mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat dan sasaran meningkatnya ketahanan sosial budaya yang berlandaskan ABS SBK.



Berdasarkan tujuan dan sasaran tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan Indikator Kinerja masing-masing tujuan dan sasaran sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 2.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan**  
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat**  
**Tahun 2021-206**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun n					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat	Indeks Ketahanan Sosial Budaya			62,78	62,8	62,8	62,8	62,9	62,9
			Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Konflik di Sumatera Barat (IKU)	4	3	3	2	2	2
			Meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar (IKU)	67,69	68,01	68,50	68,75	69,25	70
2	Meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani	Nilai Akuntabilitas Kinerja			73,14	73,64	74,14	76,64	75,14	75,64
		Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi			83%	84%	85%	86%	87%	88%
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	73,14	73,64	74,14	76,64	75,14	75,64	
		Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	83%	84%	85%	86%	87%	88%	

Sumber : Renstra Badan Kesbangpol Prov Sumbar Tahun 2021-2026

Penetapan Indikator Kinerja Utama telah mengacu kepada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

## 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis



Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian kinerja (PK) merupakan pernyataan tekad dan janji dalam bentuk kinerja yang akan dicapai, antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dalam dokumen perjanjian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat terdapat kesepakatan atau perjanjian kinerja antara Gubernur Sumatera Barat selaku Kepala Daerah dengan Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan sasaran yang termuat dalam Rencana Strategis Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Perjanjian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.2**  
**Perjanjian Kinerja**  
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat**  
**Tahun 2025**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	81,15
2	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	93%
3	Meningkatnya kemandirian, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Konflik di Sumatera Barat	1 kasus
4	Meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar	76,30

<b>No</b>	<b>Program</b>	<b>APBD (awal)</b>	<b>APBD (perubahan)</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	15.418.311.156,32	10.990.811.425	
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	3.854.672.595,68	2.604.886.500	



3	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	5.883.189.200	5.731.475.792	
4	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	103.574.000	563.850.000	
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	713.720.000	671.020.000	
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	841.900.000	1.628.335.000	
JUMLAH		26.815.366.952	22.190.378.717	

Sumber : Perjanjian Kinerja Badan Kesbangpol Prov Sumbar Tahun 2025

Pada tahun 2025, seluruh target indikator kinerja sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat yang merupakan tahun ke-5 pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 mengalami perubahan sebagaimana hasil evaluasi capaian kinerja Tahun 2024, dimana realisasi seluruh indikator kinerja sasaran tersebut pada tahun 2024 telah melebihi target yang dituangkan dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 untuk periode tahun 2024.



## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja dalam laporan kinerja ini diperoleh dari hasil pengukuran capaian kinerja yang dihitung dengan membandingkan antara realisasi dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja didasarkan pada kriteria berikut ini:

1. Jika realisasi tinggi yang menunjukkan kinerja yang baik, persentase capaian kerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Realisasi/Target} \times 100\%$$

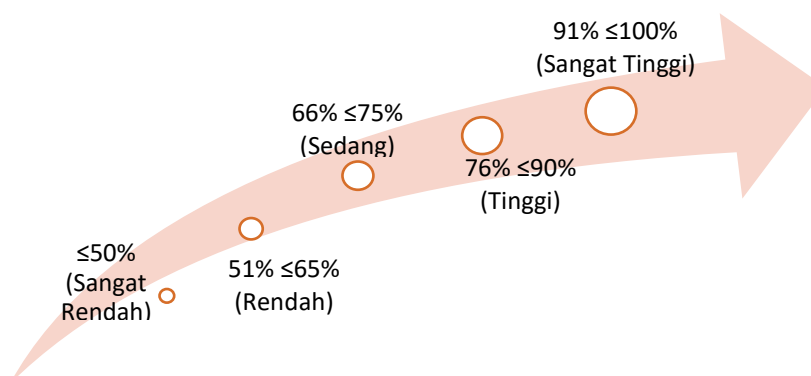
2. Jika realisasi tinggi yang menunjukkan kinerja yang tidak baik, persentase capaian kerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$((2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}) / \text{Target} \times 100\%$$

Hasil pengukuran kinerja tersebut akan digunakan untuk:

1. Menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Organisasi Perangkat Daerah
2. Menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja yang ditetapkan.
3. Menjadi dasar untuk menetapkan perencanaan di tahun yang akan datang

Untuk menginterpretasikan hasil pengukuran kinerja tersebut digunakan kriteria penilaian realisasi kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut :



Dalam menghitung efisiensi penggunaan sumber daya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021 dengan formula perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(PA \times CK) - RA}{PA} \times 100\%$$

Keterangan :

PA = Pagu Anggaran

CK = Capaian Kinerja (%)

RA = Realisasi Anggaran

### 3.2 Hasil Pengukuran Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap capaian target indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, rata-rata capaian sasaran strategis untuk 4 (empat) indikator kinerja adalah 126,11 %. Hasil pengukuran capaian indikator kinerja perjanjian kinerja tahun 2025 sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Hasil Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja**  
**Tahun 2025**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat		Indeks Ketahanan Sosial Budaya	62,9	63,27*	100,59*
		Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Konflik di Sumatera Barat	1 kasus	0 kasus	200%
		Meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar	76,30	78,83	103,32%

Sumber : Hasil Analisis Capaian Kinerja Badan Kesbangpol Tahun 2025



2.	Meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani	Nilai Akuntabilitas Kinerja		81,15	82,05	101,11%
		Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi		93	93	100%
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	81,15	82,05	101,11%
		Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	93	93	100%
<b>Rata-rata Capaian Sasaran Strategis</b>						<b>126,11%</b>

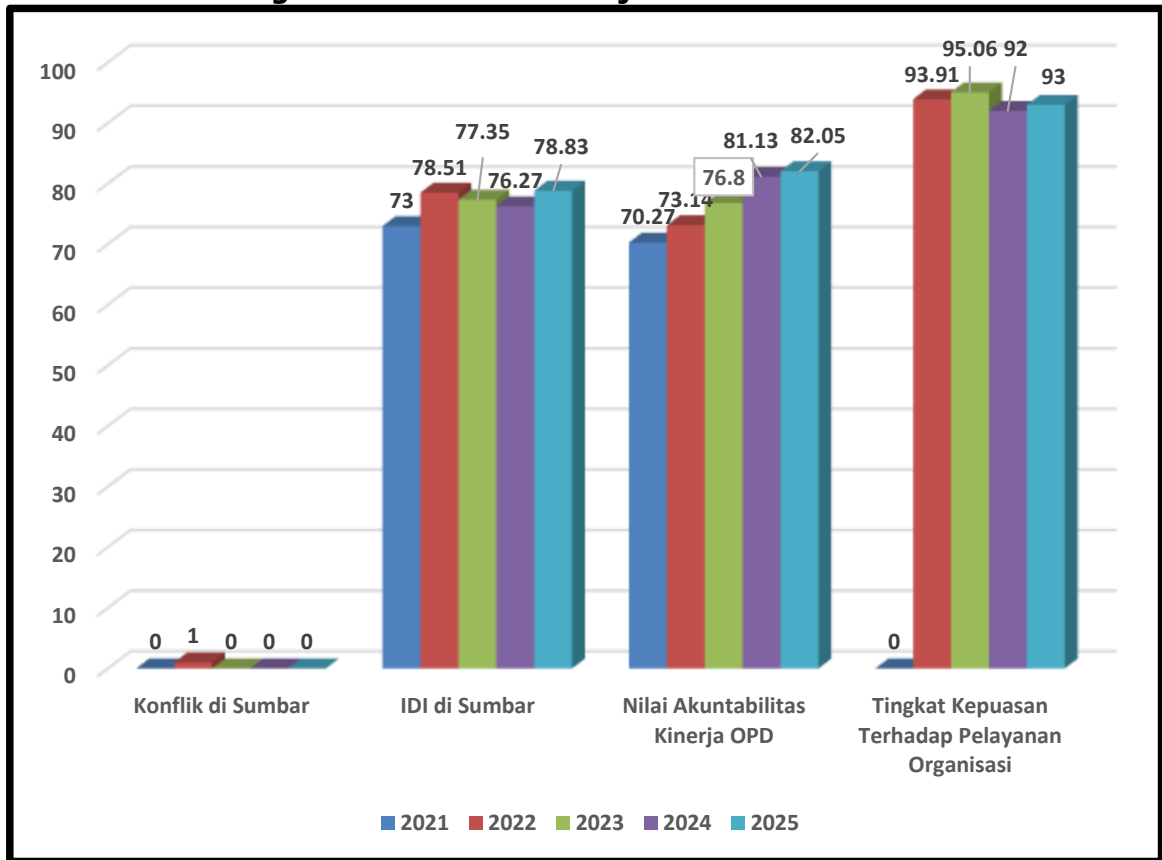
Pada tabel di atas, hasil pengukuran kinerja untuk capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis yaitu keempat sasaran strategis berhasil dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan atau dengan kategori nilai "**Sangat Tinggi**". Jika dibandingkan keempat sasaran tersebut, capaian indikator kinerja tertinggi yaitu indikator kinerja konflik di Sumatera Barat sedangkan indikator kinerja terendah, yaitu indikator kinerja tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat di Sumatera Barat telah dilaksanakan dengan baik.

Berikut perbandingan hasil pengukuran realisasi dan capaian kinerja tahun 2021 s.d 2025 sesuai dengan sasaran strategis Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 s.d 2025 yang tertuang di dalam Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 s.d 2026 :



**Grafik 3.1**

**Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2021 s.d 2025**



Sumber Data : Data diolah dari kinerja Badan Kesbangpol Prov Sumbar

### 3.3 Capaian Kinerja Organisasi

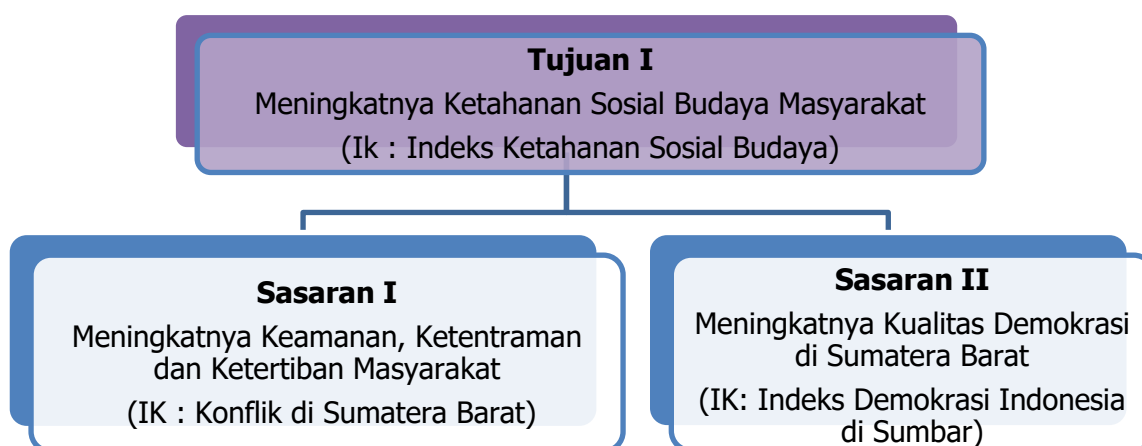
Berdasarkan hasil pengukuran sebagaimana tercantum pada tabel 3.1, berikut ini akan diuraikan evaluasi dan analisis pencapaian indikator kinerja untuk masing-masing sasaran strategis.

#### 3.3.1 Tujuan I : Meningkatnya Ketahanan Sosial Budaya

Tujuan yang ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat yaitu “Meningkatnya Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat” didukung melalui 2 (dua) sasaran strategis. Sasaran strategis I yaitu **meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat** dan sasaran II yaitu **meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat**. Tujuan dan sasaran strategis sebagaimana uraian di atas dapat dilihat pada gambar berikut :



**Gambar 3.1**  
**Tujuan I serta Sasaran Strategis I dan Sasaran Strategis II**



Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat adalah kemampuan masyarakat menjaga dan melestarikan nilai, norma, serta praktik sosial budaya, sekaligus beradaptasi terhadap perubahan dan pengaruh luar untuk mewujudkan kehidupan sosial yang harmonis, toleran, dan berkeadaban. Ketahanan sosial budaya masyarakat menunjukkan sejauh mana masyarakat mampu memelihara nilai, norma, adat, dan kearifan lokal, bersikap toleran dan inklusif dalam keberagaman, memiliki solidaritas sosial dan kepedulian antarwarga, mampu menyaring pengaruh globalisasi tanpa kehilangan jati diri bangsa. Peningkatan ketahanan sosial budaya masyarakat dicerminkan dengan semakin kuatnya nilai kebersamaan, toleransi, dan saling menghormati dalam masyarakat, terjaganya kerukunan sosial dan budaya di tengah keberagaman, meningkatnya kepedulian, solidaritas, dan gotong royong antarwarga, menguatnya identitas dan jati diri budaya masyarakat serta meningkatnya kemampuan masyarakat beradaptasi terhadap perubahan tanpa menimbulkan konflik sosial.

Peningkatan ketahanan sosial budaya masyarakat sangat penting menjaga kerukunan dan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat, memperkuat nilai dan norma sosial, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi perubahan, serta mencegah terjadinya konflik sosial guna mendukung stabilitas dan kelancaran pembangunan.

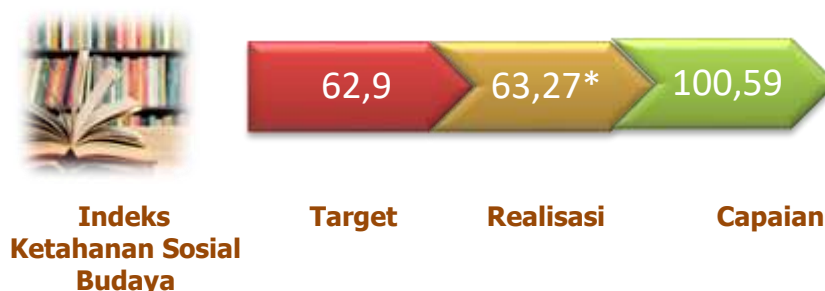
Ketahanan sosial budaya diukur dengan indikator kinerja Indeks Ketahanan Sosial Budaya yang diukur oleh Kementerian dan Kebudayaan dengan menggunakan 8 (delapan) indikator yakni



1. Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari agama lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal,
2. Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari suku lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal.
3. Persentase rumah tangga yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga berteman dengan orang lain yang beda agama.
4. Persentase rumah tangga yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga berteman dengan orang lain yang berbeda suku.
5. Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar dalam 3 bulan terakhir.
6. Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengikuti gotong royong.
7. Persentase rumah tangga yang merasa khawatir dengan keamanan saat berjalan kaki sendirian di malam hari.
8. Persentase rumah tangga yang merasa percaya menitipkan rumah kepada tetangga.

**Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025.** Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026 dan Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, Indikator Kinerja Indeks Ketahanan Sosial Budaya ditargetkan mencapai angka 62,9. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024, target tahun 2025 ditetapkan lebih rendah. Pencapaian sasaran “meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK” diuraikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja Tujuan 1**



Indeks Ketahanan Sosial Budaya tahun 2025 ditargetkan sebesar 62,9, terealisasi 63,27\* (angka sementara/realisasi tahun 2024) dengan tingkat capaian sebesar 100,59%\* termasuk kategori keberhasilan “sangat baik”. Data realisasi Indeks Ketahanan Sosial Budaya tahun 2025 diperoleh berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Indeks Pembangunan Kebudayaan sub komponen Indeks Ketahanan Sosial Budaya. Dikarenakan informasi IPK tahun 2025 belum dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan

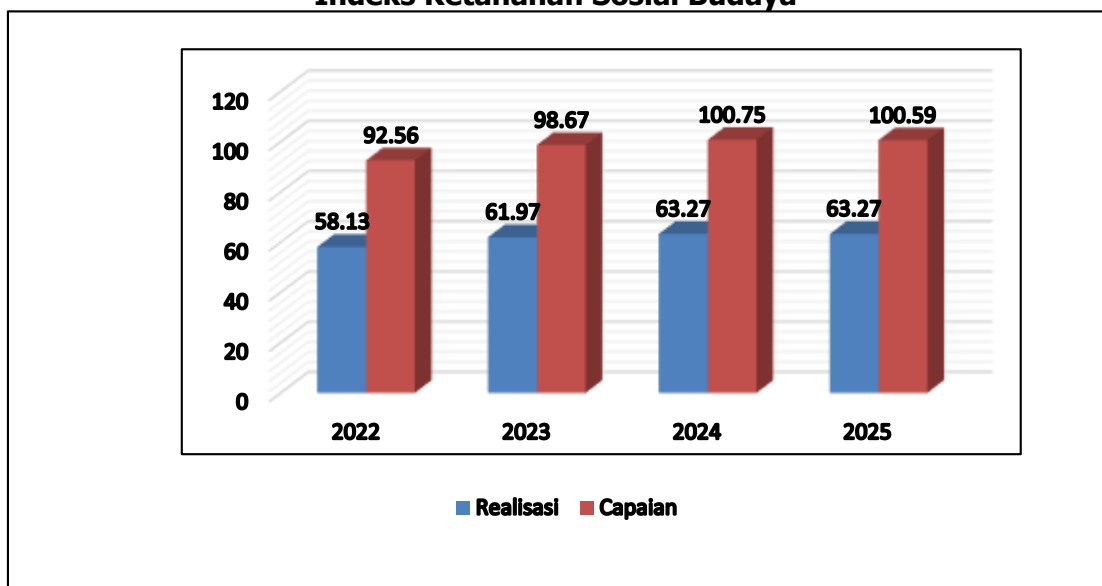


Kebudayaan, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggunakan angka Indeks Ketahanan Sosial Budaya kondisi tahun sebelumnya (2024). Realisasi Indeks Ketahanan Sosial Budaya Sumatera Barat berada di Peringkat ke-32 dari 34 Provinsi dengan capaian 63,27\* di bawah rata-rata nasional 70,73\*

Tidak tercapainya target yang telah ditetapkan disebabkan beberapa indikator yang capaiannya masih di bawah rata-rata nasional diantaranya persentase masyarakat yang setuju jika ada sekelompok orang dari agama dan suku yang berbeda melakukan kegiatan di sekitar tempat tinggal dan persentase rumah tangga yang merasa khawatir dengan keamanan saat berjalan kaki sendirian di malam hari dalam setahun terakhir. Sedangkan indikator lain terkait aktivitas sosial seperti penduduk berumur 10 tahun ke atas yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan, atau yang mengikuti gotong royong, capaian Provinsi Sumatera Barat mendekati dan di atas rata-rata nasional.

**Perbandingan dengan Realisasi Tahun Sebelumnya.** Perhitungan capaian indikator Indeks Ketahanan Sosial Budaya menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*. Capaian indikator Indeks Ketahanan Sosial Budaya tahun 2025 sebesar 100,59%\*. Dibandingkan tahun sebelumnya, capaian indikator kinerja ini menurun 0,16%\*. Perbandingan realisasi dan capaian Indeks Ketahanan Sosial Budaya tahun 2025 dengan tahun 2024 dan 2023 digambarkan pada grafik berikut.

**Grafik 3.2 Perbandingan Capaian dan Realisasi Indikator Indeks Ketahanan Sosial Budaya**



Sumber data : [www.ipk.kemdikbud.go.id](http://www.ipk.kemdikbud.go.id)



Indeks Ketahanan Sosial Budaya Provinsi Sumatera Barat tahun 2022-2024 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun yaitu 58,13 di tahun 2022, 61,97 tahun 2023, meningkat menjadi 63,27 di tahun 2024 dan tetap di angka 63,27\* (angka sementara) di tahun 2025. Pada tahun 2026 (tahun akhir RPJMD), Indeks Ketahanan Sosial Budaya Provinsi Sumatera Barat ditargetkan sebesar 62,90. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2025, realisasi Indeks Ketahanan Sosial Budaya Provinsi Sumatera Barat sudah melebihi target tahun 2026.

**Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Dokumen Renstra.** Dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021–2026 ditetapkan target indeks ketahanan sosial budaya sampai dengan tahun 2025 sebesar 62,9. Apabila dibandingkan antara realisasi sampai dengan tahun 2025 dengan target Renstra sampai dengan tahun 2025, capaian kinerja indikator indeks ketahanan sosial budaya pada tahun 2025 mencapai 192,86 %, sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra**

Tujuan	Indikator Kinerja	TAHUN 2025		%	Target Akhir RPJMD/ Renstra	Capaian s.d Tahun 2025 Terhadap Target RPJMD/ Renstra (%)
		Target	Realisasi			
Meningkatnya Ketahanan Sosial Budaya	Indeks Ketahanan Sosial Budaya	62,9	63,27	100,59	62,9	100,59

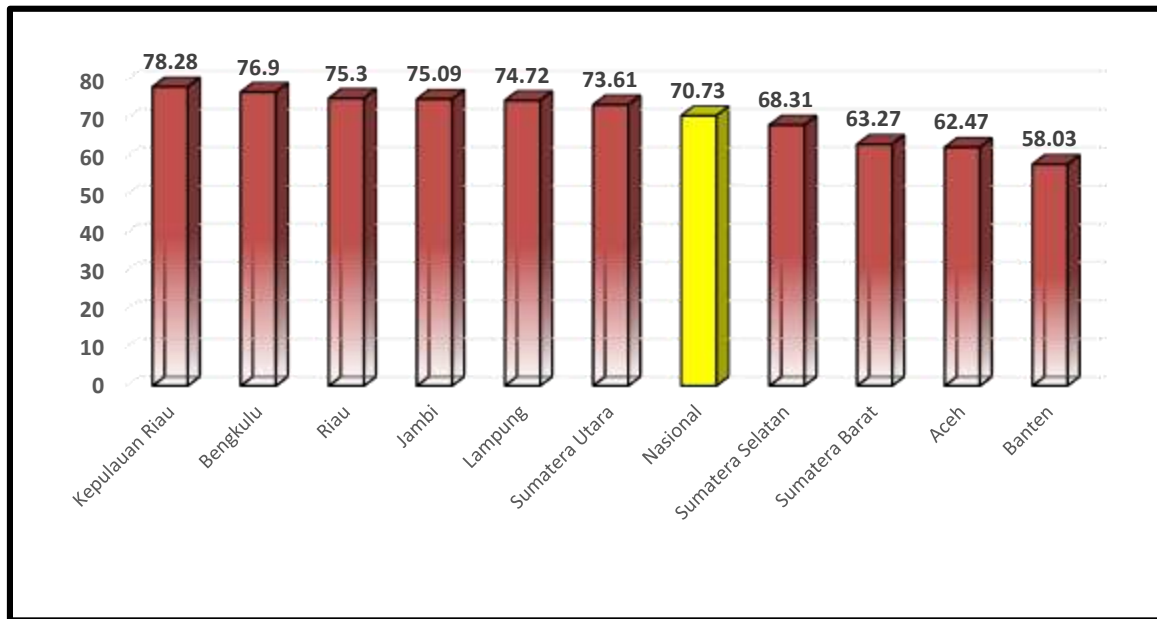
Capaian indeks ketahanan sosial budaya telah melebihi target akhir pada Renstra/RPJMD dengan capaian sebesar 100,59%. Hal ini berarti bahwa kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dalam mendukung penguatan ketahanan sosial budaya masyarakat telah terlaksana secara sangat baik, serta menunjukkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada penguatan nilai-nilai sosial budaya, toleransi, dan harmoni sosial di tengah masyarakat.

**Perbandingan Realisasi dengan Standar Nasional.** Indeks Ketahanan Sosial Budaya Sumatera Barat di tahun 2025 berada di bawah rata-rata Nasional dengan selisih lebih tinggi 7,46 poin. Dari 10 Provinsi yang ada di Pulau Sumatera, Provinsi Sumatera Barat berada di Peringkat



8 atau Provinsi Sumatera Barat menempati urutan ke 3 terendah setelah Provinsi Aceh dan Banten. Perbandingan Indeks Ketahanan Sosial Budaya Provinsi Sumatera Barat dengan nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera digambarkan pada grafik berikut :

**Grafik 3.3 Perbandingan Indeks Ketahanan Sosial Budaya Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera**



Sumber data : [www.ipk.kemdikbud.go.id](http://www.ipk.kemdikbud.go.id)

**Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan.** Untuk meningkatkan indikator kinerja sasaran meningkatnya ketahanan sosial budaya sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat, terdapat beberapa faktor yang mendorong keberhasilan tercapainya realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan melalui upaya-upaya yang telah dilakukan selama tahun 2025 sebagai berikut :

1. Menjalinkan komunikasi dan koordinasi antar elemen masyarakat melalui kemitraan bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah (TKDPD), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) guna menjaga kerukunan, kebersamaan, dan kondusivitas daerah.
2. Pelaksanaan sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai kebangsaan, Pancasila, Wawasan Kebangsaan guna memperkuat persatuan, toleransi, dan rasa kebangsaan, menumbuhkan sikap saling menghormati dalam keberagaman, serta membentuk perilaku masyarakat yang



berkarakter dan berkeadaban sehingga mampu menghadapi perubahan sosial dan mencegah konflik sosial

3. Melaksanakan sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) bagi generasi muda dan tokoh masyarakat guna melindungi masyarakat dari dampak narkoba, memperkuat ketahanan keluarga dan lingkungan sosial, menjaga nilai dan norma sosial, serta menciptakan kehidupan masyarakat yang sehat, produktif, dan berkeadaban
4. Melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran berdemokrasi yang sehat, memperkuat nilai persatuan dan toleransi, membangun sikap saling menghormati dalam keberagaman, serta mencegah konflik sosial dalam kehidupan bermasyarakat.
5. Melaksanakan Peningkatan Kapasitas dan Peran Serta Ormas dalam Pembangunan Daerah. Peningkatan kapasitas ormas mendorong ormas agar berperan aktif sebagai perekat sosial di tengah masyarakat, menanamkan dan menjaga nilai kebersamaan, toleransi, dan gotong royong, menjadi mitra pemerintah dalam pencegahan konflik sosial serta melestarikan nilai dan kearifan budaya lokal. Dengan demikian, ormas yang kuat, berdaya, dan berwawasan kebangsaan berkontribusi langsung terhadap terwujudnya masyarakat yang rukun, dan harmonis.

Disamping upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mencapai keberhasilan kinerja Indeks Ketahanan Sosial Budaya pada Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2025, juga terdapat beberapa **faktor yang menghambat** tercapainya sasaran kinerja ini diantaranya :

- a. Keterbatasan sumber daya (anggaran dan SDM) dalam pelaksanaan program pembinaan sosial budaya secara berkelanjutan.
- b. Koordinasi lintas OPD dan lintas sektor yang belum optimal, sehingga sinergi program belum sepenuhnya terintegrasi.
- c. Tingkat partisipasi masyarakat yang bervariasi, khususnya dalam kegiatan penguatan nilai kebangsaan dan toleransi.
- d. Dinamika sosial dan pengaruh globalisasi, termasuk media sosial, yang berpotensi memengaruhi nilai dan harmoni sosial budaya
- e. Masih adanya potensi konflik sosial berbasis perbedaan identitas dan kepentingan di beberapa wilayah.



**Alternative Solusi Yang Dilakukan.** Untuk meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK ke depannya, Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat akan melakukan upaya sebagai berikut:

1. Memperkuat koordinasi dan sinergi lintas OPD serta pemerintah kabupaten/kota dalam perencanaan dan pelaksanaan program penguatan ketahanan sosial budaya.
2. Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan sosial kemasyarakatan, seperti FKUB, FPK, FKDM dan TKDPD.
3. Mengintensifkan sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai kebangsaan, Pancasila, dan kearifan lokal, termasuk nilai *Adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah*.
4. Memperkuat sistem deteksi dini dan pencegahan konflik sosial, melalui peningkatan kapasitas Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan partisipasi masyarakat.
5. Mendorong peningkatan literasi digital masyarakat untuk menangkal hoaks dan ujaran kebencian yang berpotensi mengganggu harmoni sosial budaya

## I. Sasaran Strategis I "Meningkatnya Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat "

### SASARAN STRATEGIS I



Sasaran meningkatnya keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat merupakan kondisi yang diharapkan dari terselenggaranya urusan pemerintahan umum di bidang kesatuan bangsa dan politik, khususnya dalam upaya menjaga stabilitas sosial dan politik di Provinsi Sumatera Barat. Keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, serta kehidupan sosial kemasyarakatan. Kondisi masyarakat yang aman dan tertib menciptakan rasa nyaman, kepastian hukum, serta kepercayaan publik terhadap pemerintah, sehingga aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya dapat berjalan secara optimal.



Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat berperan penting dalam mencegah terjadinya konflik sosial dan gangguan stabilitas daerah. Dengan terjaganya situasi yang kondusif, potensi konflik dapat dideteksi dan ditangani sejak dini, sehingga tidak berkembang menjadi konflik terbuka yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat dan pembangunan daerah. Selain itu, keamanan dan ketenteraman masyarakat menjadi prasyarat bagi terciptanya harmoni sosial dan penguatan persatuan serta kesatuan bangsa. Lingkungan yang tertib dan kondusif mendorong tumbuhnya toleransi, saling menghormati, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga stabilitas dan ketahanan sosial di daerah. Oleh karena itu, peningkatan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan seluruh elemen masyarakat, yang dilaksanakan melalui upaya pencegahan, koordinasi, dan penanganan yang terpadu dan berkelanjutan.

Pencapaian sasaran meningkatnya keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat ditandai dengan menurunnya jumlah dan eskalasi konflik sosial, meningkatnya efektivitas upaya pencegahan dan penanganan konflik, membaiknya mekanisme deteksi dini terhadap potensi konflik berbasis perbedaan kepentingan, identitas sosial, maupun dinamika politik serta terbangunnya sinergi dan koordinasi yang efektif antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan pemangku kepentingan terkait.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat melaksanakan berbagai kegiatan strategis, antara lain fasilitasi kewaspadaan nasional, pemantauan dan pemetaan daerah rawan konflik, koordinasi penanganan konflik sosial melalui Forkopimda dan Tim Terpadu, serta penguatan peran forum-forum kemasyarakatan. Upaya tersebut diarahkan pada pencegahan konflik sejak dini, penanganan konflik secara cepat dan terkoordinasi, serta pemulihan kondisi sosial pascakonflik. Dengan terlaksananya upaya pencegahan dan penanganan konflik secara terpadu, diharapkan stabilitas keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat di Provinsi Sumatera Barat dapat terus terjaga, sehingga mendukung terciptanya suasana daerah yang aman, harmonis, dan kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan kehidupan bermasyarakat.

Sebagaimana diamanatkan pada pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, memelihara ketenteraman serta ketertiban masyarakat untuk menjaga stabilitas di daerah provinsi merupakan tugas dan tanggung jawab



Gubernur. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat merupakan perangkat daerah yang membantu Gubernur dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini di daerah Provinsi untuk mendukung terwujudnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di Sumatera Barat.

Sasaran meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat diukur dengan menggunakan indikator kinerja "Konflik di Sumatera Barat". Konflik yang diukur merupakan penjumlahan konflik yang terjadi di Sumatera Barat berlatarbelakang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan (Ipoleksusbudhankam) dalam kurun waktu 1 tahun. Formulasi perhitungan Konflik di Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

$$Kt = It + Pt + Et + SBt + PKt$$

Ket :

*Kt = Jumlah konflik tahun t*

*It = Jumlah konflik Ideologi tahun t*

*Pt = Jumlah konflik Politik tahun t*

*Et = Jumlah konflik Ekonomi tahun t*

*SBt = Jumlah konflik Sosial Budaya tahun t*

*PKt = Jumlah konflik Pertahanan Keamanan tahun t*

Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Permendagri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, konflik adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional. Konflik dapat bersumber dari permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, sosial, budaya, perseteruan antar umat beragama dan/atau interumat beragama, antarsuku, antaretnis, sengketa batas wilayah desa, kabupaten/kota, dan/atau provinsi, sengketa sumber daya alam antar masyarakat, dan/atau antar masyarakat dengan pelaku usaha, atau distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat.

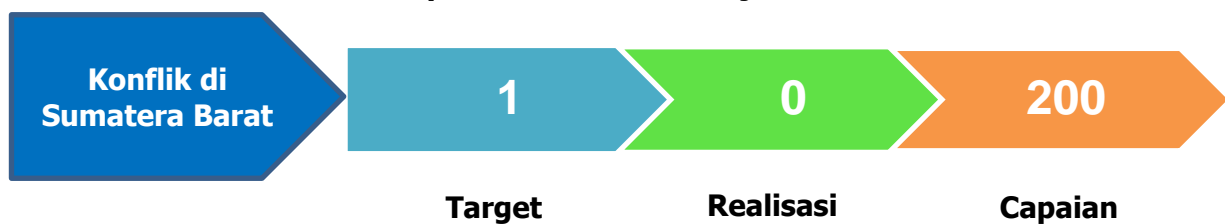
Berpedoman kepada Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026, konflik di Sumatera Barat pada tahun 2025 ditargetkan sebanyak 2 kasus. Namun, pada



perjanjian kinerja Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 dilakukan penyesuaian target menjadi 1 kasus. Penyesuaian ini dilakukan karena realisasi indikator kinerja konflik di Sumatera Barat pada tahun sebelumnya (2024) telah melebihi dari target tahun kelima (2025) Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat. Penyesuaian target ini telah dituangkan dalam Renja Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat tahun 2025.

**Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025.** Pencapaian sasaran meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di Sumatera Barat disajikan pada tabel 3.4

**Tabel 3.4**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran I**



Realisasi jumlah konflik di Sumatera Barat pada tahun 2025 sebanyak 0 kasus. Kasus ini dihitung berdasarkan jumlah potensi konflik yang tidak dapat dikendalikan atau berkembang menjadi konflik terbuka sepanjang 1 (satu) tahun terakhir. Artinya, sepanjang tahun 2025, tidak terdapat potensi konflik yang berkembang menjadi konflik sosial, seluruh potensi konflik berhasil diredam melalui upaya pencegahan dan penanganan dini.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pengendalian potensi konflik agar tidak berkembang menjadi konflik terbuka di tengah masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui pemantauan, deteksi dini, koordinasi lintas sektor, serta fasilitasi penyelesaian permasalahan secara preventif dan persuasif.

Pada tahun 2025, teridentifikasi sebanyak 84 potensi konflik yang tersebar di 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Potensi konflik tersebut meliputi konflik bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya, sumber daya alam dan lahan; batas wilayah dan SARA.

Adapun sebaran poternsi konflik di 19 kabupaten/kota disajikan pada tabel 3.5



**Tabel 3.5**  
**Rekapitulasi Potensi Konflik di Sumatera Barat Tahun 2025**

No	Kabupaten/ Kota	Jenis Potensi Konflik				Jumlah
		Ekopol/ Sosbud	SDA/ lahan	Batas Wilayah	SARA	
1	Kota Padang	3	-	-	1	4
2	Kota Pariaman	1	-	-	-	1
3	Kota Sawahlunto	-	-	-	-	-
4	Kota Padang Panjang	4	-	1	-	5
5	Kota Solok	2	-	-	-	2
6	Kota Bukittinggi	-	-	-	-	-
7	Kota Payakumbuh	-	-	2	-	2
8	Kabupaten Padang Pariaman	1	3	-	-	4
9	Kabupaten Pesisir Selatan	3	2	-	-	5
10	Kabupaten Solok	2	-	-	-	2
11	Kabupaten Solok Selatan	2	-	-	-	2
12	Kabupaten Tanah Datar	5	-	2	6	13
13	Kabupaten Limapuluh Kota	10	2	-	-	12
14	Kabupaten Pasaman	1	2	-	-	3
15	Kabupaten Pasaman Barat	2	6	-	-	8
16	Kabupaten Dharmasraya	4	5	1	-	10
17	Kabupaten Kepulauan Mentawai	1	2	-	-	3
18	Kabupaten Sijunjung	2	-	2	-	4
19	Kabupaten Agam	-	4	-	-	4
Jumlah		<b>43</b>	<b>26</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>84</b>

Sumber : Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat

Seluruh potensi konflik tersebut dapat dikelola dan diredam dengan baik sehingga tidak berkembang menjadi konflik sosial, serta tidak menimbulkan gangguan terhadap keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat. Keberhasilan dalam meredam potensi konflik tersebut tidak terlepas dari penguatan fungsi kewaspadaan dini, optimalisasi peran tim terpadu penanganan konflik, serta sinergi dan koordinasi yang intensif dengan Forkopimda, pemerintah kabupaten/kota, aparat keamanan, dan unsur masyarakat. Selain itu, pendekatan dialogis dan kearifan lokal turut menjadi strategi penting dalam menjaga stabilitas sosial di daerah.

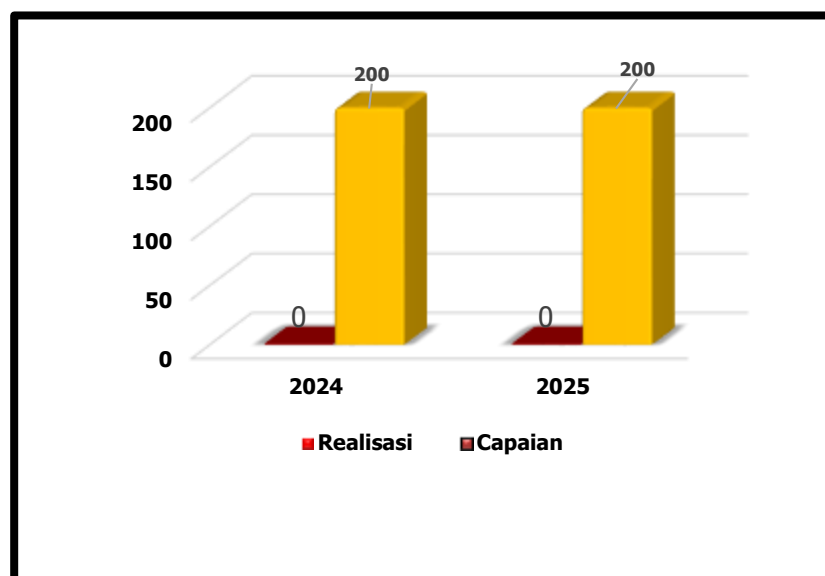


Dengan terkendalinya seluruh potensi konflik pada tahun 2025, kondisi keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat di Provinsi Sumatera Barat tetap terjaga secara kondusif, sehingga mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, dan kehidupan bermasyarakat secara berkelanjutan.

Capaian indikator konflik di Sumatera Barat diukur dengan *metode pengukuran kriteria kedua*. Capaian indikator Konflik di Sumatera Barat pada tahun 2025 sebesar 200%, termasuk kategori keberhasilan **sangat tinggi**. Metode pengukuran kriteria kedua ini menunjukkan bahwa semakin tinggi jumlah konflik yang terjadi di Sumatera Barat, maka kinerja yang dicapai semakin tidak baik. Sebaliknya, semakin rendah jumlah konflik yang terjadi, maka kinerja yang dicapai semakin baik. Dengan demikian, penurunan jumlah konflik menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dalam menjaga keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

**Perbandingan dengan Realisasi Tahun Sebelumnya.** Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian konflik di Sumatera Barat sama dengan tahun sebelumnya yaitu 200%. Pada tahun 2024, konflik di Sumatera Barat ditargetkan sebesar 1 kasus terealisasi 0 kasus dengan tingkat capaian sebesar 200%. Perbandingan realisasi dan capaian indikator konflik di Sumatera Barat tahun 2024-2025 dapat dilihat pada grafik berikut :

**Grafik 3.4**  
**Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Konflik di Sumatera Barat Tahun 2024-2025**

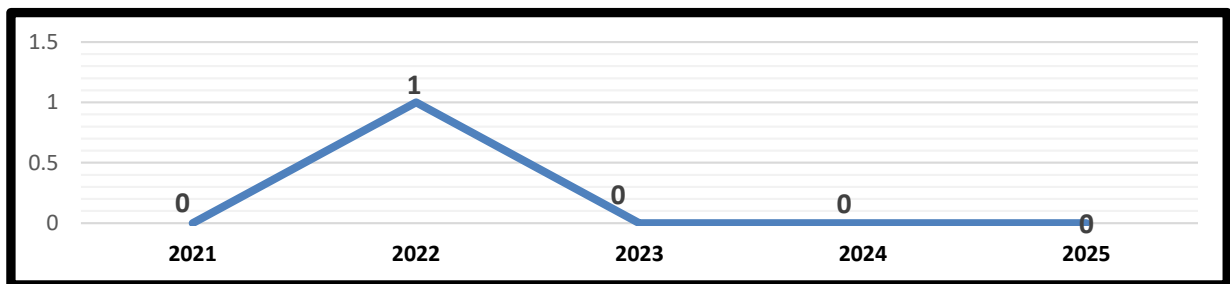


Sumber : Data diolah



Gambaran konflik di Sumatera Barat dalam kurun waktu lima tahun menunjukkan pola yang berfluktuatif. Jumlah konflik mengalami peningkatan pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dan mengalami penurunan pada tahun 2023. Selanjutnya, pada tahun 2024 dan 2025, jumlah konflik di Provinsi Sumatera Barat tidak mengalami perubahan dan relatif sama dibandingkan dengan tahun 2023. Perkembangan jumlah konflik di Sumatera Barat selama periode tahun 2021–2025 dapat dilihat pada grafik berikut :

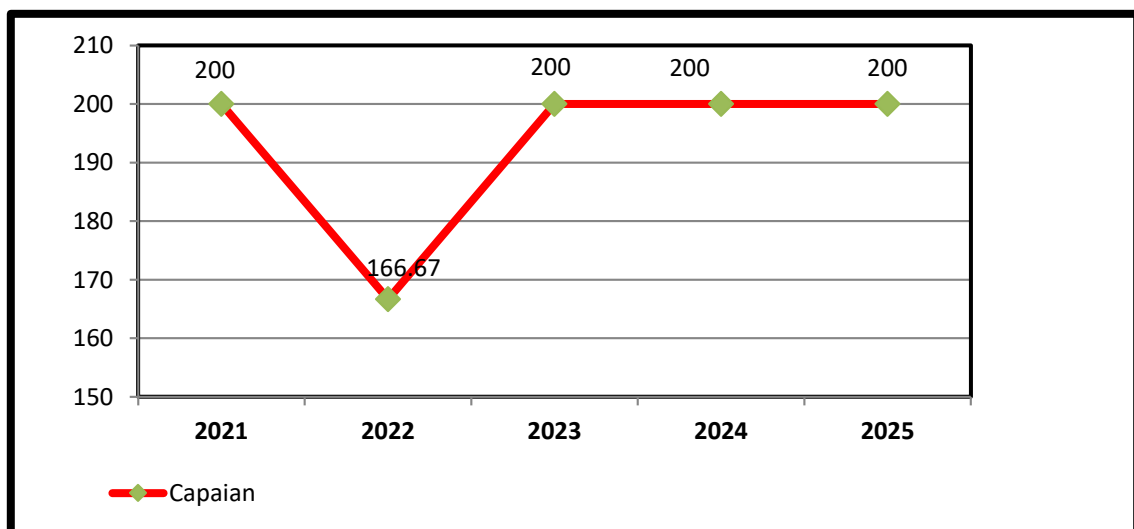
**Grafik 3.5**  
**Perkembangan Konflik di Sumatera Barat**  
**Tahun 2021-2025**



Sumber Data : Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat

Capaian Indikator Kinerja Konflik di Sumatera Barat tahun 2021–2025 disajikan pada grafik berikut :

**Grafik 3.6**  
**Capaian Indikator Kinerja Konflik di Sumatera Barat**  
**Tahun 2021- 2025**



Sumber Data : Data Diolah



Capaian Indikator Kinerja jumlah konflik di Sumatera Barat menunjukkan tren yang berfluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 capaian mencapai 200%, selanjutnya mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi 166,67%, dan kembali meningkat menjadi 200% pada tahun 2023, 2024, dan 2025.

**Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Dokumen RPJMD dan Dokumen Renstra.** Sesuai dengan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 yang berpedoman kepada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, bahwa sasaran meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan indikator kinerja konflik di Sumatera Barat adalah mendukung tercapainya sasaran Kepala Daerah meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK dengan indikator kinerja Indeks Ketahanan Sosial Budaya (Dimensi IPK BPS). Secara lengkap, gambaran pengukuran capaian kinerja sasaran meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dibandingkan dengan target Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat dan target RPJMD Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.6**  
**Perbandingan capaian Konflik di Sumatera Barat Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD/Renstra Tahun 2021-2026**

Sasaran	Indikator Kinerja	TAHUN 2025		%	Target Akhir RPJMD/ Renstra	Capaian s.d Tahun 2025 Terhadap Target RPJMD/Renstra (%)
		Target	Realisasi			
Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan dan Ketertiban Masyarakat	Konflik di Sumbar	2	0	200	2	200

Sumber : Hasil analisis capaian kinerja Badan Kesbangpol Prov Sumbar Tahun 2025

Capaian Indikator Kinerja Konflik di Sumatera Barat tahun 2025 telah mencapai target akhir pada Renstra/RPJMD dengan capaian sebesar 200%. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah konflik yang terjadi berada jauh di bawah target yang ditetapkan, sehingga menggambarkan kondisi stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat yang relatif kondusif. Capaian ini sekaligus mencerminkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan



Politik Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan deteksi dini, pencegahan, serta penanganan potensi konflik sosial di daerah.

**Perbandingan Realisasi dengan Standar Nasional.** Secara nasional, tidak terdapat target angka absolut terkait jumlah konflik yang harus dicapai oleh daerah. Indikator konflik yang digunakan dalam urusan pemerintahan umum, khususnya bidang kesatuan bangsa dan politik, bersifat kualitatif dan berorientasi pada pengendalian, dengan prinsip semakin kecil jumlah konflik maka kinerja semakin baik. Kebijakan nasional lebih menekankan pada pencegahan konflik sejak dini, penurunan eskalasi konflik, penanganan konflik secara cepat, tepat, dan terkoordinasi serta tidak berkembangnya potensi konflik menjadi konflik sosial terbuka. Dengan demikian, target nasional diterjemahkan oleh pemerintah daerah ke dalam target daerah yang disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik wilayah.

**Analisis Penyebab Kebersihan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan.** Untuk meningkatkan pencapaian indikator kinerja sasaran meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat, terdapat beberapa faktor yang mendorong keberhasilan tercapainya realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan melalui upaya-upaya yang telah dilakukan selama tahun 2025 sebagai berikut :

1. Penguatan koordinasi lintas sektor

Terjalannya koordinasi yang efektif antara Pemerintah Daerah, Forkopimda, aparat keamanan (TNI dan Polri), pemerintah kabupaten/kota, pemangku kepentingan dan OPD terkait dalam mengendalikan potensi konflik agar tidak berkembang menjadi konflik sosial terbuka. Mekanisme koordinasi yang berjalan efektif memungkinkan penyelesaian permasalahan dilakukan secara cepat, tepat, dan terukur.

2. Optimalisasi peran forum-forum strategis daerah

Dalam upaya meredam potensi konflik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat mengintensifkan peran tim dan forum-forum strategis daerah melalui pelaksanaan rapat koordinasi secara berkala. Tim dan forum-forum strategis tersebut dibentuk dan difasilitasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Keputusan Kepala Daerah di antaranya Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, dan Forum Pembauran Kebangsaan. Forum-forum tersebut dibentuk untuk mendeteksi dini potensi konflik sosial, memfasilitasi dialog antar kelompok masyarakat, serta mendorong penyelesaian permasalahan secara persuasif dan preventif



3. Pelaksanaan deteksi dini dan pencegahan konflik yang lebih efektif  
Adanya pemantauan intensif terhadap dinamika sosial, politik, dan keamanan di daerah, sehingga potensi gangguan keamanan dan konflik sosial dapat diantisipasi dan ditangani sejak tahap awal sebelum berkembang menjadi konflik terbuka. Pemantauan dan pemetaan wilayah rawan konflik dilakukan secara rutin, sehingga potensi konflik dapat diidentifikasi sejak dini dan ditindaklanjuti melalui langkah-langkah pencegahan yang tepat. Pemetaan wilayah potensi konflik menghasilkan buku pemetaan potensi konflik sebagai salah satu upaya meminimalisir meluasnya konflik yang dipicu oleh berbagai faktor. Buku pemetaan potensi konflik mencakup gambaran potensi konflik per kabupaten/kota beserta analisis terhadap potensi dimaksud. Buku ini juga menggambarkan dominasi jenis potensi konflik di Sumbar serta rekapitulasi seluruh potensi konflik dalam satu tahun, yang bisa dijadikan pedoman pengelolaan potensi konflik di tahun mendatang.
4. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat  
Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya menjaga persatuan, toleransi, dan ketertiban umum sebagai hasil dari kegiatan pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, serta pendidikan politik dan sosial kemasyarakatan.
5. Pendekatan persuasif dan dialogis dalam penanganan konflik  
Penyelesaian permasalahan sosial dilakukan melalui pendekatan musyawarah, mediasi, dan dialog antar pihak terkait, sehingga mampu meredam eskalasi konflik dan menjaga kondusivitas daerah
6. Kondisi sosial budaya masyarakat yang relatif kondusif  
Kuatnya nilai-nilai kearifan lokal, adat, dan budaya gotong royong di tengah masyarakat Sumatera Barat turut berperan dalam menjaga harmoni sosial dan mencegah terjadinya konflik sosial yang berkepanjangan.

Dengan dukungan faktor-faktor tersebut, pengendalian konflik di Provinsi Sumatera Barat dapat dilaksanakan secara optimal, sehingga indikator kinerja konflik menunjukkan capaian yang baik dan kondisi keamanan, ketenteraman, serta ketertiban masyarakat tetap terjaga.

Di samping upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mencapai keberhasilan kinerja Indikator Konflik di Sumatera Barat pada Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat selama 2025, juga terdapat beberapa **faktor yang menghambat** tercapainya sasaran kinerja ini, diantaranya :



1. Masih terbatasnya kapasitas sumber daya intelijen Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat dalam mendukung pelaksanaan deteksi dini dan pencegahan dini potensi konflik sosial di seluruh kabupaten/kota.
2. Masih lemahnya sistem pelaporan dari beberapa perangkat daerah serta pemerintah kabupaten/kota dalam mendukung penyusunan Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, sehingga kualitas dokumen rencana aksi yang dihasilkan belum optimal
3. Belum optimalnya peran forum-forum strategis binaan Kesbangpol di daerah dalam melaksanakan deteksi dini terhadap potensi permasalahan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat

Dalam mengurangi dampak resiko tidak optimalnya capaian kinerja sasaran ini, maka Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat melakukan berbagai upaya sebagai alternative solusi diantaranya :

1. Peningkatan kapasitas sumber daya intelijen Kesbangpol  
Dilakukan melalui penguatan koordinasi dengan aparat keamanan dan instansi terkait, peningkatan kompetensi aparatur melalui bimbingan teknis dan rapat koordinasi, serta optimalisasi jejaring intelijen di tingkat kabupaten/kota guna mendukung pelaksanaan deteksi dini dan pencegahan dini potensi konflik sosial.
2. Perbaikan sistem pelaporan dan penyusunan Rencana Aksi Tim Terpadu  
Dilakukan dengan mendorong peningkatan kualitas dan ketepatan waktu pelaporan dari perangkat daerah dan pemerintah kabupaten/kota, pelaksanaan koordinasi dan asistensi teknis penyusunan Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, serta penyelarasan data dan informasi antar anggota tim terpadu.
3. Optimalisasi peran forum-forum strategis binaan Kesbangpol  
Dilakukan melalui peningkatan fungsi koordinasi forum-forum strategis (FKUB, FPK, Kewaspadaan Dini Masyarakat, dan forum terkait lainnya), penguatan peran forum dalam penyampaian informasi dini, serta peningkatan sinergi antara forum, pemerintah daerah, dan aparat keamanan dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

**Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.** Dalam rangka pencapaian keberhasilan sasaran meningkatnya keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat dengan indikator kinerja Konflik di Sumatera Barat dengan target 1 kasus pada tahun 2025 yang tercapai sebanyak 1 kasus dengan tingkat capaian sebesar 200%, telah disediakan anggaran melalui APBD/P Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 4.904.241.500 dengan realisasi sebesar Rp.



3.512.830.925,- atau 71,63 %. Anggaran ini tersebar pada 2 (dua) Program, 3 Kegiatan dan 10 Sub Kegiatan. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung sasaran I dapat dilihat pada tabel 3.7

**Tabel 3.7**  
**Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 1**

<b>Sasaran/Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>
<b>Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.</b>	<b>3</b>	<b>4.904.241.500</b>	<b>3.512.830.925</b>
<b>PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>1</b>	<b>2.604.886.500</b>	<b>2.356.192.925</b>
<b>Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>		<b>2.604.886.500</b>	<b>2.356.192.925</b>
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan , Bela Negara,Karakter Bangsa, Pemaburan Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		1.135.342.000	1.089.856.720
Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,Karakter Bangsa, Pemaburan Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		24.775.000	20.531.000
Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila		56.200.000	21.350.000
Pembentukan Paskibraka		1.388.569.500	1.224.455.205
<b>PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya</b>	<b>1</b>	<b>671.020.000</b>	<b>653.490.000</b>
<b>Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>		<b>671.020.000</b>	<b>653.490.000</b>
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan		570.640.000	555.660.000



Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		100.380.000	97.830.000
<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	<b>1</b>	<b>1.628.355.000</b>	<b>503.148.000</b>
<b>Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>		<b>1.628.355.000</b>	<b>503.148.000</b>
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		1.034.400.000	15.900.000
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		59.585.000	58.028.000
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		4.880.000	4.880.000
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi		529.470.000	424.340.000



Sesuai dengan perhitungan tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 214/PMK.02/2021, maka untuk perhitungan analisis efisiensi anggaran dalam pencapaian indikator kinerja Konflik di Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(PA \times CK) - RA}{PA} \times 100\%$$

Keterangan :

PA = Pagu Anggaran = Rp. 4.904.216.500

CK = Capaian Kinerja (%) = 200%

RA = Realisasi Anggaran Rp. 3.512.830.925

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(4.904.216.500 \times 200\%) - 3.512.830.925}{4.904.216.500} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{6.295.602.075}{4.904.216.500} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 1,28$$

Untuk mengetahui besaran nilai efisiensi, tingkat efisiensi kinerja dikonversi menjadi skala 0% - 100% dengan formula penghitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Nilai Efisiensi} &= ((50\% + (\text{Efisiensi Kinerja}/20) \times 50)) \\ &= ((50\% + (1,28/20) \times 50)) \\ &= (50\% + 3,2) \\ &= 370\% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil analisis tingkat efisiensi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan pengelolaan anggaran secara efisien dalam mendukung pencapaian indikator kinerja konflik di Sumatera Barat. Nilai efisiensi yang diperoleh sebesar 370 persen, yang sesuai ketentuan pengukuran efisiensi dibulatkan menjadi 100 persen. Pada periode yang sama, capaian indikator kinerja konflik mencapai 200 persen. Efisiensi tersebut terutama dicapai melalui penghematan biaya penggunaan hotel dengan mengoptimalkan pemanfaatan gedung pemerintah untuk pelaksanaan rapat koordinasi, serta pengendalian belanja makan dan minum rapat dan honorarium narasumber.



## II. Sasaran Strategis II "Meningkatnya Kualitas Demokrasi di Sumatera Barat "

### SASARAN STRATEGIS II



Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat, yang diwujudkan melalui partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik secara langsung maupun melalui mekanisme perwakilan. Dalam sistem demokrasi, penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan prinsip kebebasan, persamaan, supremasi hukum, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia

Meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat merupakan upaya untuk mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan melalui peningkatan partisipasi politik masyarakat, penguatan kelembagaan demokrasi, serta terjaganya stabilitas politik dan keamanan daerah. Peningkatan kualitas demokrasi diharapkan dapat mendukung terselenggaranya proses demokrasi yang jujur, adil, dan bermartabat, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan dan proses pengambilan kebijakan publik.

Dalam konteks tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat, sasaran ini difokuskan pada pembinaan politik dalam negeri, fasilitasi pendidikan politik masyarakat, penguatan peran partai politik, serta pencegahan potensi konflik dan gangguan stabilitas politik. Upaya tersebut dilaksanakan melalui koordinasi dengan penyelenggara pemilu, pemerintah kabupaten/kota, partai politik, organisasi kemasyarakatan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Peningkatan kualitas demokrasi juga tercermin dari membaiknya indikator-indikator demokrasi, seperti meningkatnya partisipasi politik masyarakat, menurunnya potensi konflik



politik, serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menyalurkan aspirasi secara damai dan konstitusional. Dengan demikian, sasaran ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya iklim demokrasi yang kondusif, stabilitas politik daerah yang terjaga, serta mendukung kelancaran pembangunan di Provinsi Sumatera Barat.

Sasaran meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat diukur menggunakan indikator kinerja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Sumatera Barat. IDI merupakan indikator komposit yang digunakan untuk mengukur kualitas demokrasi di Indonesia pada tingkat nasional dan daerah, yang mencakup tiga dimensi utama, yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik, dan kelembagaan demokrasi. Ketiga dimensi tersebut menggambarkan tingkat partisipasi politik masyarakat, perlindungan hak-hak warga negara, serta berfungsinya lembaga-lembaga demokrasi.

Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Sumatera Barat menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di daerah yang tidak hanya dilihat dari kinerja pemerintah dan birokrasi, tetapi juga dari peran masyarakat, lembaga legislatif, partai politik, lembaga peradilan, serta aparat penegak hukum. Oleh karena itu, capaian IDI merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan dan tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

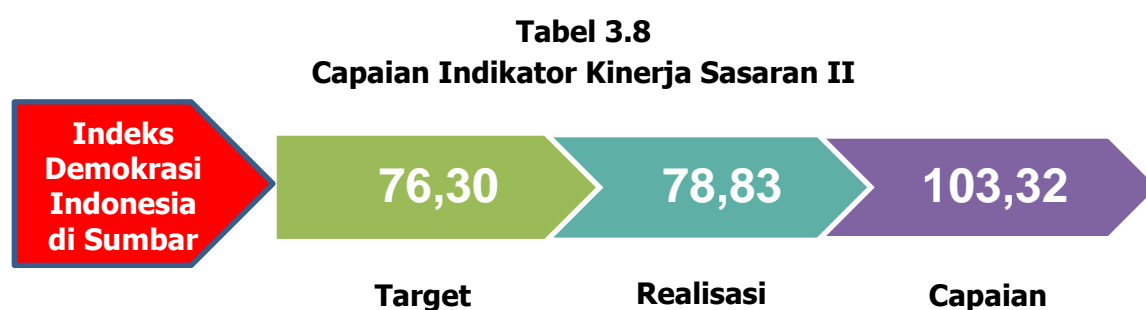
Pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sejak tahun 2009 bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Kementerian Dalam Negeri, sebagai upaya untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai perkembangan demokrasi politik di Indonesia.

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 69,25. Penetapan target tahun 2025 mengacu kepada Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Namun demikian, pada perjanjian kinerja tahun 2025 dilakukan penyesuaian target indikator kinerja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar menjadi 76,30 sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kerja Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat tahun 2025. Penyesuaian target tersebut dilakukan karena realisasi capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar tahun 2024 telah melebihi target tahun kelima (2025) yang ditetapkan dalam Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026.



**Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025.** Sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, sasaran meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat dengan indikator kinerja Indeks Demokrasi Indonesia di Sumbar tahun 2025 ditargetkan 76,30 dan terealisasi 78,83 dengan tingkat capaian 103,32% termasuk kategori keberhasilan **"sangat tinggi"**. Perhitungan capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumatera Barat menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*.

Capaian indikator kinerja Indeks Demokrasi Indonesia di Sumatera Barat tahun 2025 disajikan pada tabel berikut :



Realisasi Indeks Demokrasi Indonesia di Sumbar 78,83 merupakan realisasi Indeks Demokrasi Indonesia di Sumbar tahun 2024 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik. Penggunaan realisasi tahun 2024 dikarenakan sampai laporan ini disusun, Badan Pusat Statistik masih belum merilis nilai Indeks Demokrasi Indonesia se-Indonesia tahun 2025.

Data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dikumpulkan dengan dua metode pendekatan yaitu pendekatan kuantitatif (reviu surat kabar dan dokumen) dan kualitatif (FGD). Data yang dikumpulkan dalam IDI adalah kumpulan kejadian/fakta lapangan. Pengumpulan data IDI dilakukan di 34 Provinsi di Indonesia dan level pusat. Seluruh kejadian yang dikumpulkan harus terjadi di wilayah masing-masing. Terdapat 3 (tiga) aspek penyusunan IDI yaitu Kebebasan (7 indikator), Kesetaraan (7 indikator), dan Kapasitas Lembaga Demokrasi (8 indikator).

Formulasi perhitungan Indeks Demokrasi Indonesia :

$$IDI = \sum_{I=3}^3 P_i I$$



Pi = Nilai Penimbang berdasarkan AHP (*Analytical Hierarchy Process*) dari aspek ke i (i = 1,2,3)

I (Ai) = Indeks aspek ke -i

(i =1) = Aspek kebebasan sipil

(i=2) = Hak-hak politik

(i=3) = Lembaga demokrasi

Rincian perhitungan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.9

**Tabel 3.9**  
**Perhitungan Indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)**  
**di Sumatera Barat tahun 2025**

No	Aspek/Indikator	Nilai
<b>1.</b>	<b>Aspek Kebebasan</b>	<b>75,38</b>
	a. Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi dan berpendapat oleh aparat negara	80,98
	b. Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat antar masyarakat	100,00
	c. Terjaminnya kebebasan berkeyakinan	92,07
	d. Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berkespresi, berpendapat dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan	50,00
	e. Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam Pemilu	73,68
	f. Pemenuan hak-hak pekerja	62,47
	g. Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya	66,61
<b>2.</b>	<b>Aspek Kesenjangan</b>	<b>83,92</b>
	a. Kesenjangan gender	92,92
	b. Partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan	100
	c. Anti monopoli sumber daya ekonomi	69,33
	d. Akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial	84,03
	e. Kesenjangan kesempatan kerja antar wilayah	94,25
	f. Akses masyarakat terhadap informasi publik	79,30
	g. Kesenjangan dalam pelayanan dasar	75,82
<b>3.</b>	<b>Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi</b>	<b>76,14</b>
	a. Kinerja lembaga legislatif	36,84
	b. Kinerja lembaga yudikatif	89,06
	c. Netralitas penyelenggara Pemilu	75,00
	d. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah	90,00
	e. Jaminan pemerintah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat	74,76
	f. Transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN/D oleh pemerintah	100,00
	g. Kinerja birokrasi dalam pelayanan publik	72,80
	h. Pendidikan politik pada kader partai politik	62,22

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

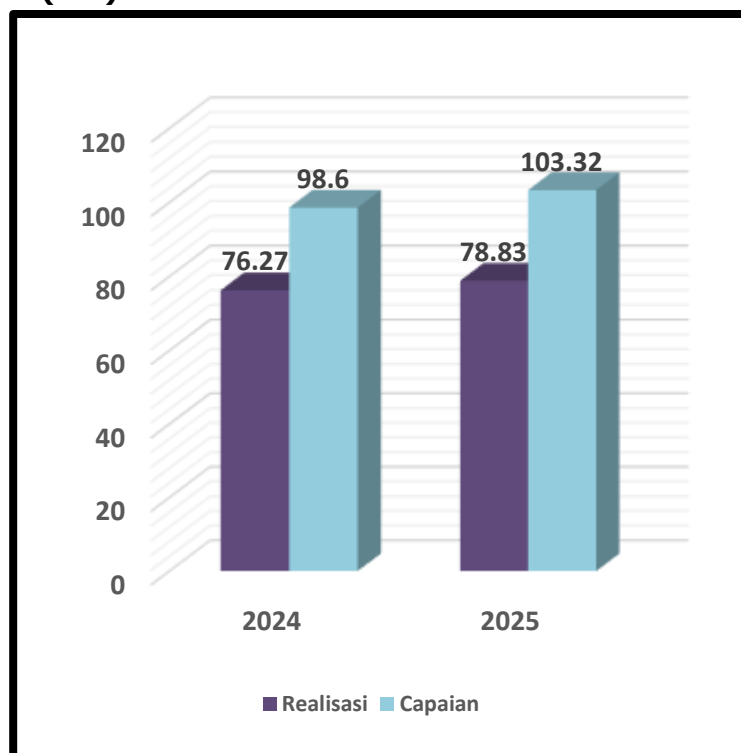


Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat berperan dalam meningkatkan nilai Indeks Demokrasi Indonesia di Sumatera Barat khususnya pada aspek kebebasan dan kapasitas lembaga demokrasi. Salah satu indikator yang membutuhkan peran dari Kesbangpol untuk peningkatan nilai tersebut diantaranya Indikator terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam Pemilu, netralitas penyelenggara pemilu serta pendidikan politik pada kader partai politik.

**Perbandingan dengan Realisasi Tahun Sebelumnya.** Indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 2,56 poin dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, yaitu dari 76,27 pada tahun 2024 menjadi 78,83 pada tahun 2025. Sejalan dengan hal tersebut, capaian kinerja indikator Indeks Demokrasi Indonesia juga menunjukkan peningkatan, dari 98,60 persen pada tahun 2024 menjadi 103,32 persen pada tahun 2025.

Perbandingan realisasi dan capaian indikator Indeks Demokrasi Indonesia di Sumbar tahun 2024-2025 disajikan pada grafik berikut :

**Grafik 3.7**  
**Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumatera Barat Tahun 2024-2025**



*Sumber : Data Diolah*

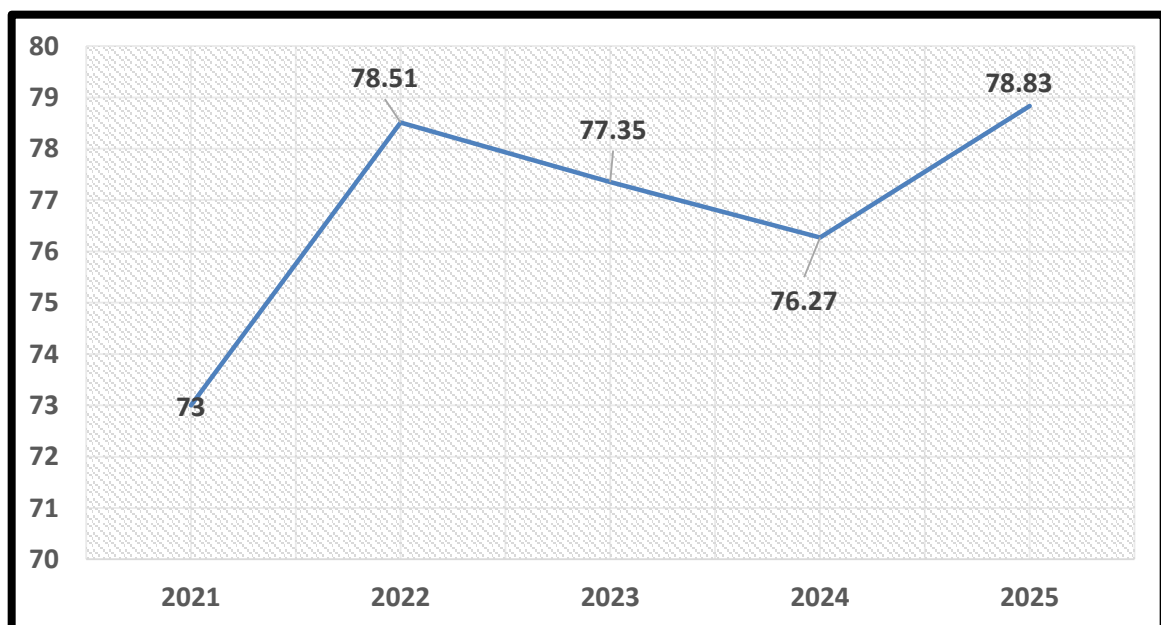


Peningkatan nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya dipengaruhi oleh perbaikan pada seluruh aspek pengukuran. Dari sisi aspek, aspek kebebasan mengalami peningkatan sebesar 3,23 poin, dari 72,15 pada tahun 2024 menjadi 75,38 pada tahun 2025. Aspek kesetaraan meningkat 2,44 poin, dari 81,48 menjadi 83,92 sedangkan aspek kapasitas lembaga demokrasi mengalami kenaikan sebesar 2,05 poin, dari 74,09 pada tahun 2024 menjadi 76,14 pada tahun 2025. Dari sisi indikator, dari total 22 indikator yang digunakan dalam pengukuran IDI, terdapat 12 indikator yang mengalami peningkatan, 2 indikator dengan nilai yang relatif sama dibandingkan tahun sebelumnya, serta 8 indikator yang mengalami penurunan.

Gambaran Indeks Demokrasi Indonesia di Sumatera Barat dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir (2021 s/d 2025), menunjukkan nilai yang berfluktuatif. Pada tahun 2021 nilai IDI di Sumbar 73 dan 78,51 di tahun 2022. Penurunan nilai IDI di Sumbar terjadi pada tahun 2023 dan 2024 yaitu menjadi 77,35 di tahun 2023 dan 76,27 di tahun 2024, kemudian naik menjadi 78,83 di tahun 2025

Perkembangan nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumatera Barat tahun 2021-2025 disajikan pada grafik berikut :

**Grafik 3.8**  
**Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumatera Barat**  
**Tahun 2021-2025**

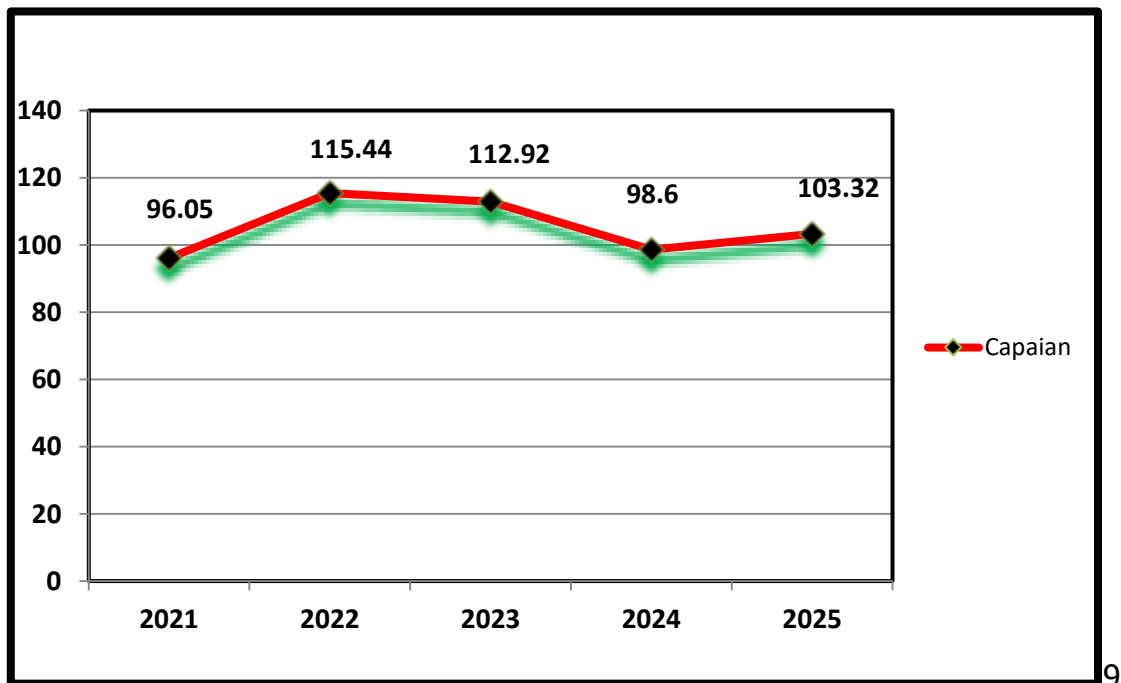


*Sumber Data : Badan Pusat Statistik*



Jika dibandingkan capaian dalam kurun waktu lima tahun, perkembangan capaian Indikator Kinerja Indeks Demokrasi Indonesia di Sumatera Barat Tahun 2021–2025 disajikan pada grafik berikut :

**Grafik 3.9**  
**Capaian Indikator Kinerja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumatera Barat**  
**Tahun 2021-2025**



*Sumber Data : Data Diolah*

**Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Dokumen RPJDM dan Dokumen Renstra.** Sesuai dengan Rencana Strategis Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, bahwa sasaran meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat dengan indikator kinerja Indeks Demokrasi Indonesia di Sumatera Barat adalah mendukung tercapainya sasaran Kepala Daerah Meningkatnya Ketahanan Sosial Budaya Berlandaskan ABS SBK dengan indikator kinerja Indeks Ketahanan Sosial Budaya (Dimensi IPK BPS). Secara lengkap gambaran pengukuran capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat dibandingkan dengan target Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat dan target RPJMD Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :



**Tabel 3.10**  
**Perbandingan capaian Indeks Demokrasi Indonesia di Sumatera Barat Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD/Renstra Tahun 2021-2026**

Sasaran	Indikator Kinerja	TAHUN 2025		%	Target Akhir RPJMD/Renstra	Capaian s.d Tahun 2025 Terhadap Target Akhir RPJMD/Renstra (%)
		Target	Realisasi			
Meningkatnya Kualitas Demokrasi di Sumatera Barat	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumatera Barat	69,25	78,83	113,83	70	112,14

Sumber : Hasil analisis capaian kinerja Badan Kesbangpol Prov Sumbar Tahun 2025

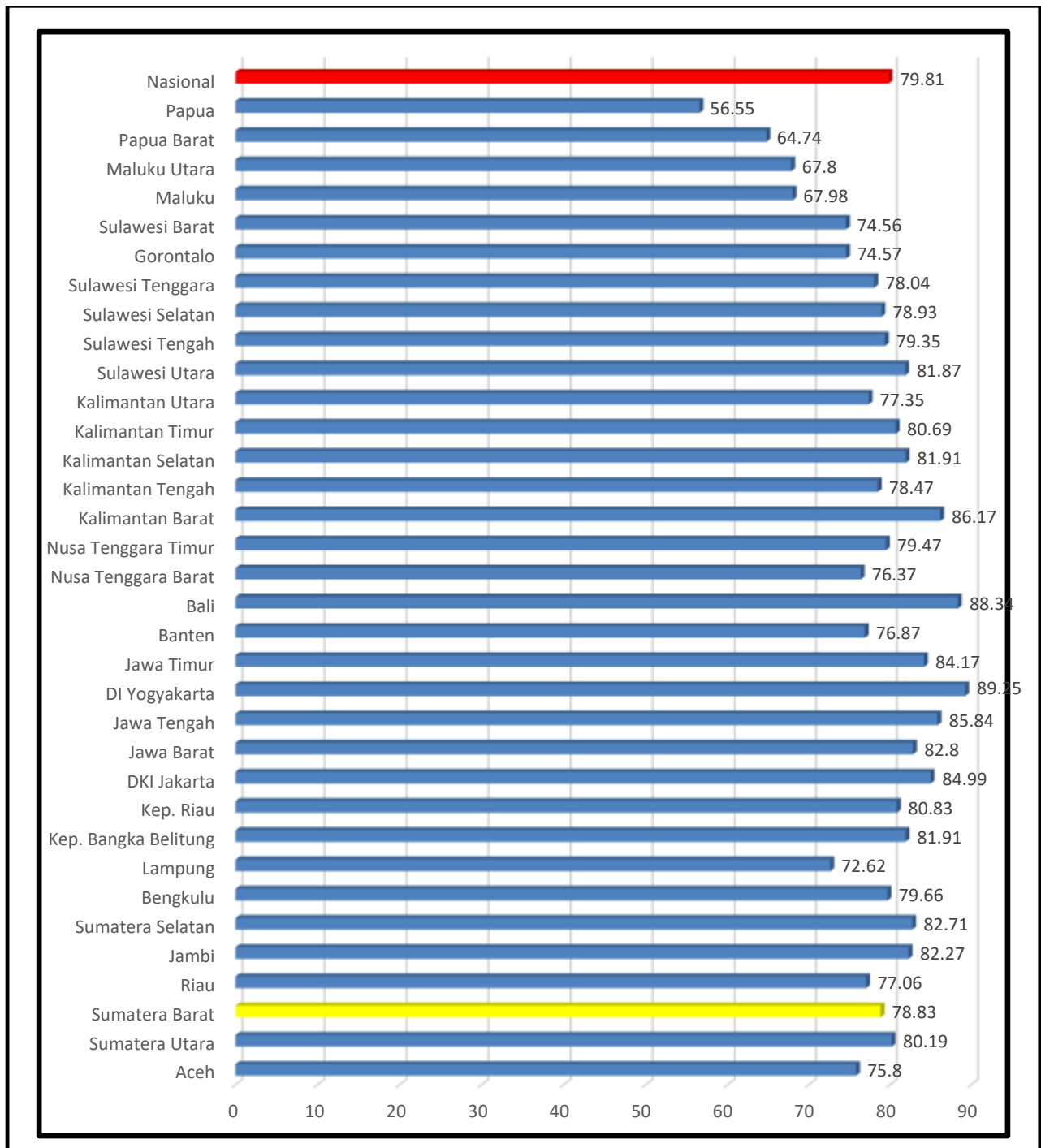
Capaian Indeks Demokrasi Indonesia di Sumatera Barat tahun 2025 telah melebihi target akhir pada Renstra/RPJMD dengan capaian sebesar 112,14%. Hal ini berarti bahwa kualitas penyelenggaraan demokrasi di daerah menunjukkan kinerja yang lebih baik dari target yang telah ditetapkan, baik dari aspek kebebasan sipil, hak-hak politik, maupun kelembagaan demokrasi. Capaian tersebut mencerminkan efektivitas peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat bersama pemangku kepentingan terkait dalam memperkuat pemahaman demokrasi, meningkatkan partisipasi politik masyarakat, serta menjaga stabilitas politik daerah yang kondusif.

**Perbandingan Realisasi dengan Standar Nasional.** Secara nasional, tidak ditetapkan satu angka standar atau target minimal tertentu yang wajib dicapai oleh seluruh provinsi atau kabupaten/kota dalam pencapaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI digunakan sebagai instrumen pengukuran dan pemantauan perkembangan kualitas demokrasi di setiap daerah, bukan sebagai standar kelulusan atau batas minimal kinerja. Meskipun demikian, IDI memiliki standar nasional dalam hal metodologi dan klasifikasi penilaian, yang ditetapkan dan digunakan secara seragam oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bersama kementerian/lembaga terkait. Nilai IDI diklasifikasikan ke dalam kategori Baik: nilai IDI > 80, Sedang: nilai IDI 60–80, Buruk: nilai IDI < 60. Klasifikasi ini digunakan sebagai acuan nasional untuk menilai posisi dan kecenderungan kualitas demokrasi suatu daerah secara komparatif antarwaktu dan antardaerah.



Perbandingan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumatera Barat pada tahun 2025 se-Indonesia disajikan pada grafik berikut :

**Grafik 3.10**  
**Perbandingan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumatera Barat dengan Provinsi se-Indonesia Tahun 2025**



Sumber Data : Badan Pusat Statistik



Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 berdasarkan penilaian Badan Pusat Statistik (BPS) berada pada peringkat ke-20 dari 34 provinsi di Indonesia. Pada tahun yang sama, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menempati peringkat pertama dengan nilai IDI sebesar 89,25, sementara nilai IDI nasional tercatat sebesar 79,81. Jika dibandingkan dengan capaian nasional, nilai Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Sumatera Barat masih berada 0,98 poin di bawah rata-rata nasional, sehingga diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas demokrasi daerah melalui penguatan kelembagaan, partisipasi masyarakat, serta penegakan prinsip-prinsip demokrasi di daerah. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan.** Untuk meningkatkan pencapaian indikator kinerja sasaran meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat, terdapat beberapa faktor yang mendorong keberhasilan tercapainya realisasi sesuai dengan target yang ditetapkan melalui upaya-upaya yang telah dilakukan selama tahun 2025 diantaranya :

1. Menjalin koordinasi yang baik dengan penyelenggara pemilu, aparat keamanan, OPD terkait, serta pemangku kepentingan lainnya dalam menjaga stabilitas politik dan iklim demokrasi yang kondusif.
2. Melaksanakan pendidikan politik masyarakat yang berkelanjutan guna meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban politik, partisipasi politik yang sehat, serta etika berdemokrasi.
3. Melakukan pemantauan perkembangan situasi politik dan potensi kerawanan demokrasi secara berkala terhadap, sehingga langkah antisipatif dapat dilakukan secara cepat dan tepat.
4. Memfasilitasi forum dialog politik, komunikasi antar unsur masyarakat, serta penyelesaian perbedaan pandangan secara persuasif dan demokratis untuk mencegah eskalasi konflik politik.
5. Menyelenggarakan *Forum Group Discussion* (FGD) Indeks Demokrasi Indonesia guna melengkapi, mengkonfirmasi dan memperoleh data/informasi terkait indikator-indikator yang menjadi penilaian IDI di Sumatera Barat.

Di samping upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mencapai keberhasilan kinerja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar selama tahun 2025, juga terdapat beberapa **faktor yang menghambat** tercapainya sasaran kinerja ini diantaranya :



1. Keterbatasan data dan informasi pendukung IDI. Proses pengumpulan dan pemutakhiran data yang menjadi dasar penghitungan IDI masih memerlukan peningkatan koordinasi antarinstansi, sehingga dapat memengaruhi ketepatan dan kelengkapan penilaian indikator.
2. Keterbatasan peran dan kapasitas kelembagaan demokrasi di daerah. Kapasitas sebagian kelembagaan pendukung demokrasi, termasuk forum-forum komunikasi politik dan organisasi masyarakat, belum sepenuhnya optimal dalam mendorong partisipasi publik dan penguatan nilai-nilai demokrasi.
3. Keterbatasan sumber daya pelaksanaan program pembinaan demokrasi. Keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dan jangkauan kegiatan pembinaan politik masyarakat menjadi kendala dalam memperluas dampak program secara merata di seluruh wilayah.
4. Belum optimalnya partisipasi politik masyarakat secara merata. Tingkat partisipasi dan pemahaman politik masyarakat di beberapa wilayah masih relatif rendah, sehingga belum sepenuhnya mendukung peningkatan kualitas demokrasi, khususnya pada aspek hak-hak politik.
5. Masih adanya dinamika politik yang berpotensi menimbulkan polarisasi. Perbedaan kepentingan dan pandangan politik dalam masyarakat, terutama pada momentum politik tertentu, berpotensi menimbulkan gesekan sosial yang dapat memengaruhi stabilitas demokrasi daerah.

Dalam mengurangi dampak resiko tidak optimalnya capaian kinerja di tahun 2025, maka Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat melakukan berbagai upaya sebagai alternative solusi diantaranya :

1. Memperkuat mekanisme pengumpulan, validasi, dan pemutakhiran data IDI melalui peningkatan koordinasi dengan BPS dan instansi terkait agar penilaian indikator lebih akurat dan komprehensif.
2. Meningkatkan koordinasi antara Kesbangpol, OPD terkait, penyelenggara pemilu, aparat keamanan, dan unsur masyarakat sipil dalam mendukung pemenuhan indikator IDI serta menjaga iklim demokrasi yang kondusif.
3. Meningkatkan kapasitas aparatur dan kelembagaan pendukung demokrasi melalui pelatihan, bimbingan teknis, serta peningkatan kompetensi dalam pembinaan politik dan demokrasi.
4. Melakukan penguatan program pendidikan politik yang lebih terstruktur, berkelanjutan, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk generasi muda dan kelompok rentan, guna meningkatkan partisipasi politik yang sadar dan bertanggung jawab.
5. Memperkuat fasilitasi forum komunikasi dan dialog politik yang inklusif sebagai ruang



penyampaian aspirasi masyarakat, guna mencegah polarisasi dan meredam potensi konflik politik.

**Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.** Dalam rangka pencapaian keberhasilan sasaran meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat dengan indikator kinerja Indeks Demokrasi Indonesia di Sumatera Barat dengan target 76,30 pada tahun 2025 yang tercapai sebesar 78,83 dengan tingkat capaian sebesar 103,32 %, telah disediakan anggaran melalui APBD/P Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 6.295.325.792,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.118.894.200,- atau 97,19 %. Anggaran ini tersebar pada 2 (dua) program, 2 kegiatan dan 2 Sub Kegiatan. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung sasaran II dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.11**  
**Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran II**

<b>Sasaran/Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>
<b>Meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat</b>	<b>2</b>	<b>6.295.325.792</b>	<b>6.118.894.200</b>
<b>PROGRAM PENINGKATAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	<b>1</b>	<b>5.731.475.792</b>	<b>5.573.794.200</b>
<b>Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>		<b>5.731.475.792</b>	<b>5.573.794.200</b>
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan		5.731.475.792	5.573.794.200



Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	<b>1</b>	<b>563.850.000</b>	<b>545.100.000</b>
<b>Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>		<b>563.850.000</b>	<b>545.100.000</b>
Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		563.850.000	545.100.000

Sesuai dengan perhitungan tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 214/PMK.02/2021, maka untuk perhitungan analisis efisiensi anggaran dalam pencapaian indikator kinerja meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(PA \times CK) - RA}{PA} \times 100\%$$

Keterangan :

PA = Pagu Anggaran = Rp.6.295.325.792

CK = Capaian Kinerja (%) = 103,32%

RA = Realisasi Anggaran Rp. 6.118.894.200

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(6.295.325.792 \times 103,32\%) - 6.118.894.200}{6.295.325.792} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{385.436.408,29}{6.295.325.792} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 0,06$$

Untuk mengetahui besaran nilai efisiensi, tingkat efisiensi kinerja dikonversi menjadi skala 0% - 100% dengan formula penghitungan sebagai berikut :

$$\text{Nilai Efisiensi} = ((50\% + (\text{Efisiensi Kinerja}/20)) \times 50)$$



$$\begin{aligned}
 &= ((50\%+(0,06/20))*50 \\
 &= (50\%+0,15) \\
 &= 65\%
 \end{aligned}$$

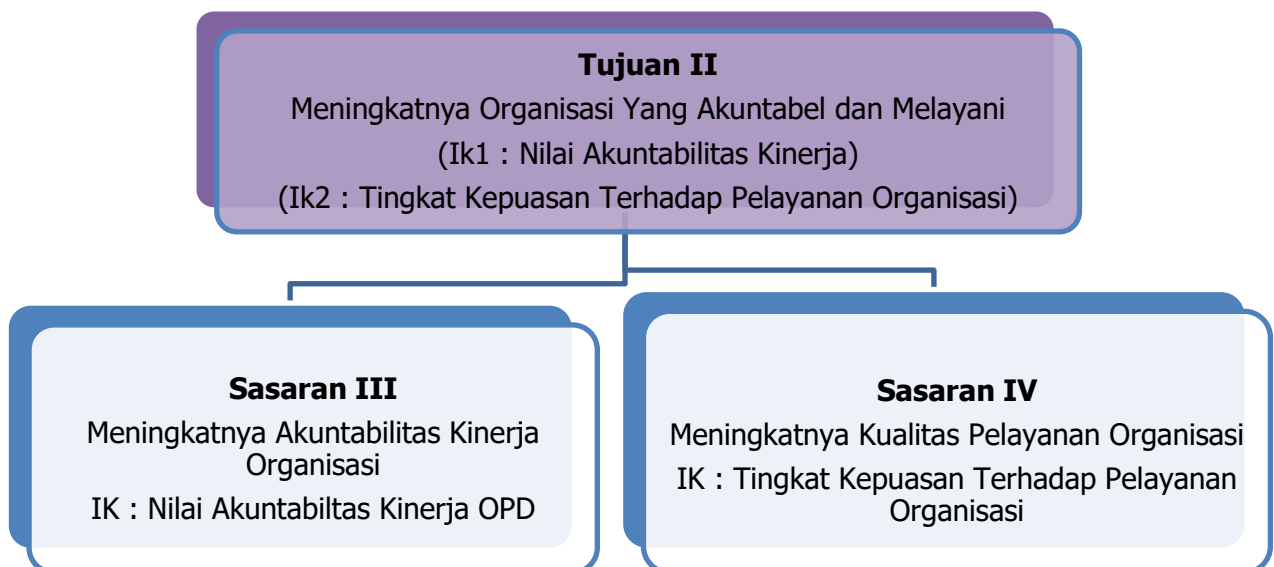
Berdasarkan hasil analisis tingkat efisiensi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan pengelolaan anggaran secara efisien dalam mendukung pencapaian indikator kinerja Indeks Demokrasi Indonesia di Sumatera Barat. Nilai efisiensi yang diperoleh sebesar 65 persen. Efisiensi tersebut terutama dicapai melalui penghematan belanja souvenir, perjalanan dinas, biaya sewa hotel dan makan dan minum rapat.

### 3.3.2 Tujuan II : Meningkatnya Organisasi Yang Akuntabel dan Melayani

Tujuan Meningkatnya Organisasi Yang Akuntabel dan Melayani didukung melalui 2 (dua) sasaran strategis. Sasaran strategis I yaitu **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi** dan sasaran II yaitu **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi**. Tujuan dan sasaran strategis sebagaimana uraian di atas dapat dilihat pada gambar berikut :

**Gambar 3.2**

#### **Tujuan II serta Sasaran Strategis III dan Sasaran Strategis IV**



Tujuan ke-2 Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 ialah Meningkatnya Organisasi Yang Akuntabel dan Melayani dengan indikator kinerja tujuan yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi.



Pencapaian tujuan ini dapat dilihat dari realisasi indikator kinerja tahun 2025 sebagai berikut :

**Tabel 3.12**  
**Realisasi Indikator Kinerja Tujuan 2**

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Tahun 2025			Target Akhir Renstra	Capaian s.d Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	Meningkatnya Organisasi Yang Akuntabel dan Melayani	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	81,15	82,05	101,11	75,64	108,47
		Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	93	93	100	88	105,68
Rata-rata Capaian Tujuan 2					100,56		

Dilihat dari realisasi indikator kinerja tujuan diatas dapat diketahui bahwa pencapaian tujuan kedua telah dicapai dengan baik, dengan rata-rata capaian kinerja tujuan sebesar 100,56%. Jika dilihat pada target akhir Renstra, realisasi tujuan ini telah melebihi target Renstra/RPJMD, dimana capaian tahun 2025 terhadap target akhir Renstra untuk masing-masing indikator tujuan telah lebih dari 100%. Walaupun telah melebihi target akhir Rentsra/RPJMD, Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat terus meningkatkan kinerja organisasi dalam mewujudkan tercapainya Reformasi Birokrasi yang berdampak terutama di lingkungan Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat. Ketercapaian target kinerja tujuan kedua ini direalisasikan dengan 2 sasaran strategis yaitu 1) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dan; 2) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Organisasi. Berikut analisis capaian sasaran kinerja pada Tahun 2025



### III. Sasaran Strategis III "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi"

## SASARAN STRATEGIS III



Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, pelaksanaan akuntabilitas kinerja diharuskan bagi setiap instansi pemerintah. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dituangkan dalam laporan kinerja sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara revidi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Laporan kinerja tersebut selanjutnya dievaluasi oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas kinerja organisasi merupakan tahapan yang dilakukan untuk mewujudkan reformasi birokrasi di setiap organisasi pemerintah dan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja



Instansi Pemerintah. Berdasarkan hal tersebut meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi ditetapkan sebagai sasaran ketiga yang harus dicapai oleh Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat untuk mencapai tujuan “Meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani”

Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi ini ditetapkan indikator kinerja nilai akuntabilitas kinerja OPD yang dibangun melalui peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat. Harapannya OPD mampu fokus pada peningkatan akuntabilitas sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome).

Penetapan target indikator kinerja nilai akuntabilitas kinerja OPD tahun 2025 pada awalnya mengacu kepada Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu sebesar 75,14. Namun, pada perjanjian kinerja tahun 2025 dilakukan penyesuaian target indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD menjadi 81,15 dengan mengacu pada Renja Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 disebabkan realisasi indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD tahun 2024 telah melebihi target tahun kelima (2025) Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026.

**Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025.** Pada Perjanjian Kinerja Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD ditargetkan sebesar 81,15 dan terealisasi sebesar 82,05 dengan capaian 101,11% termasuk kategori keberhasilan “**sangat tinggi**”. Pencapaian sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.13**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran III**



Realisasi nilai akuntabilitas kinerja OPD sebesar 82,05 diperoleh berdasarkan laporan hasil evaluasi atas SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Nomor : 700/112/LHE/INSP/2025 tanggal 24 Juli 2025.

Adapun hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2025 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.14**  
**Hasil evaluasi SAKIP Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat**  
**Tahun 2025**

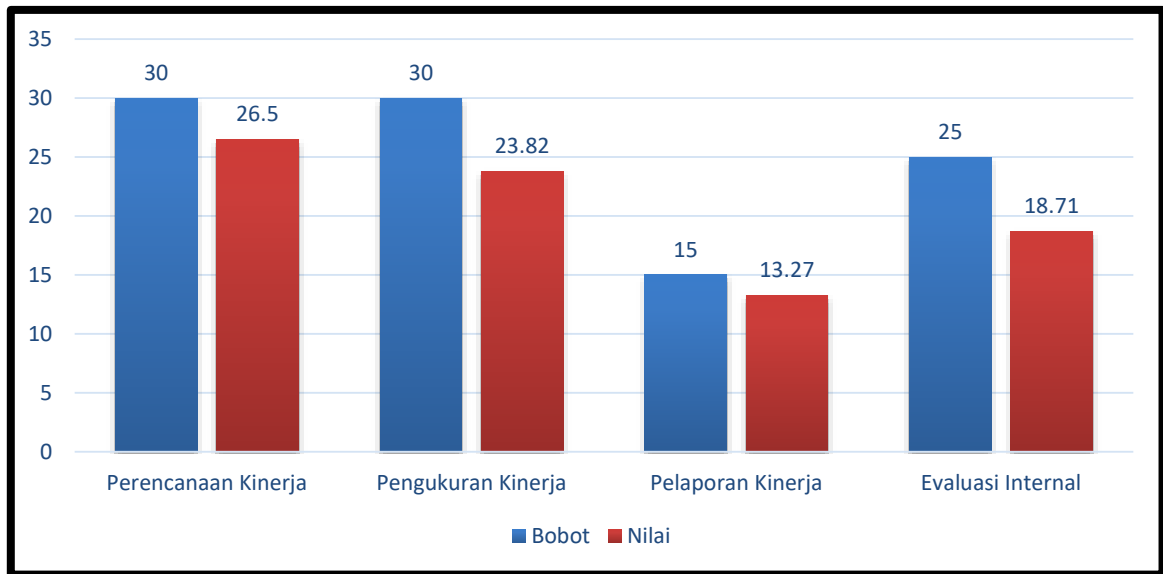
No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2025
1.	Perencanaan Kinerja	30	26,25
2.	Pengukuran Kinerja	30	23,82
3.	Pelaporan Kinerja	15	13,27
4.	Evaluasi Internal	25	18,71
	Jumlah Hasil Evaluasi Kinerja	100	82,05
	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP		A
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Kategori)</b>		<b>Memuaskan</b>

*Sumber Data : Inspektorat Provinsi Sumatera Barat*

Nilai Akuntabilitas Kinerja diukur dengan formula penghitungan penjumlahan terhadap 4 (empat) komponen dasar manajemen kinerja yaitu Nilai Perencanaan Kinerja + Pengukuran Kinerja + Pelaporan Kinerja + Evaluasi Internal. Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP oleh Inpektorat Provinsi Sumatera Barat terhadap 4 (empat) komponen tersebut, Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat memperoleh nilai tertinggi pada komponen Pelaporan Kinerja dengan nilai 13,17% dari bobot 15% dan komponen terendah adalah Evaluasi Internal dengan nilai 18,71% dari bobot 25%. Berikut rincian komponen nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat Tahun Penilaian 2025 :



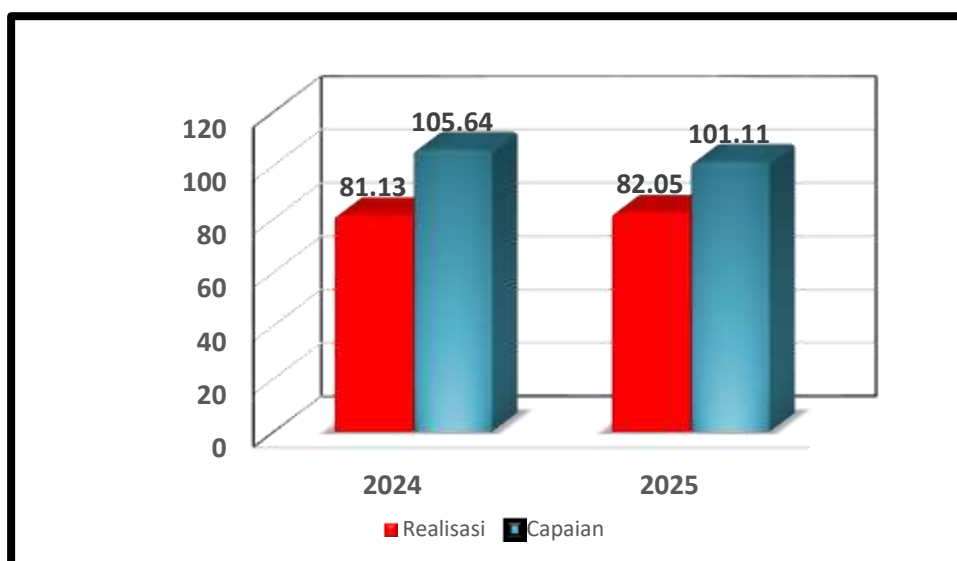
**Grafik 3.11 Capaian Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat Per Komponen Tahun 2025**



Sumber : Hasil LHE Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

**Perbandingan dengan Realisasi Tahun Sebelumnya.** Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, capaian tahun ini meningkat dari nilai 81,13 menjadi 82,05 atau meningkat 0,92 point. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2024-2025 dapat dilihat grafik berikut :

**Grafik 3.12 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD Tahun 2024-2025**

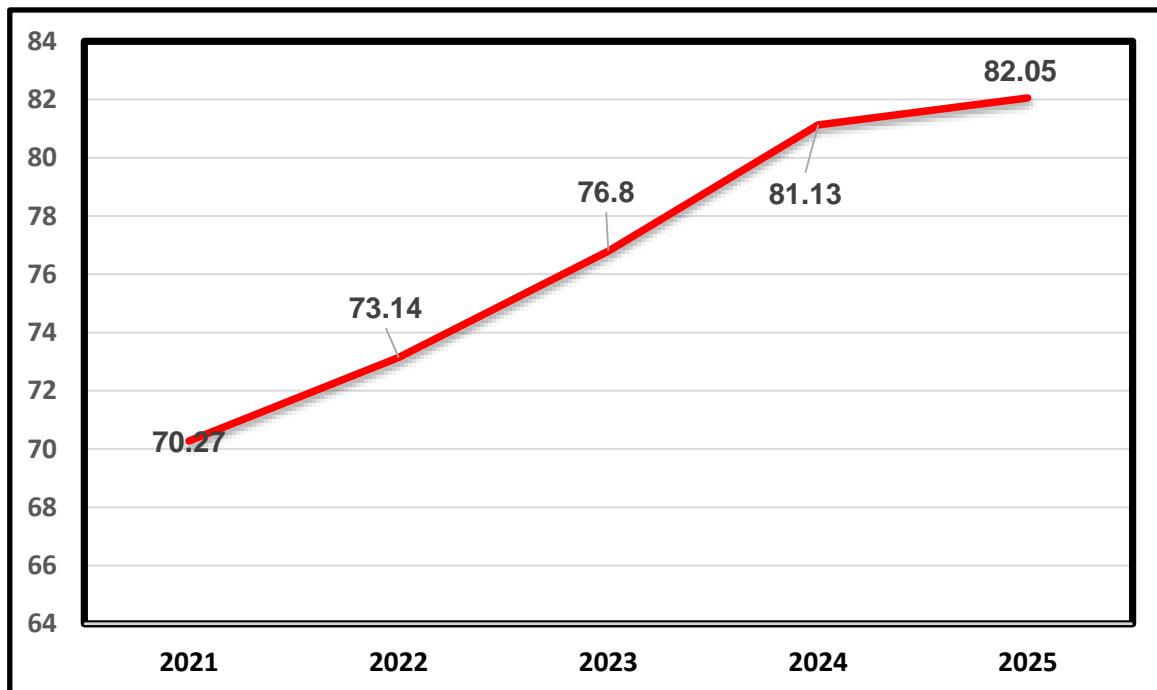


Sumber Data : Data diolah



Perkembangan nilai akuntabilitas kinerja pada Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 dapat dilihat pada grafik berikut :

**Grafik 3.13**  
**Perkembangan Nilai Akuntabilitas Kinerja**  
**Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2025**



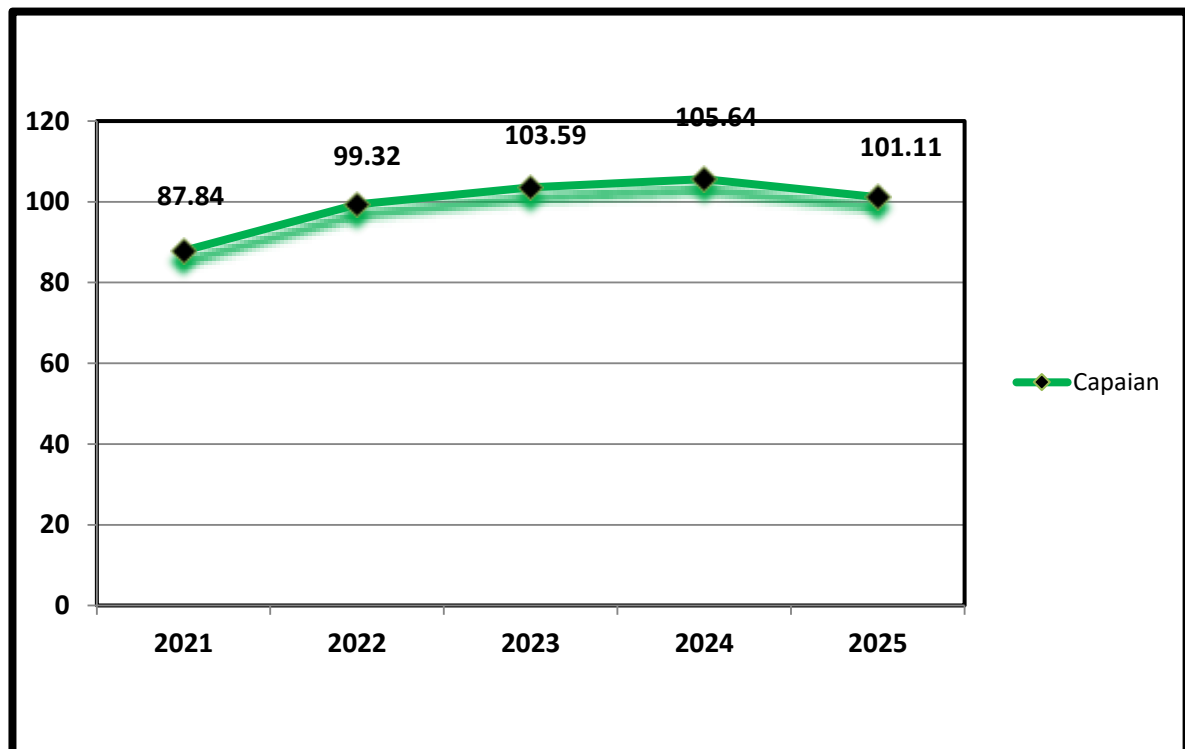
Sumber Data : Inspektorat Provinsi Sumatera Barat

Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, yaitu tahun 2021 sampai dengan 2025, menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Nilai Akuntabilitas Kinerja tercatat sebesar 70,27 pada tahun 2021, meningkat menjadi 73,14 pada tahun 2022, kembali meningkat menjadi 76,80 pada tahun 2023, kemudian mencapai 81,13 pada tahun 2024, dan meningkat lagi menjadi 82,05 pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat semakin efektif dan konsisten. Peningkatan nilai tersebut mencerminkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta pelaksanaan evaluasi dan tindak lanjut atas hasil kinerja, sehingga mendorong terwujudnya tata kelola organisasi yang semakin akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil.



Dari capaiannya, perbandingan capaian Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dengan beberapa tahun terakhir dapat disajikan pada grafik berikut :

**Grafik 3.14**  
**Capaian Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja**  
**Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2025**



Sumber Data : Data Diolah

**Perbandingan Realisasi dengan Dokumen Renstra.** Sesuai dengan Rencana Strategis Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang berpedoman kepada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi melalui indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD, capaiannya sampai dengan tahun 2025 telah melebihi target akhir yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Secara lengkap gambaran pengukuran capaian kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi dibandingkan dengan target Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :



**Tabel 3.15**  
**Perbandingan capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD/Renstra Tahun 2021-2026**

Sasaran	Indikator Kinerja	TAHUN 2025		%	Target Akhir RPJMD/Renstra	Capaian s.d Tahun 2025 Terhadap Target Akhir RPJMD/Renstra (%)
		Target	Realisasi			
Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai akuntabilitas kinerja OPD	81,15	82,05	101,11	75,64	108,47

Sumber : Hasil analisis capaian kinerja Badan Kesbangpol Prov Sumbar Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian sasaran meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD telah melebihi target Renstra/RPJMD, dimana target akhir pada Renstra adalah sebesar 75,64, sedangkan capaian sampai tahun 2025 sebesar 82,05. Hal ini berarti, bahwa seluruh ASN Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat telah menunjukkan komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja dalam mewujudkan terlaksananya Akuntabilitas Kinerja dilingkungan Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat.

**Perbandingan Realisasi dengan Standar Nasional.** Jika dibandingkan dengan standar nasional, nilai akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025 berada pada kategori A (>80-90). Dengan kata lain, nilai akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat berdasarkan standar nasional dikategorikan memuaskan artinya memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel.

Standar nasional penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negeri dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana penilaian terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terbagi atas 7 kategori yaitu AA (>90-100), A (>80-90), BB (>70-80), B (>60-70), CC (>50-60), C (>30-50), dan D (>0-30) sebagaimana disajikan pada tabel 3.12 berikut :



**Tabel 3.16**  
**Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**  
**berdasarkan Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015**

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90-100	<b>Sangat Memuaskan</b>
2	A	>80-90	<b>Memuaskan</b> , Memimpin perubahan, berkinerjatinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	>70-80	<b>Sangat Baik</b> , tinti
4	B	>60-70	<b>Baik</b> , Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki system yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan
5	CC	>50-60	<b>Cukup (Memadai)</b> , Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6	C	>30-50	<b>Kurang</b> , Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikanyang mendasar
7	D	>0-30	<b>Sangat Kurang</b> , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

**Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan.** Dalam upaya pencapaian indikator kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi, terdapat beberapa faktor yang mendorong keberhasilan tercapainya realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada tahun 2025, diantaranya :

1. Ketersediaan dokumen perencanaan kinerja yang lengkap dan selaras mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perencanaan Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja, dan Rencana Aksi yang terintegrasi dengan penganggaran
2. Komitmen pimpinan dalam mendorong penerapan SAKIP secara konsisten, termasuk penguatan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja.
3. Peningkatan kapasitas SDM pengelola kinerja, khususnya melalui pembinaan, bimbingan teknis dan pendampingan SAKIP secara berkelanjutan



4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala sehingga permasalahan dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti lebih cepat
5. Pemanfaatan hasil evaluasi SAKIP sebagai dasar perbaikan kinerja dan pengambilan keputusan manajerial.
6. Koordinasi dan sinergi antarbidang/unit kerja dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja.
7. Dukungan sistem informasi kinerja meliputi e-kinerja, e-madani, e-sakip, simbangda, dan dashboard pembangunan yang membantu proses pengukuran, pelaporan, dan dokumentasi kinerja secara lebih efektif dan efisien.

Disamping upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mencapai keberhasilan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja pada Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2025, juga terdapat beberapa **faktor yang menghambat** tercapainya sasaran kinerja ini, diantaranya:

1. Pemahaman terhadap konsep dan implementasi SAKIP yang belum merata di seluruh unit kerja, khususnya dalam penyusunan indikator kinerja yang berorientasi hasil (outcome).
2. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia pengelola kinerja, baik dari sisi kompetensi teknis maupun pengalaman dalam pengelolaan SAKIP.
3. Pemanfaatan data dan informasi kinerja yang belum maksimal sebagai dasar pengambilan keputusan dan perbaikan kinerja
4. Koordinasi dan komunikasi antarbidang/unit kerja yang belum optimal, terutama dalam penyusunan dan pelaporan kinerja.
5. Keterbatasan dukungan sistem informasi kinerja yang terintegrasi dan andal dalam mendukung proses pengukuran dan pelaporan kinerja.
6. Hasil pengukuran kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam pemberian reward dan punishment

Dalam mengurangi dampak resiko tidak optimalnya capaian kinerja di tahun 2025, maka Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat melakukan berbagai upaya sebagai alternative solusi diantaranya :

1. Meningkatkan komitmen semua pejabat dan aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov Sumbar dalam melaksanakan semua bagian akuntabilitas kinerja seperti: perencanaan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja
2. Mengintensifkan rapat internal di lingkungan SKPD untuk mengevaluasi capaian kinerja masing-masing individu serta mengantisipasi kendala atau gangguan yang dapat



- menghambat pencapaian kinerja masing-masing individu
3. Mengevaluasi keselarasan semua dokumen perencanaan sampai ke tingkat bawah.
  4. Melengkapi segala bentuk dokumen yang dibutuhkan dalam evaluasi SAKIP diantaranya rencana aksi beserta pencapaiannya setiap triwulan, perjanjian kinerja beserta target indikatornya sampai jenjang staf, dan dokumen lainnya.
  5. Mengupayakan adanya reward dan punishment bagi aparatur dalam pencapaian target kinerja sebagaimana yang tertuang pada Perjanjian Kinerja masing-masing pegawai.
  6. Melakukan update dan revisi terhadap dokumen-dokumen yang perlu dilakukan penyesuaian.

**Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.** Dalam rangka pencapaian sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi dengan indikator kinerja nilai akuntabilitas kinerja OPD dengan target 81,15 pada tahun 2025 yang tercapai sebesar 82,05 dengan tingkat capaian sebesar 101,11 %, telah disediakan anggaran melalui APBD/P Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 6.160.955.301 ,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.945.787.829,- atau 96,51%. Anggaran ini tersebar pada 1 (satu) program, 2 kegiatan dan 3 Sub Kegiatan. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung sasaran III dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.17**  
**Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran III**

Sasaran/Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi
<b>Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi</b>	<b>2</b>	<b>6.160.955.301</b>	<b>5.945.787.829</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>1</b>	<b>6.160.955.301</b>	<b>5.945.787.829</b>
<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>16.555.000</b>	<b>16.550.000</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		16.555.000	16.550.000
<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>6.144.400.301</b>	<b>5.929.237.829</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		5.921.190.301	5.721.957.829
Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD		223.210.000	207.280.000



Sesuai dengan perhitungan tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 214/PMK.02/2021, maka untuk perhitungan analisis efisiensi anggaran dalam pencapaian indikator kinerja meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi adalah sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(PA \times CK) - RA}{PA} \times 100\%$$

Keterangan :

PA = Pagu Anggaran = Rp.6.160.955.301

CK = Capaian Kinerja (%) = 101,11%

RA = Realisasi Anggaran Rp. 5.945.787.829

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(6.160.955.301 \times 101,11\%) - 5.945.787.829}{6.160.955.301} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{283.554.075,84}{6.160.955.301} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 0,046$$

Untuk mengetahui besaran nilai efisiensi, tingkat efisiensi kinerja dikonversi menjadi skala 0% - 100% dengan formula penghitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Nilai Efisiensi} &= ((50\% + (\text{Efisiensi Kinerja}/20)) \times 50) \\ &= ((50\% + (0,046/20)) \times 50) \\ &= (50\% + 0,115) \\ &= 61,5\% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil analisis tingkat efisiensi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan pengelolaan anggaran secara efisien dalam mendukung pencapaian indikator kinerja nilai akuntabilitas kinerja OPD. Nilai efisiensi yang diperoleh sebesar 61,5 persen. Efisiensi tersebut terutama dicapai melalui:

1. Penghematan belanja pada belanja gaji dan tunjangan dalam bentuk penyesuaian pembayaran tunjangan kinerja, tunjangan jabatan, atau tunjangan lainnya sesuai ketentuan dan tingkat kehadiran.
2. Penghematan belanja honorarium pejabat pengelola keuangan karena adanya optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi serta penerapan ketentuan standar biaya yang berlaku, sehingga realisasi anggaran lebih rendah dari yang direncanakan.



#### IV. Sasaran Strategis IV “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi”

### SASARAN STRATEGIS IV



Komponen standar pelayanan organisasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik bab I pasal 1 menjelaskan bahwa Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Hal tersebut mempertegas bahwa pelayanan publik menjadi tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat, baik pelayanan dalam bentuk administrasi publik, jasa publik, maupun barang publik.

Dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, harus memenuhi standar pelayanan yaitu tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Pelayanan publik yang diberikan harus berkualitas. Kualitas pelayanan publik dapat dilihat dari sejauh mana pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah dapat memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik itu sendiri. Kualitas layanan publik menjadi salah satu indikasi terselenggaranya pemerintah yang baik.

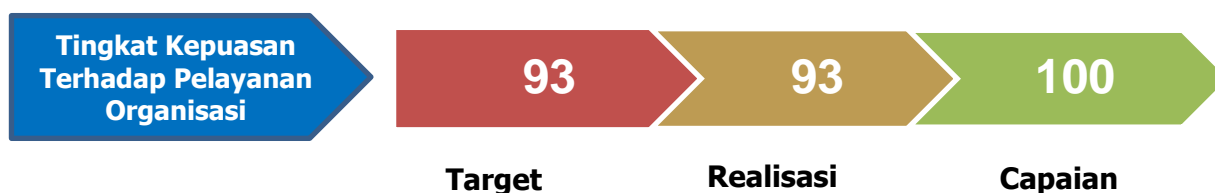
Berdasarkan hal tersebut, meningkatnya kualitas pelayanan organisasi ditetapkan sebagai sasaran keempat yang harus dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat untuk mencapai tujuan meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani. Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan organisasi diukur dengan menggunakan indikator kinerja “Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi”. Tingkat kepuasan terhadap pelayanan



organisasi menggambarkan sejauh mana pelayanan yang sudah kita berikan selama ini kepada masyarakat yang diukur dengan melihat rata-rata hasil survey kepuasan masyarakat (SKM) per responden dan per unsur pelayanan yang diberikan oleh Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025. Unsur pelayanan yang dinilai terdiri dari 9 unsur diantaranya persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan serta sarana dan prasarana.

**Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025.** Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi pada tahun 2025 ditargetkan 93. Penetapan target indikator Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi tahun 2025 berpedoman kepada Renstra Badan Kesbangpol Prov Sumbar tahun 2021-2026. Namun, pada pertengahan tahun 2025 dilakukan penyesuaian target indikator kinerja Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi menjadi 93 sebagaimana dituangkan dalam Renja Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 disebabkan realisasi indikator kinerja Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi tahun 2024 telah melebihi target tahun keempat (2024) Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026. Pencapaian sasaran meningkatnya kualitas pelayanan organisasi disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.18**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran IV**



Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi pada tahun 2025 ditargetkan 93 terealisasi 93 dengan tingkat capaian sebesar 100% termasuk kategori keberhasilan "**sangat tinggi**".

Realisasi tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi diukur berdasarkan rata-rata hasil survey kepuasan masyarakat (SKM) per responden dan per unsur pelayanan yang diberikan oleh Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025. Untuk tahun 2025, jumlah responden yang mengikuti survey sebanyak 202 orang. Hasil survey kepuasan masyarakat pada Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat disajikan pada tabel berikut :



**Tabel 3.19**  
**Hasil survey kepuasan masyarakat pada Badan Kesbangpol**  
**Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025**

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata
U1	Persyaratan	3,72
U2	Prosedur	3,72
U3	Waktu Pelayanan	3,69
U4	Biaya/tarif	3,86
U5	Produk Layanan	3,68
U6	Kompetensi Pelaksana	3,7
U7	Perilaku Pelaksana	3,76
U8	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	3,65
U9	Sarana dan Pra Sarana	3,91
	IKM	3,86
	Konfersi IKM	93
	Nilai Layanan	A=sangat baik

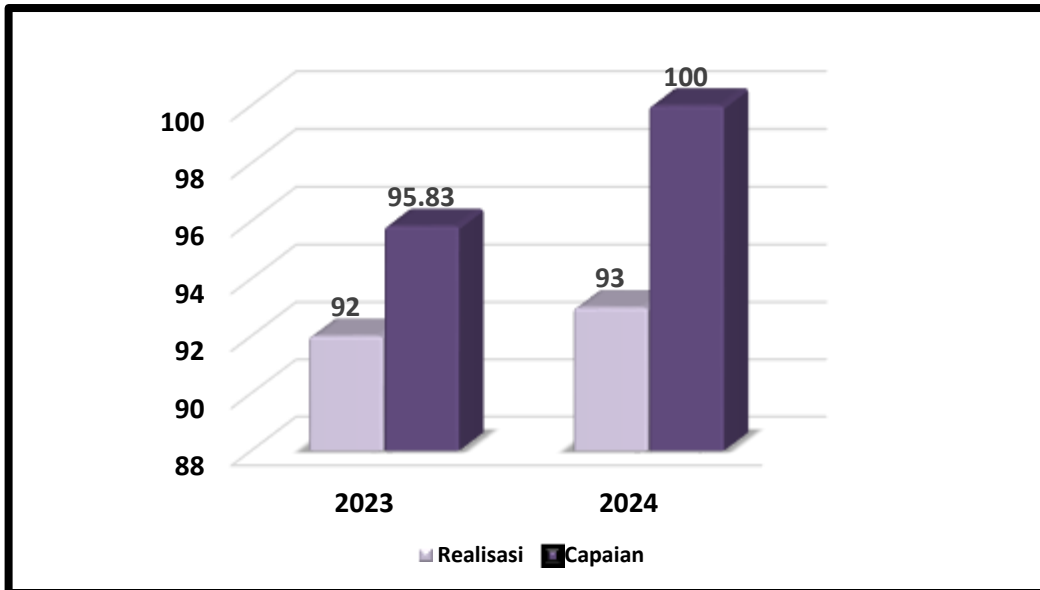
Sumber Data : [sepakat.sumbarprov.go.id](http://sepakat.sumbarprov.go.id)

Berdasarkan rata-rata nilai survei kepuasan masyarakat tersebut, predikat pelayanan publik pada Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 tergolong "Sangat Baik". Capaian Indikator Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi diukur dengan menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*. Capaian 100% merupakan capaian sangat baik.

**Perbandingan dengan Realisasi Tahun Sebelumnya.** Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, capaian tahun ini mengalami peningkatan dari nilai 92% pada tahun 2024 meningkat menjadi 93% pada tahun 2025. Perbandingan realisasi dan capaian indikator Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi tahun 2024-2025 dapat dilihat pada grafik berikut :



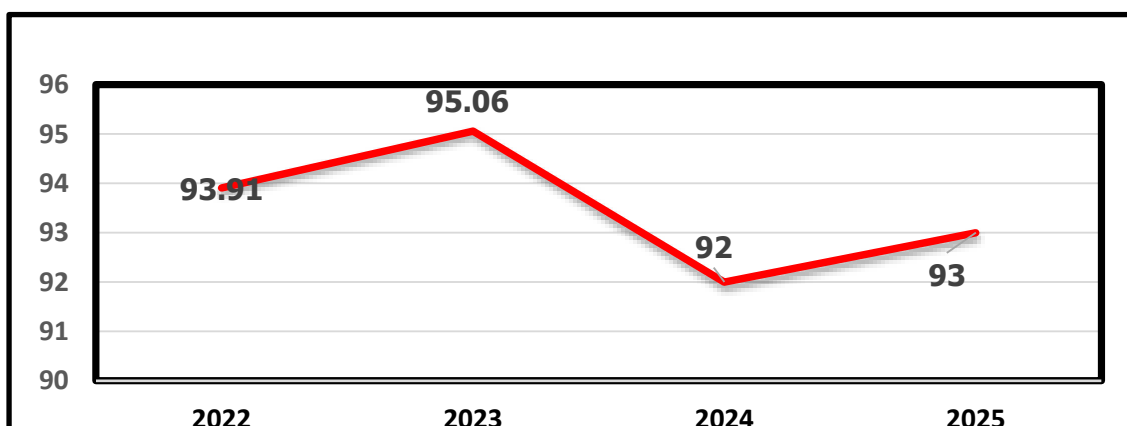
**Grafik 3.15**  
**Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator**  
**Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi Tahun 2024-2025**



Sumber Data: Data Diolah

Perkembangan tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, yaitu tahun 2021 sampai dengan 2025, menunjukkan pola yang fluktuatif. Pada tahun 2021 tingkat kepuasan masyarakat tercatat sebesar 93,91%, kemudian meningkat menjadi 95,06% pada tahun 2023. Selanjutnya, pada tahun 2024 terjadi penurunan menjadi 92%, dan pada tahun 2025 kembali mengalami peningkatan menjadi 93%. Perkembangan tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi pada tahun 2022-2025 disajikan pada grafik berikut :

**Grafik 3.16**  
**Perkembangan Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi**  
**Tahun 2022-2025**

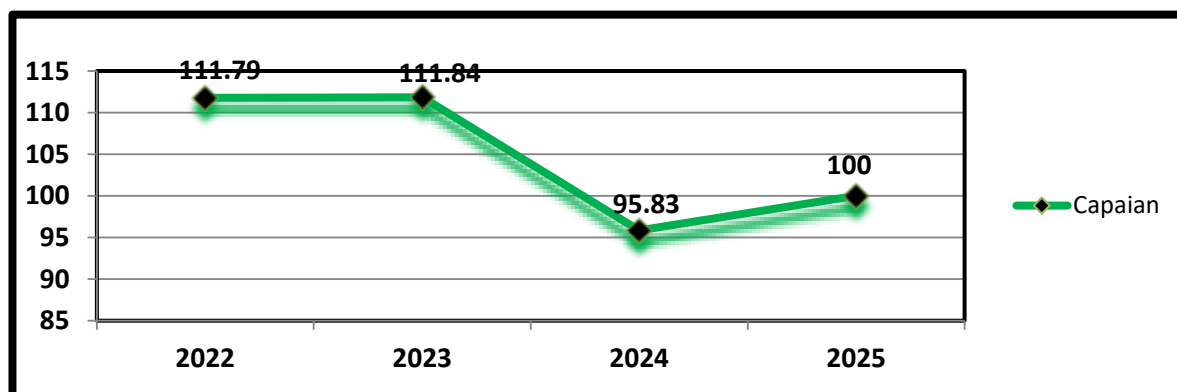


Sumber : Data Diolah



Dari capaiannya, perbandingan capaian Indikator Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi Tahun 2022-2024 dapat disajikan pada grafik berikut berikut :

**Grafik 3.17**  
**Capaian Indikator Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi Tahun 2022-2025**



Sumber : Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat

**Perbandingan Realisasi dengan Dokumen Renstra.** Sesuai dengan Rencana Strategis Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang berpedoman kepada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi melalui indikator kinerja Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi, capaiannya sampai dengan tahun 2025 telah melebihi target akhir yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Secara lengkap gambaran pengukuran capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas pelayanan organisasi dibandingkan dengan target Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.20**

**Perbandingan capaian tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD/Renstra Tahun 2021-2026**

Sasaran	Indikator Kinerja	TAHUN 2025		%	Target Akhir RPJMD/Renstra	Capaian s.d Tahun 2025 Terhadap Target Akhir RPJMD/Renstra (%)
		Target	Realisasi			
Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	93	93	100	88	105,68

Sumber : Hasil analisis capaian kinerja Badan Kesbangpol Prov Sumbar Tahun 2025



Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian sasaran meningkatnya kualitas pelayanan organisasi dengan indikator kinerja tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi telah melebihi target Renstra/RPJMD, dimana target akhir pada Renstra adalah sebesar 88, sedangkan capaian sampai tahun 2025 sebesar 93. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan organisasi telah melampaui standar yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan, serta mencerminkan efektivitas upaya perbaikan pelayanan yang telah dilaksanakan secara berkelanjutan. Capaian tersebut juga mengindikasikan bahwa penyelenggaraan pelayanan organisasi telah mampu memenuhi harapan masyarakat, sehingga sasaran peningkatan kualitas pelayanan dapat dikatakan berhasil dicapai.

**Perbandingan Realisasi dengan Standar Nasional.** Secara nasional, tingkat kepuasan terhadap pelayanan publik diukur menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Predikat survei kepuasan masyarakat sesuai Permenpan dan RB Nomor 14 tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.21**  
**Predikat Survei Kepuasan Masyarakat**

Nilai	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Pelayanan
1	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik
2	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	76,61- 88,30	B	Baik
4	88,31-100,00	A	Sangat Baik

*Sumber Data : Permenpan No 14/2017*

Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi pada Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025 berada pada kategory sangat baik jika dibandingkan dengan standar penilaian nasional Indeks Kepuasan Masyarakat

**Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan.** Dalam upaya pencapaian



indikator kinerja sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Organisasi pada Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat, terdapat beberapa faktor yang mendorong keberhasilan tercapainya realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, diantaranya :

1. Komitmen pimpinan dan seluruh jajaran Kesbangpol dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.
2. Ketersediaan standar pelayanan yang jelas dan terukur, sehingga pelaksanaan pelayanan dapat berjalan sesuai ketentuan dan harapan masyarakat.
3. Penyederhanaan prosedur dan kepastian waktu layanan, yang memudahkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan.
4. Pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan yang memadai untuk meningkatkan kenyamanan dan aksesibilitas masyarakat.
5. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara rutin, serta pemanfaatan hasil survei sebagai dasar perbaikan kualitas pelayanan.

Di samping upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mencapai keberhasilan indikator Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2025, juga terdapat beberapa **faktor yang menghambat** tercapainya sasaran kinerja ini, diantaranya:

- a. Keterbatasan sumber daya manusia pelayanan, baik dari sisi jumlah maupun kompetensi, yang berdampak pada kualitas dan kecepatan pelayanan.
- b. Sarana dan prasarana pelayanan yang belum sepenuhnya memadai, sehingga mempengaruhi kenyamanan dan kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan.
- c. Prosedur pelayanan yang belum sepenuhnya sederhana dan adaptif, khususnya terhadap perubahan kebutuhan masyarakat.
- d. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan yang belum optimal, sehingga efektivitas dan efisiensi pelayanan masih terbatas.
- e. Koordinasi antar unit pelayanan yang belum sepenuhnya optimal, yang dapat menimbulkan ketidaksinkronan dalam proses pelayanan.

Dalam mengurangi dampak resiko tidak optimalnya capaian kinerja di tahun 2025, maka Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat melakukan berbagai upaya sebagai alternative solusi diantaranya :

1. Mengupayakan penambahan SDM dan peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur pelayanan melalui pelatihan pelayanan publik, penguatan etika pelayanan, serta pembinaan berkelanjutan.



2. Memenuhi dan meningkatkan sarana serta prasarana pelayanan sesuai standar pelayanan guna meningkatkan kenyamanan dan kemudahan akses masyarakat
3. Menyederhanakan dan menyesuaikan prosedur pelayanan agar lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan, termasuk digitalisasi layanan dan sistem pengaduan masyarakat.
5. Meningkatkan koordinasi dan sinergi antarunit pelayanan, sehingga proses pelayanan dapat berjalan lebih terintegrasi dan konsisten.

**Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.** Dalam rangka pencapaian sasaran meningkatnya kualitas pelayanan organisasi dengan indikator kinerja tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi dengan target 93 pada tahun 2025 yang tercapai sebesar 93 dengan tingkat capaian sebesar 100%, telah disediakan anggaran melalui APBD/P Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 4.829.856.124 ,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.664.601.241,- atau 96,58%. Anggaran ini tersebar pada 1 (satu) program, 5 kegiatan dan 14 Sub Kegiatan. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran meningkatnya kualitas pelayanan organisasi. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung sasaran IV dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.23**  
**Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran IV**

Sasaran/Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi
<b>Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi</b>	<b>5</b>	<b>4.829.856.124</b>	<b>4.664.601.241</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>1</b>	<b>4.829.855.124</b>	<b>4.664.601.241</b>
<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>39.200.000</b>	<b>38.570.874</b>
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		39.200.000	38.570.874
<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>3.417.963.784</b>	<b>3.300.678.686</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		2.311.700	2.201.400
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		149.198.200	124.104.000
Penyediaan Barang Cetak dan		129.904.200	91.631.000



Penggandaan			
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		20.928.000	20.928.000
Fasilitas Kunjung Tamu		7.825.000	7.644.000
Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi dan Konsultasi SKPD		3.042.796.684	2.989.170.286
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		65.000.000	65.000.000
<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>475.801.440</b>	<b>446.449.497</b>
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		475.801.440	446.449.497
<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>709.070.900</b>	<b>696.337.487</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat		2.500.000	2.481.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		91.972.500	89.056.489
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		614.598.400	604.799.998
<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>187.820.000</b>	<b>182.564.697</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		160.900.000	158.336.997
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		26.920.000	24.227.700

Sesuai dengan perhitungan tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 214/PMK.02/2021, maka untuk perhitungan analisis efisiensi anggaran dalam pencapaian indikator kinerja meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi adalah sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(PA \times CK) - RA}{PA} \times 100\%$$

Keterangan :

PA = Pagu Anggaran = Rp.4.829.856.124

CK = Capaian Kinerja (%) = 100%

RA = Realisasi Anggaran Rp. 4.664.601.241



$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(4.829.856.124 \times 100\%) - 4.664.601.241}{4.829.856.124} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{165.254.883}{4.829.856.124} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 0,0342$$

Untuk mengetahui besaran nilai efisiensi, tingkat efisiensi kinerja dikonversi menjadi skala 0% - 100% dengan formula penghitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Nilai Efisiensi} &= ((50\% + (\text{Efisiensi Kinerja}/20) \times 50) \\ &= ((50\% + (0,0342/20) \times 50) \\ &= (50\% + 0,0850) \\ &= 58,5\% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil analisis tingkat efisiensi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan pengelolaan anggaran secara efisien dalam mendukung pencapaian indikator kinerja tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi. Nilai efisiensi yang diperoleh sebesar 58,5 persen. Efisiensi tersebut terutama dicapai melalui penghematan belanja perjalanan dinas, alat tulis kantor dan belanja cetak dan penggandaan.

### 3.4 Realisasi Anggaran Tahun 2025

Untuk mendukung pencapaian 2 tujuan dengan 4 sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat mendapatkan alokasi belanja dari APBD Perubahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 sebesar Rp. 22.190.378.717 (Dua Puluh Dua Milyar Seratus Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Belas Rupiah), dengan penjelasan sebagai berikut

1. Perubahan APBD Tahun 2025 sebesar Rp. 22.190.378.717, digunakan untuk mendukung pelaksanaan 6 program (sama dengan tahun sebelumnya) dengan 29 sub kegiatan. Dari APBD Perubahan tahun 2025 tersebut sebesar 49,53% (Rp. 10.990.811.425) mendukung pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
2. Keterkaitan antara anggaran dengan sasaran diuraikan pada table berikut :



**Tabel 3.23**  
**Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Langsung Program/Kegiatan Yang**  
**Mendukung Pencapaian 4 Sasaran Tahun 2025**

<b>No</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Pagu Anggaran</b>	<b>Realisasi Anggaran</b>	<b>% Capaian</b>
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	6.160.955.301	5.945.787.829	96,51
2	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	4.829.856.124	4.664.601.241	96,58
3	Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	4.904.241.500	3.512.830.925	71,63
4	Meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat	6.295.325.792	6.118.894.200	97,19
	<b>Total</b>	<b>Rp.22.190.378.717</b>	<b>Rp.20.242.114.195</b>	<b>91,22</b>



## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, pelaksanaan akuntabilitas kinerja diharuskan bagi setiap instansi pemerintah. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Laporan Kinerja tahun 2025 merupakan kelanjutan laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 yang dibuat untuk menggambarkan capaian kinerja dan prestasi maupun permasalahan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat. Laporan kinerja ini dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) untuk mengetahui sejauhmana manfaat pelayanan di bidang Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik bagi masyarakat.

Penyajian data laporan kinerja ini didasarkan kepada beberapa indikator kinerja yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, melalui penggunaan indikator kinerja sasaran. Secara garis besar, berdasarkan hasil evaluasi terhadap pencapaian sasaran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 telah menetapkan 2 (dua) tujuan dan 4 (empat) sasaran strategis dengan perjanjian kinerja yang diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja serta analisis capaian sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol telah berjalan dengan baik dan menunjukkan tren kinerja yang positif. Sebagian besar indikator kinerja utama mampu mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan dalam



Perjanjian Kinerja Tahun berjalan.

2. Ralisasi keempat indikator kinerja sasaran startegis Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025 mencapai 100% ke atas. Secara rata-rata, capaian indikator kinerja sasara sebesar 126,11%. Dengan kata lain, capaian semua indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 termasuk berhasil dengan kategori **sangat tinggi**
3. Alokasi anggaran untuk menunjang pencapaian 4 (empat) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator kinerja pada Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 sebesar Rp.22.190.378.717 (Dua Puluh Dua Milyar Seratus Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Belas Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.20.242.114.195 (Dua Puluh Milyar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Seratus Empat Belas Ribu Seratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) atau 91,22%.
4. Dalam pencapaian kinerja sasaran Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, masih terdapat beberapa hambatan yang disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan sumber daya, dinamika sosial politik yang berkembang, serta belum optimalnya sinergi lintas sektor dalam deteksi dini dan penanganan potensi konflik. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah perbaikan yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kinerja Badan Kesbangpol di masa mendatang.

## 4.2 Saran

Dalam rangka meningkatkan kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat ke depan, maka ada beberapa langkah yang akan dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat secara umum, antara lain :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan berbasis kinerja melalui penajaman indikator yang terukur, relevan, dan selaras dengan dokumen perencanaan daerah (RPJMD dan Renstra), serta memperkuat sistem monitoring dan evaluasi secara berkala.
2. Mendorong peningkatan peran dan fungsi forum-forum strategis seperti FKUB, FPK, dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dalam deteksi dini dan pencegahan konflik sosial secara lebih efektif dan berkelanjutan.
3. Memperkuat koordinasi dengan perangkat daerah terkait, aparat keamanan, serta pemangku kepentingan lainnya guna mendukung stabilitas politik, keamanan, dan ketentraman masyarakat.

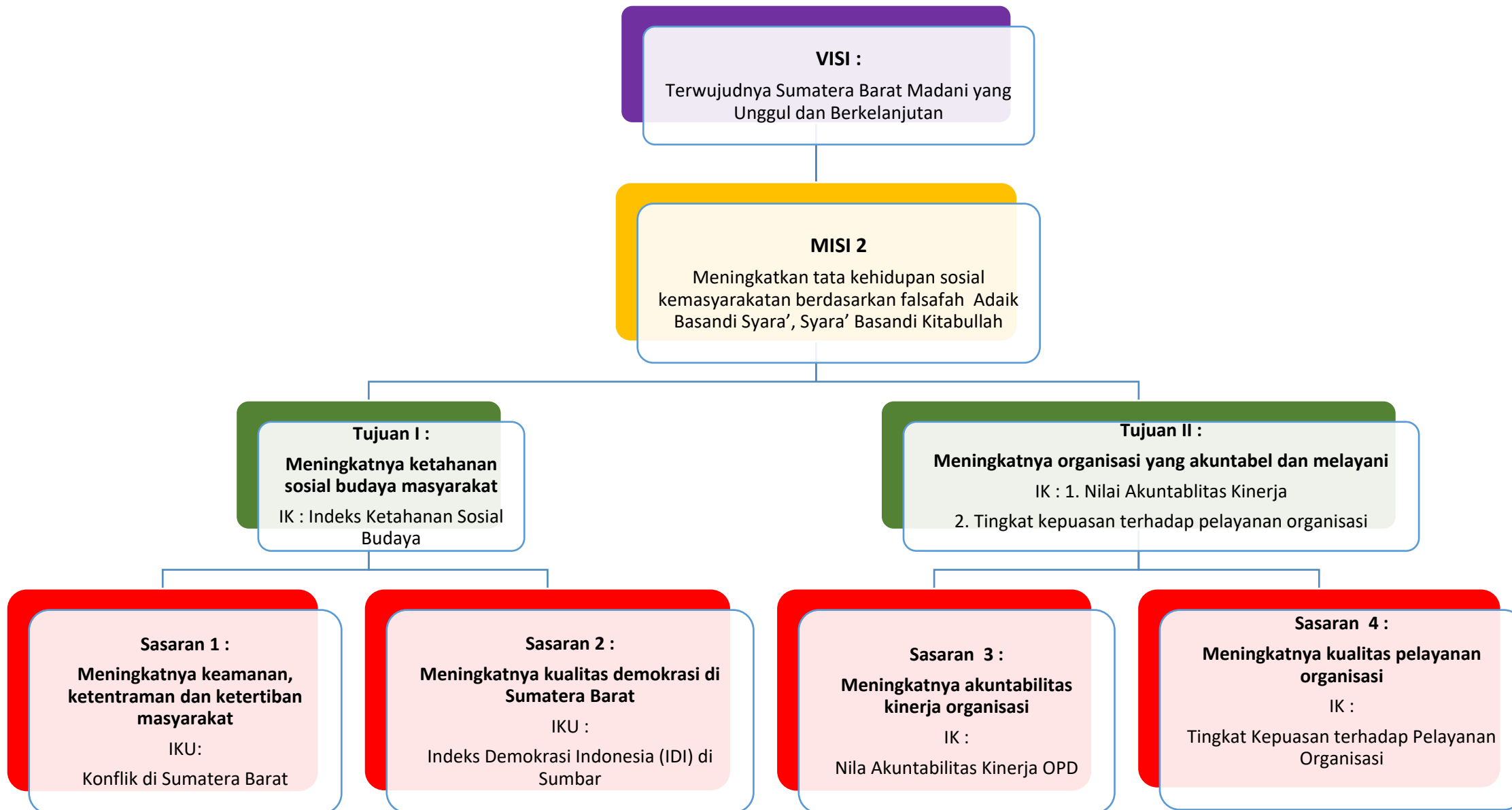


4. Mengembangkan kompetensi aparatur melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan, khususnya dalam bidang analisis konflik, kewaspadaan nasional, dan pengelolaan isu-isu strategis kebangsaan.
5. Terus melakukan perbaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara berkelanjutan dengan mengacu pada hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.



# Lampiran

CASCADING TAHUN 2025  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA BARAT



**Sasaran 1 :**  
**Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat**

IKU:  
Konflik di Sumatera Barat

**Meningkatnya pencegahan potensi konflik**

IK :  
Persentase potensi konflik yang dapat diredam

**Meningkatnya fasilitasi terhadap tim/ forum strategis daerah dalam pencegahan potensi konflik sosial**

IK :  
1. Jumlah tim/forum-forum strategis daerah yang terbentuk untuk pencegahan potensi konflik sosial.  
2. Jumlah fasilitasi penyelenggaraan kegiatan tim/forum strategis daerah untuk pencegahan potensi konflik sosial

**Meningkatnya peran OPD dan instansi terkait dalam pencegahan potensi konflik**

IK :  
Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dengan OPD/instansi terkait dalam pencegahan potensi konflik

**Meningkatnya fasilitasi terhadap penyelesaian aksi unjuk rasa/ demonstrasi**

IK :  
Persentase fasilitasi penyelesaian aksi demonstrasi/ unjuk rasa

**Ketersediaan Data Perkembangan Situasi dan Kondisi di Daerah Yang Akurat**

IK:  
1. Jumlah dokumen laporan situasi daerah  
2. Jumlah dokumen peta potensi konflik  
3. Jumlah dokumen pelaporan rencana aksi tim terpadu penanganan konflik sosial

**Meningkatnya fasilitasi terhadap tim/forum strategis daerah dalam penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan**

1. Jumlah tim /forum-forum strategis daerah yang terbentuk untuk penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan  
2. Jumlah fasilitasi penyelenggaraan kegiatan tim/forum strategis daerah dalam penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

**Meningkatnya penyelenggaraan kegiatan penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa**

IK :  
Jumlah penyelenggaraan kegiatan penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan karakter Bangsa

**Meningkatnya fasilitasi terhadap tim/forum strategis daerah dalam peningkatan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama**

IK :  
1. Jumlah tim dan forum-forum strategis daerah yang terbentuk untuk peningkatan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya  
2. Jumlah fasilitasi penyelenggaraan kegiatan tim/forum strategis daerah untuk peningkatan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama

**Meningkatnya penyelenggaraan kegiatan peningkatan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama**

IK :  
Jumlah penyelenggaraan kegiatan peningkatan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama

**Ketersediaan Laporan Perkembangan Ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama**

IK :  
Laporan perkembangan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama yang tersusun

**Meningkatnya Kesadaran Masyarakat tentang Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa**

IK :  
Persentase gangguan keamanan berlatarbelakang Ideologi, Separatisme dan Radikalisme yang dapat diredam

**Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial budaya dan agama**

IK :  
Persentase permasalahan ekonomi, sosial budaya dan agama yang dapat diredam

**Sasaran 2**  
**Meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat**  
IKU :  
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar

**Meningkatnya Kapasitas Lembaga Demokrasi**  
IK :  
Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi

**Meningkatnya Fasilitas terhadap Lembaga Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik**  
IK :  
1. Persentase Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diproses sesuai regulasi  
2. Persentase penyaluran bantuan keuangan partai politik yang diproses sesuai regulasi

**Ketersediaan data Lembaga Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik yang akurat**  
IK :  
1. Data Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang tersusun  
2. Data keterwakilan partai politik di DPRD tersusun

**Meningkatnya hak-hak politik masyarakat**  
IK :  
Indeks Kebebasan

**Meningkatnya Penyelenggaraan Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi**  
IK :  
Jumlah Penyelenggaraan Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi

**Meningkatnya fasilitas terhadap penyelenggaraan Pemilu/Pilkada :**  
1. Jumlah tim yang terbentuk untuk pemantauan perkembangan politik daerah  
2. Jumlah penyelenggaraan kegiatan Persiapan Pemilu/Pilkada

**Tersusunnya dokumen perkembangan politik daerah**  
IK :  
Dokumen perkembangan politik daerah yang tersusun

**Meningkatnya Jumlah Organisasi Masyarakat Yang Taat Hukum**  
IK :  
Persentase Ormas Yang Melaksanakan Aktivitas Sesuai Regulasi

**Meningkatnya Penyelenggaraan Pemberdayaan Organisasi Masyarakat**  
IK :  
Jumlah penyelenggaraan pemberdayaan organisasi masyarakat

**Ketersediaan data organisasi masyarakat yang akurat**  
IK :  
Dokumen Data Ormas Yang Berbadan Hukum

**Sasaran 3 :**  
**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi**  
IK :  
Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD

**Meningkatnya kualitas perencanaan organisasi**  
IK :  
Nilai Komponen Perencanaan pada evaluasi SAKIP

**Meningkatnya Kualitas Pelaporan Organisasi**  
IK :  
Nilai Komponen Pelaporan pada Evaluasi SAKIP

**Meningkatnya pengawasan internal organisasi**  
IK:  
Nilai Komponen Evaluasi Internal pada Evaluasi SAKIP

**Tersusunnya Dokumen Perangkat Daerah tepat waktu**  
IK:  
Jumlah dokumen perangkat daerah yang disusun tepat waktu

**Meningkatnya Keselarasan antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**  
IK :  
Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

**Meningkatnya Implementasi Dokumen Perangkat Daerah**  
IK :  
Persentase kesesuaian Dokumen Perangkat Daerah dengan Dokumen Penganggaran

**Tersusunnya Dokumen Pelaporan Organisasi Tepat Waktu**  
IK :  
Jumlah Dokumen Pelaporan Organisasi yg disusun tepat waktu

**Meningkatnya Kesesuaian Laporan dengan Pedoman Penyusunan Laporan**  
IK :  
Persentase Dokumen Pelaporan yg sesuai dg pedoman penyusunan Laporan

**Meningkatnya Pemanfaatan laporan terhadap perencanaan perangkat Daerah**  
IK :  
Persentase Hasil evaluasi yg ditindaklanjuti dlm dokumen perangkat Daerah

**Meningkatnya kualitas penatausahaan keuangan**  
IK:  
Persentase pengurangan kesalahan hasil verifikasi keuangan

**Meningkatnya tindak lanjut temuan pemeriksaan**  
IK:  
% temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti

**Meningkatnya ASN yang mengisi LHKPN/LHKASN tepat waktu**  
IK:  
Jumlah ASN yang mengisi LHKPN/LHKASN tepat waktu

**Sasaran 4 :**  
**Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi**  
IK :  
Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi

**Penempatan Pegawai sesuai dengan Peta Jabatan**  
IK:  
Persentase pegawai yang penempatannya sesuai dengan peta jabatan atau persentase keterisian peta jabatan

**Meningkatnya pelayanan umum dan kepegawaian**  
IK :  
Persentase layanan adm kepegawaian sesuai SOP  
Persentase layanan surat menyurat sesuai SOP  
Persentase layanan Sarpras sesuai SOP

**Meningkatnya pengelolaan BMD**  
IK :  
1. Persentase BMD dalam kondisi baik  
2. Persentase pemenuhan kebutuhan Sarpras pendukung kinerja

**Meningkatnya kapasitas SDM organisasi**  
IK :  
Jumlah SDM yang mengikuti pengembangan kompetensi

**Ketersediaan data kepegawaian yang akurat**  
IK :  
Persentase ketersediaan data kepegawaian

**Tersusunnya uraian tugas ASN sesuai regulasi**  
IK :  
Dokumen uraian tugas yang sesuai regulasi

**Ketersediaan Dokumen Analisa Jabatan dan Peta Jabatan yang sesuai dengan Regulasi**  
IK :  
Dokumen Anjab yang sesuai dengan regulasi  
Dokumen Peta Jabatan yang sesuai dengan regulasi

**Tersusunnya dokumen SOP sesuai regulasi**  
IK :  
Dokumen SOP yang sesuai regulasi

**Meningkatnya Kapasitas SDM Pemberi Layanan**  
IK :  
Jumlah SDM layanan yang kompeten

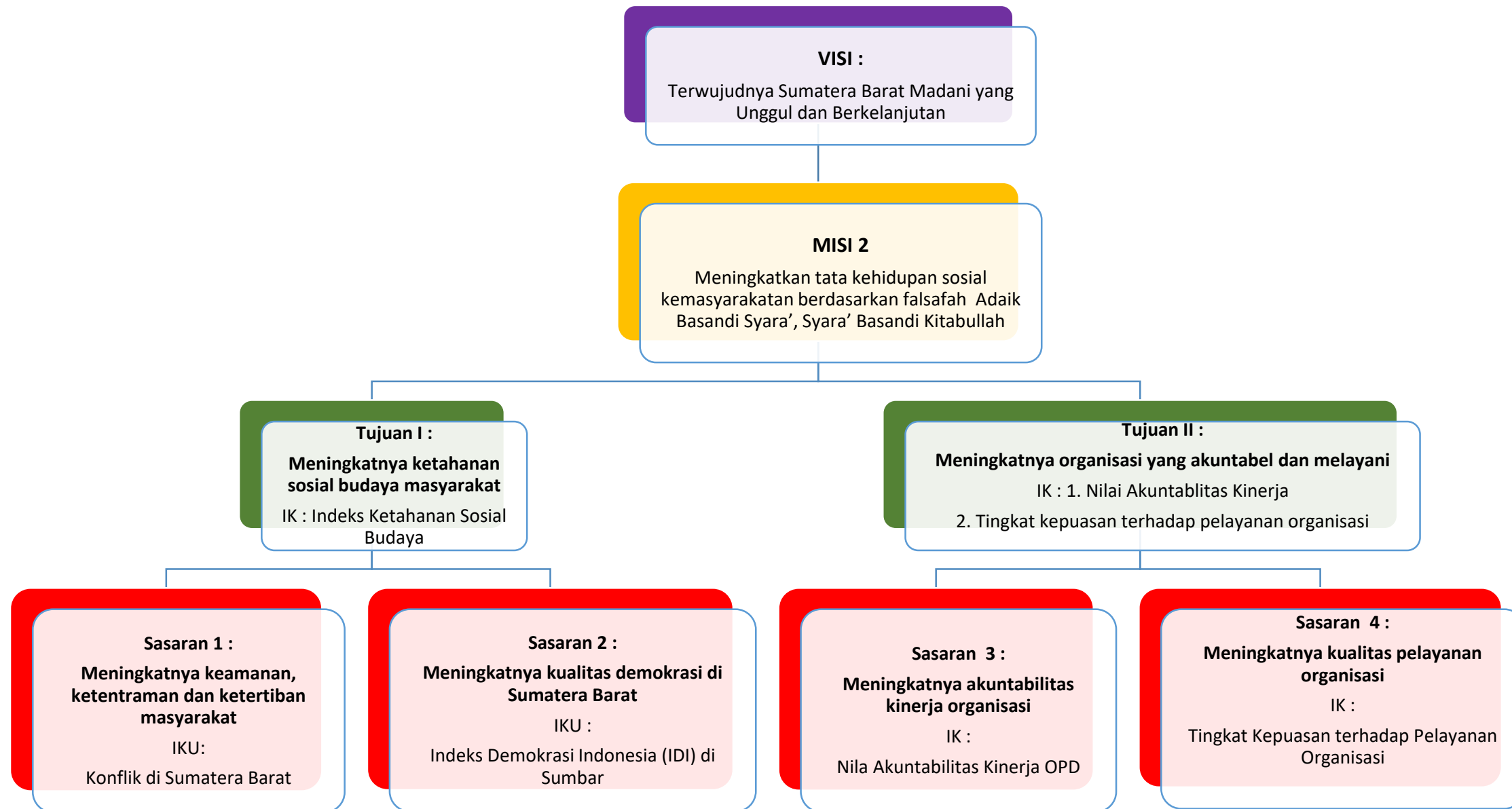
**Meningkatnya BMD yang diadakan dan dipelihara**  
IK :  
Jumlah aset yang disediakan  
Jumlah aset yang dipelihara  
Persentase aset yang tidak bermanfaat yang sudah dihapuskan

**Meningkatnya pengamanan BMD sesuai regulasi**  
IK :  
Persentase aset yang diinventaris  
Persentase data aset yang sudah direkon  
Persentase aset yang sudah diasuransikan

**Tersusunnya Data Kebutuhan pengembangan kapasitas SDM**  
IK :  
Dokumen Data Riwayat Pengembangan Kapasitas SDM yang tersusun

**Tersusunnya Rencana Kebutuhan Pengembangan Kapasitas SDM**  
IK :  
Dokumen rencana kebutuhan pengembangan kapasitas SDM yang tersusun

CROSS CUTTING TAHUN 2025  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA BARAT



**Sasaran 1 :**  
**Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat**  
IKU:  
Konflik di Sumatera Barat

**Meningkatnya pencegahan potensi konflik**  
IK :  
Persentase potensi konflik yang dapat diredam

**Satpol PP**  
IK :  
Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan

**Meningkatnya Kesadaran Masyarakat tentang Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa**  
IK :  
Persentase gangguan keamanan berlatarbelakang Ideologi, Separatisme dan Radikalisme yang dapat diselesaikan

**Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial budaya dan agama**  
IK :  
Persentase penyelesaian masalah ekonomi, sosial budaya dan agama

**Meningkatnya fasilitasi terhadap tim/forum strategis daerah dalam pencegahan potensi konflik sosial**  
IK :  
Jumlah tim/forum-forum strategis daerah yang difasilitasi untuk pencegahan potensi konflik sosial

**Meningkatnya peran OPD dan instansi terkait dalam pencegahan potensi konflik**  
IK :  
Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dengan OPD/instansi terkait dalam pencegahan potensi konflik

**Meningkatnya fasilitasi terhadap penyelesaian aksi unjuk rasa/demonstrasi**  
IK :  
Persentase fasilitasi penyelesaian aksi demonstrasi/ unjuk rasa

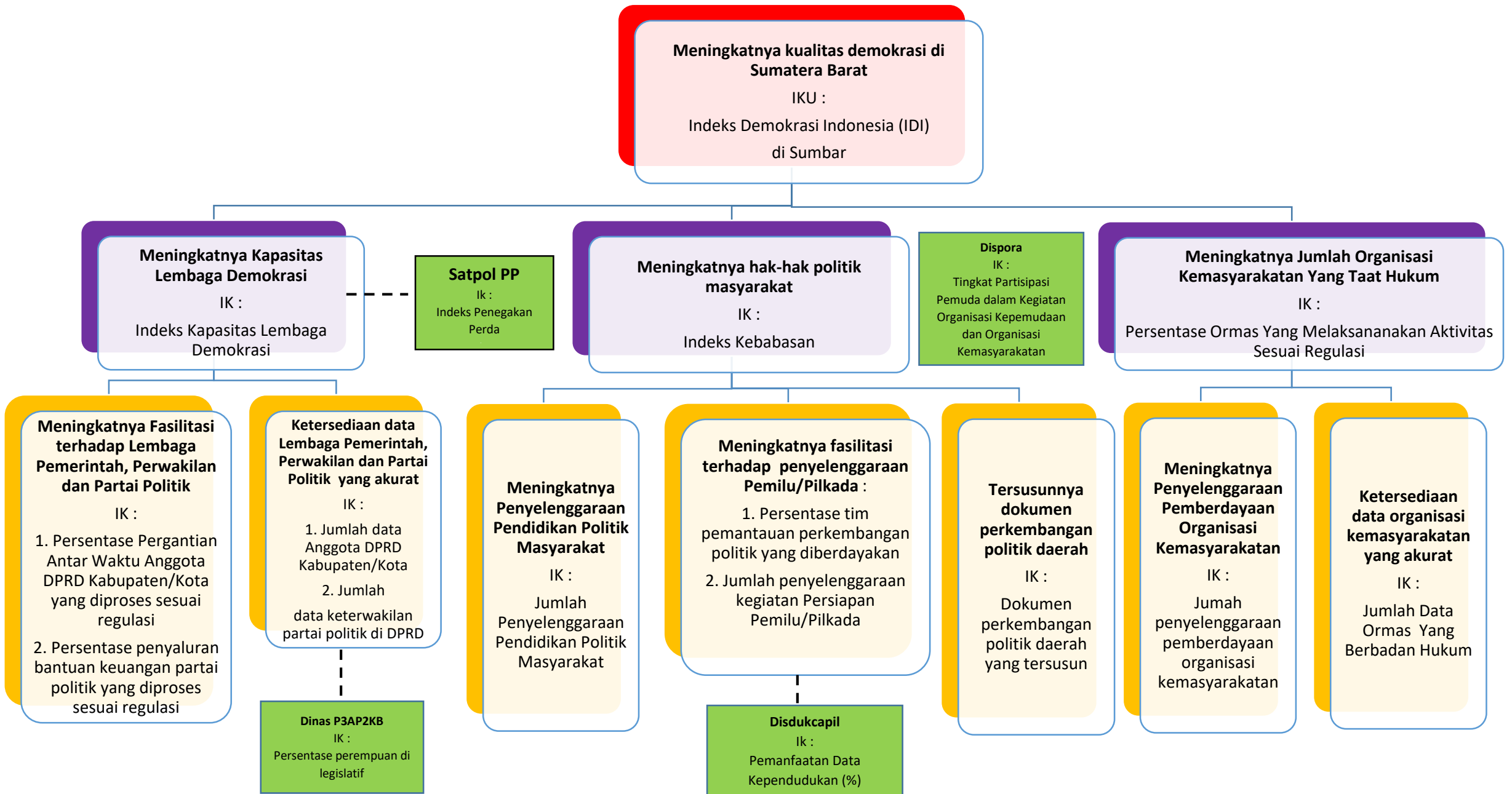
**Ketersediaan Data Perkembangan Situasi dan Kondisi di Daerah Yang Akurat**  
IK:  
1. Jumlah dokumen laporan situasi daerah  
2. Jumlah dokumen peta potensi konflik  
3. Jumlah dokumen pelaporan rencana aksi tim terpadu penanganan konflik sosial

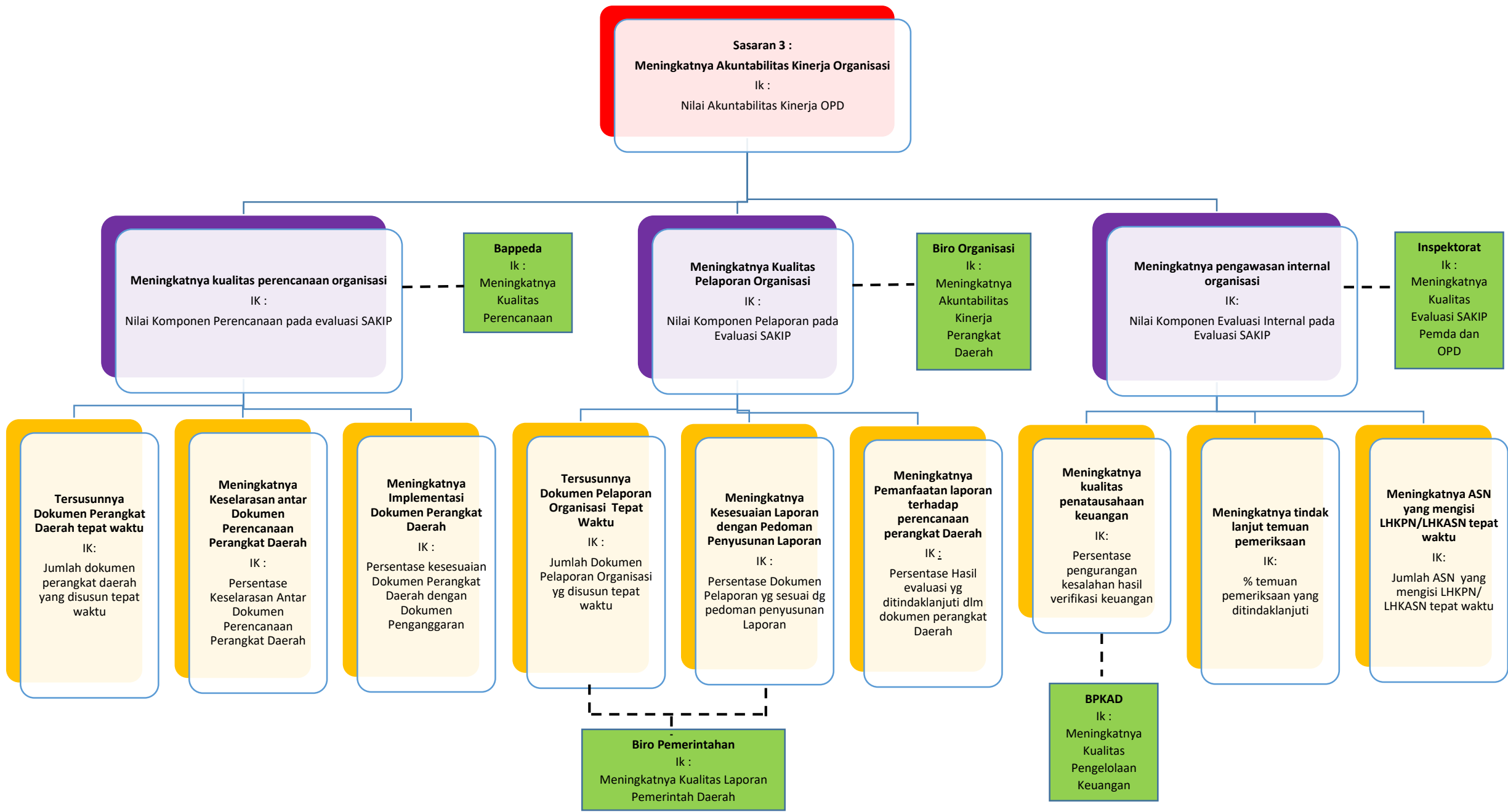
**Meningkatnya fasilitasi terhadap tim/forum strategis daerah dalam penguatan Ideologi Pancasila**  
Jumlah tim /forum-forum strategis daerah yang difasilitasi untuk penguatan Ideologi Pancasila

**Meningkatnya penyelenggaraan kegiatan penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa**  
IK :  
Jumlah penyelenggaraan kegiatan penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan karakter Bangsa

**Meningkatnya fasilitasi terhadap tim/forum strategis daerah dalam peningkatan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama**  
IK :  
Jumlah tim dan forum-forum strategis daerah yang difasilitasi untuk peningkatan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya

**Meningkatnya penyelenggaraan kegiatan peningkatan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama**  
IK :  
Jumlah penyelenggaraan kegiatan peningkatan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama





**Sasaran 3 :**  
**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi**  
 Ik :  
 Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD

**Meningkatnya kualitas perencanaan organisasi**  
 IK :  
 Nilai Komponen Perencanaan pada evaluasi SAKIP

**Bappeda**  
 Ik :  
 Meningkatkan Kualitas Perencanaan

**Meningkatnya Kualitas Pelaporan Organisasi**  
 IK :  
 Nilai Komponen Pelaporan pada Evaluasi SAKIP

**Biro Organisasi**  
 Ik :  
 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

**Meningkatnya pengawasan internal organisasi**  
 IK:  
 Nilai Komponen Evaluasi Internal pada Evaluasi SAKIP

**Inspektorat**  
 Ik :  
 Meningkatkan Kualitas Evaluasi SAKIP Pemda dan OPD

**Tersusunnya Dokumen Perangkat Daerah tepat waktu**  
 IK:  
 Jumlah dokumen perangkat daerah yang disusun tepat waktu

**Meningkatnya Keselarasan antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**  
 IK :  
 Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

**Meningkatnya Implementasi Dokumen Perangkat Daerah**  
 IK :  
 Persentase kesesuaian Dokumen Perangkat Daerah dengan Dokumen Penganggaran

**Tersusunnya Dokumen Pelaporan Organisasi Tepat Waktu**  
 IK :  
 Jumlah Dokumen Pelaporan Organisasi yg disusun tepat waktu

**Meningkatnya Kesesuaian Laporan dengan Pedoman Penyusunan Laporan**  
 IK :  
 Persentase Dokumen Pelaporan yg sesuai dg pedoman penyusunan Laporan

**Meningkatnya Pemanfaatan laporan terhadap perencanaan perangkat Daerah**  
 IK :  
 Persentase Hasil evaluasi yg ditindaklanjuti dlm dokumen perangkat Daerah

**Meningkatnya kualitas penatausahaan keuangan**  
 IK:  
 Persentase pengurangan kesalahan hasil verifikasi keuangan

**Meningkatnya tindak lanjut temuan pemeriksaan**  
 IK:  
 % temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti

**Meningkatnya ASN yang mengisi LHKPN/LHKASN tepat waktu**  
 IK:  
 Jumlah ASN yang mengisi LHKPN/LHKASN tepat waktu

**Biro Pemerintahan**  
 Ik :  
 Meningkatkan Kualitas Laporan Pemerintah Daerah

**BPKAD**  
 Ik :  
 Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan

**Sasaran 4 :**  
**Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi**

IK :  
Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi

**Penempatan Pegawai sesuai dengan Peta Jabatan**

IK:  
Persentase pegawai yang penempatannya sesuai dengan peta jabatan atau persentase keterisian peta jabatan

**BKD**

Ik:  
Meningkatnya kualitas pengelolaan manajemen SDM

**Meningkatnya pelayanan umum dan kepegawaian**

IK :  
1. Persentase layanan adm kepegawaian sesuai SOP  
2. Persentase layanan surat menyurat sesuai SOP  
3. Persentase layanan Sarpras sesuai SOP

**BPKAD**

Ik:  
Meningkatnya tata tertib pengelolaan BMD

**Meningkatnya pengelolaan BMD**

IK :  
1. Persentase BMD dalam kondisi baik  
2. Persentase pemenuhan kebutuhan Sarpras pendukung kinerja

**Meningkatnya kapasitas SDM organisasi**

IK :  
Jumlah SDM yang mengikuti pengembangan kompetensi

**BPSDM**

Ik:  
Meningkatnya kompetensi ASN dan stakeholder

**Ketersediaan data kepegawaian yang akurat**

IK :  
Persentase ketersediaan data kepegawaian

**Tersusunnya uraian tugas ASN sesuai regulasi**

IK :  
Dokumen uraian tugas yang sesuai regulasi

**Ketersediaan Dokumen Analisa Jabatan dan Peta Jabatan yang sesuai dengan Regulasi**

IK :  
Dokumen Anjab yang sesuai dengan regulasi  
Dokumen Peta Jabatan yang sesuai dengan regulasi

**Tersusunnya dokumen SOP sesuai regulasi**

IK :  
Dokumen SOP yang sesuai regulasi

**Meningkatnya Kapasitas SDM Pemberi Layanan**

IK :  
Jumlah SDM layanan yang kompeten

**Meningkatnya BMD yang diadakan dan dipelihara**

IK :  
1. Jumlah aset yang disediakan  
2. Jumlah aset yang dipelihara  
3. Persentase aset yang tidak bermanfaat yang sudah dihapuskan

**Meningkatnya pengamanan BMD sesuai regulasi**

IK :  
1. Persentase aset yang diinventaris  
2. Persentase data aset yang sudah direkon  
3. Persentase aset yang sudah diasuransikan

**Tersusunnya Data Kebutuhan pengembangan kapasitas SDM**

IK :  
Dokumen Data Riwayat Pengembangan Kapasitas SDM yang tersusun

**Tersusunnya Rencana Kebutuhan Pengembangan Kapasitas SDM**

IK :  
Dokumen rencana kebutuhan pengembangan kapasitas SDM yang tersusun



PEMERINTAH PROVINSI SUMATRA BARAT  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Kuini Nomor 79 A Padang 25114 Telepon (0751) 34475, Faximile (0751) 31554  
website : <https://kesbangpol.sumbarprov.go.id/> e-mail : [kesbangpol@sumbarprov.go.id](mailto:kesbangpol@sumbarprov.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Adi Dharma, S.Sos**

Jabatan : **Plt Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat**

**Selanjutnya disebut pihak pertama**

Nama : **MAHYELDI**

Jabatan : **Gubernur Sumatera Barat**

**Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang, Januari 2025

**PIHAK KEDUA**  
Gubernur Sumatera Barat

MAHYELDI

**PIHAK PERTAMA**

Adi Dharma, S.Sos

Nip. 19681016 198903 1 003

## PERJANJIAN KINERJA

OPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN : 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	81,15
2	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	93
3	Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Konflik di Sumatera Barat	1 kasus
4	Meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar	76,30

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 15.418.311.156,32	APBD
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. 3.854.672.595,68	APBD
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Rp. 5.883.189.200	APBD
4	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 103.574.000	APBD
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp. 713.720.000	APBD
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp. 841.900.000	APBD
	Total	Rp. 26.815.366.952	

PADANG, Januari 2025

GUBERNUR SUMATERA BARAT



MAHYELDI

Plt KEPALA BADAN



Adi Dharma,S.Sos

Nip. 19681016 198903 1 003



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Kuini Nomor 79 A Padang 25114 Telepon (0751) 34475, Faximile (0751) 31554  
website : <https://kesbangpol.sumbarprov.go.id/> e-mail : [kesbangpolprovsumbar@gmail.com](mailto:kesbangpolprovsumbar@gmail.com)

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Mursalim,A.P,M.Si**

Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MAHYELDI**

Jabatan : Gubernur Sumatera Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

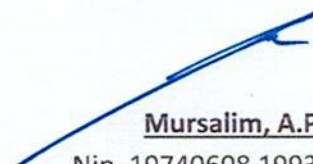
Padang, *September* 2025

PIHAK KEDUA



MAHYELDI

PIHAK PERTAMA



Mursalim, A.P.M.Si  
Nip. 19740608 199311 1 001

## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

OPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA BARAT


TAHUN : 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	81,15
2	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	93
3	Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Konflik di Sumatera Barat	1 kasus
4	Meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar	76,30

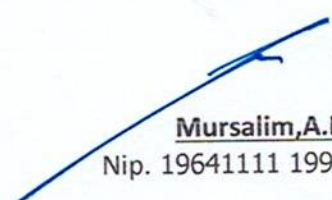
No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 10.990.811.425	APBD
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. 2.604.886.500	APBD
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Rp. 5.731.475.792	APBD
4	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 563.850.000	APBD
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp. 671.020.000	APBD
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp. 1.628.335.000	APBD
	Total	Rp. 22.190.378.717	

PADANG, *September* 2025

GUBERNUR SUMATERA BARAT

  
MAHYELDI

KEPALA BADAN

  
Mursalim, A.P., M.Si  
Nip. 19641111 199103 1 006



PEMERINTAH PROVINSI SUMATRA BARAT  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Kuini Nomor 79 A Padang 25114 Telepon (0751) 34475, Faximile (0751) 31554  
website : <https://kesbangpol.sumbarprov.go.id/> e-mail : [kesbangpol@sumbarprov.go.id](mailto:kesbangpol@sumbarprov.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Adi Dharma, S.Sos**

Jabatan : **Plt Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat**

**Selanjutnya disebut pihak pertama**

Nama : **MAHYELDI**

Jabatan : **Gubernur Sumatera Barat**

**Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang, Januari 2025

**PIHAK KEDUA**  
Gubernur Sumatera Barat

MAHYELDI

**PIHAK PERTAMA**

Adi Dharma, S.Sos

Nip. 19681016 198903 1 003

## PERJANJIAN KINERJA

OPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN : 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	81,15
2	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	93
3	Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Konflik di Sumatera Barat	1 kasus
4	Meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar	76,30

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 15.418.311.156,32	APBD
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. 3.854.672.595,68	APBD
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Rp. 5.883.189.200	APBD
4	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 103.574.000	APBD
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp. 713.720.000	APBD
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp. 841.900.000	APBD
	Total	Rp. 26.815.366.952	

PADANG, Januari 2025

GUBERNUR SUMATERA BARAT



MAHYELDI

Plt KEPALA BADAN



Adi Dharma,S.Sos

Nip. 19681016 198903 1 003

# Penghargaan Tahun 2025







Badan Pusat Statistik  
Sumatera Barat

BPS

BerAKHLAK

# SERTIFIKAT PENGHARGAAN

DIBERIKAN KEPADA

**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Provinsi Sumatera Barat**

SEBAGAI

**TERBAIK II**

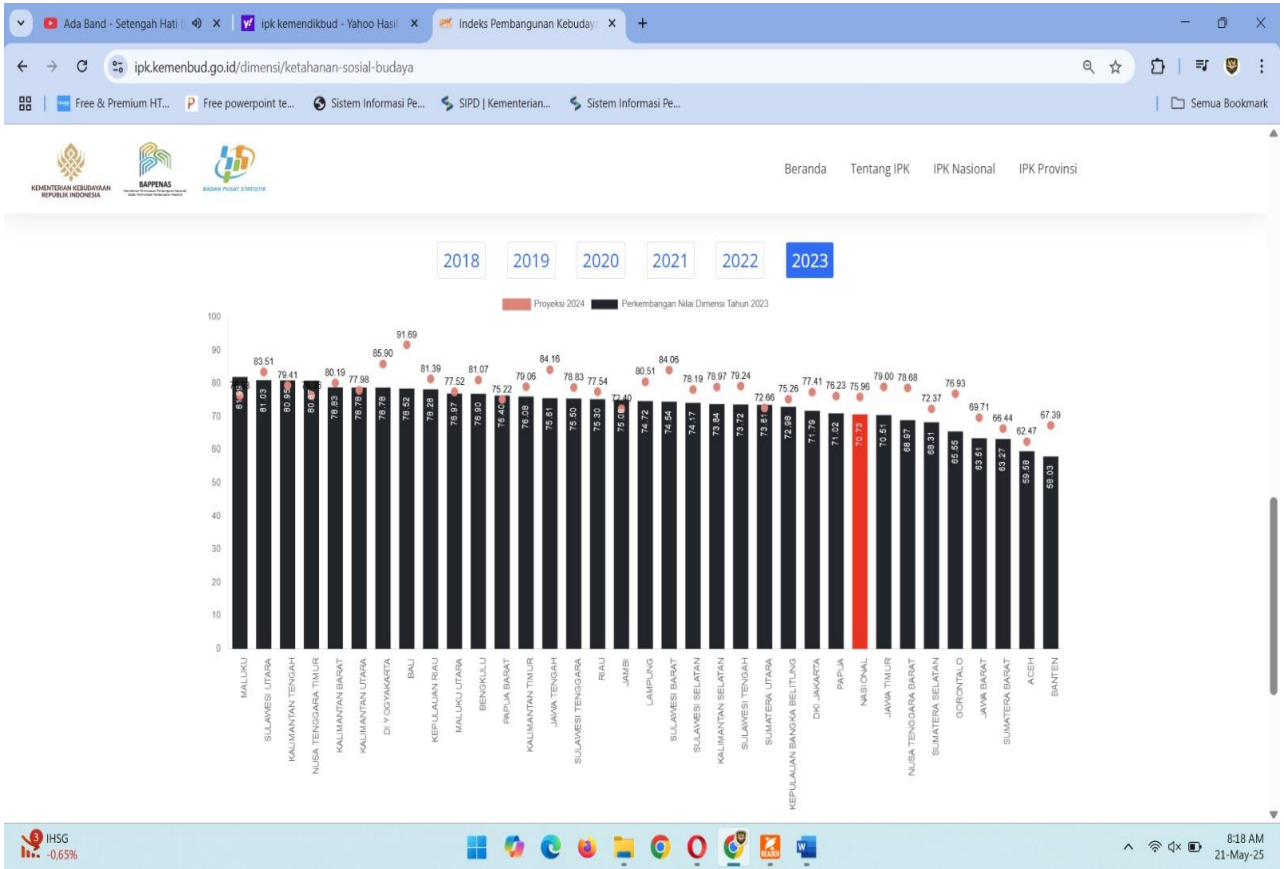
atas kontribusi pengajuan **Metadata Statistik** terbanyak Tahun 2025

Padang, 13 November 2025  
Kepala Badan Pusat Statistik  
Provinsi Sumatera Barat



**Sugeng Arianto**

# DATA INDEKS KETAHANAN SOSIAL BUDAYA ([www.ipk.kemdikbud.go.id](http://www.ipk.kemdikbud.go.id))



## Definisi Operasional

Definisi Operasional: Ketahanan Sosial Budaya Ketahanan Sosial Budaya dalam konteks penyusunan IPK didefinisikan sebagai kemampuan suatu kebudayaan dalam mempertahankan dan mengembangkan identitas, pengetahuan, serta praktik budayanya yang relevan yang didukung oleh kondisi sosial dalam masyarakat.

## Rincian Indikator dan Sumber Data

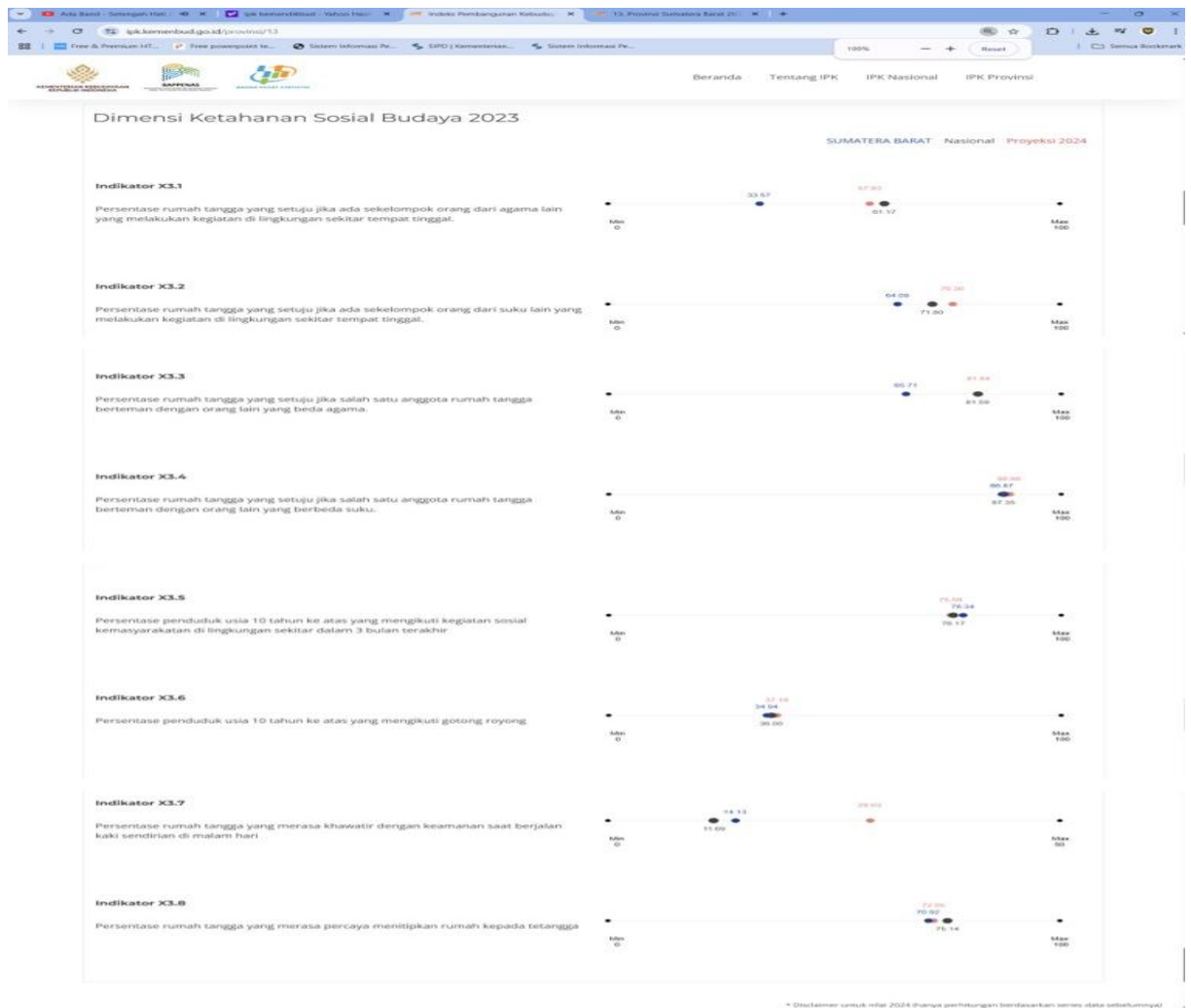
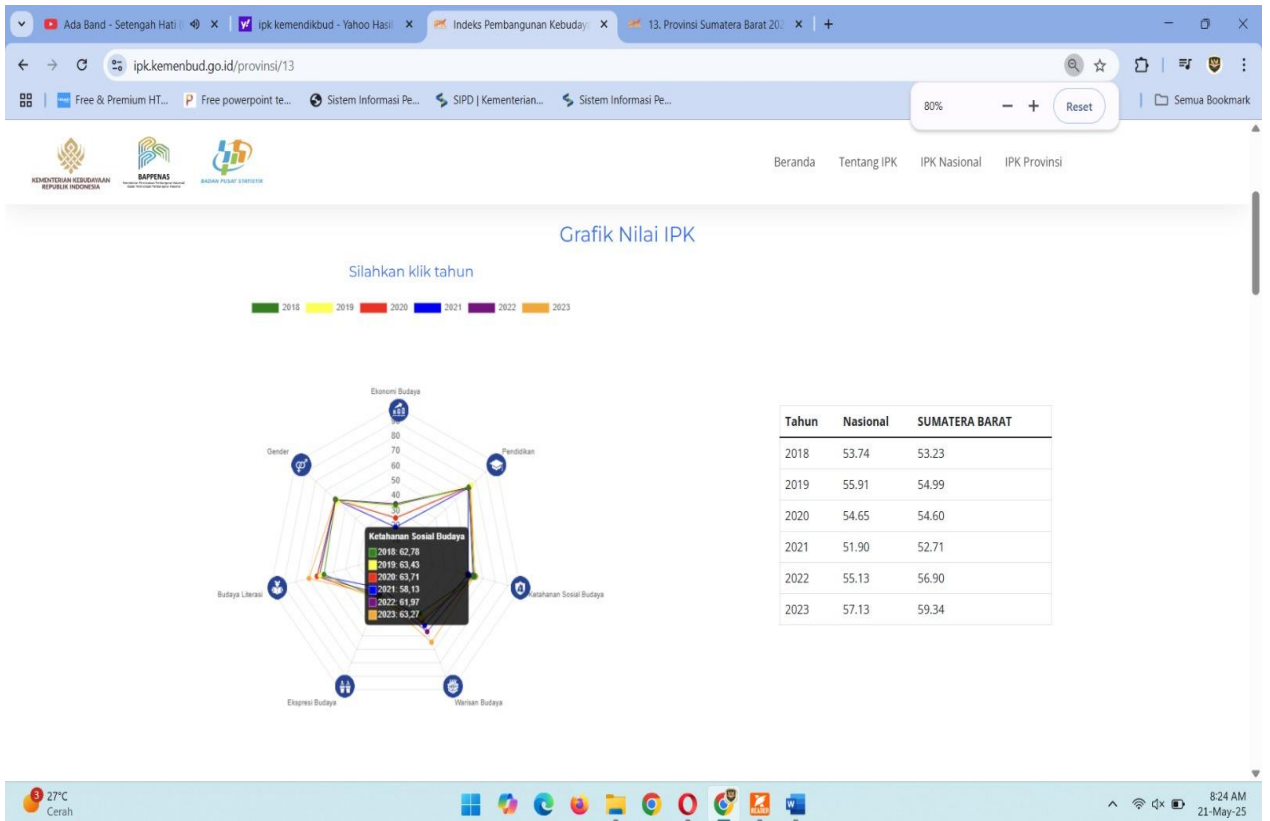
Kode Indikator	Nilai Minimum	Nilai Maksimum	Sumber Data
X3.1 Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari agama lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal.	0	100	Susenas MSBP
X3.2 Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari suku lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal.	0	100	Susenas MSBP
X3.3 Persentase rumah tangga yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga bertemu dengan orang lain yang berbeda agama.	0	100	Susenas MSBP
X3.4 Persentase rumah tangga yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga bertemu dengan orang lain yang berbeda suku.	0	100	Susenas MSBP
X3.5 Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar dalam 3 bulan terakhir	0	100	Susenas MSBP
X3.6 Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengikuti gotong royong	0	100	Susenas MSBP
X3.7 Persentase rumah tangga yang merasa khawatir dengan keamanan saat berjalan kaki sendirian di malam hari	0	50	Susenas Hansas/SPTK
X3.8 Persentase rumah tangga yang merasa percaya menitipkan rumah kepada tetangga	0	100	Susenas Hansas/SPTK

## Cara Menghitung Nilai Dimensi

Nilai Pada Dimensi Ketahanan Sosial Budaya (D3) dapat diperoleh dengan rumus perhitungan sebagai berikut

$$D_3 = \frac{1}{8} \sum_{i=1}^8 S_{3,i} = \frac{S_{3,1} + S_{3,2} + S_{3,3} + S_{3,4} + S_{3,5} + S_{3,6} + S_{3,7} + S_{3,8}}{8}$$

$$S_{3,i} = \frac{X_{3,i} - \min(X_{3,i})}{\max(X_{3,i}) - \min(X_{3,i})}, i = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8$$



**PENGOLAHAN DATA SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) PER  
RESPONDEN DAN PER UNSUR PELAYANAN  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
Tahun 2025**

No	No HP	Nama	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
1	081270522400	Fajar Sukma	3	3	3	3	3	3	3	2	3
2	081388422150	Iza meirisna	4	4	4	4	4	4	4	2	4
3	085263540311	Maira Himadhani	3	3	3	4	3	3	3	3	4
4	085278293949	Nosrial	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	085274274995	Heldi Suhandra	4	4	4	4	3	3	3	4	4
6	081364272175	Pris Derika Habdi SH	3	3	3	3	3	3	4	4	4
7	082288359620	Darmawi	3	4	3	4	4	4	4	4	3
8	082127615000	Alex Mustika Surya Lasmana	4	4	3	4	4	3	3	3	4
9	082172620009	vivi rafles	4	4	4	4	4	4	4	4	4
10	082389541602	metri yentoni	3	3	3	4	3	3	4	3	4
11	082170054959	Yani Rahmasari	3	3	3	3	3	3	3	3	3
12	083170652787	NOPALION	3	2	3	4	3	2	3	1	2
13	085376248234	Yoli Subhan	4	4	3	3	3	3	3	3	4
14	082391151211	Erni yunita	4	4	3	4	4	4	4	4	3
15	082384548909	Afrizal Amir wk. Dt. Rangkayo Majolelo	3	3	3	1	3	3	3	2	3

No	No HP	Nama	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
16	082284850407	Rudi Yudistira	3	2	3	4	3	3	3	2	2
17	081266865525	Mhd. Khadafi Abdullah	4	4	4	4	4	4	4	4	4
18	081266211955	Yulizal Yunus	3	3	3	4	4	4	4	4	4
19	081266855803	Sadri	3	3	3	3	3	3	3	3	4
20	085288346869	Faruq Alfitriah	3	3	2	4	3	3	3	2	3
21	081292968996	Riki Abdillah, S.Si., M.Si	4	4	4	4	4	4	3	3	1
22	081374877656	Alif Hidayat	3	3	3	4	3	3	3	3	4
23	081270115512	Andre Ashari	3	3	3	3	3	3	3	2	4
24	082285257579	Selvia Primadona Fendras	3	3	3	4	3	3	3	3	4
25	089685078988	Surya Lesmana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
26	087759620202	Benny Armiyuza, SE, MM	3	3	3	4	3	3	3	3	3
27	081374975626	Nova Febrianti, A.Md	3	4	4	3	3	3	3	3	4
28	081374161930	Febri Chandra	4	4	4	4	4	4	4	4	4
29	081372869473	Lina sari wulan	3	3	4	4	3	3	4	3	4
30	082171046061	Didi Pramadia	3	4	3	4	3	4	4	3	4
31	082384076687	FAISAL	4	4	3	4	4	4	4	3	4
32	085356447777	febriandy	3	3	3	4	4	4	3	3	4
33	082170503535	Dwi Triharyanto	1	3	4	4	2	3	4	4	4

No	No HP	Nama	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
34	085375514662	YOLA SISKANANDA	3	3	3	4	3	3	4	3	4
35	082264879747	syelfi sulpika	3	3	4	4	3	4	4	4	4
36	081374153276	Apriani, S.E	3	3	3	4	3	3	3	3	3
37	085265817925	Mahmud	3	3	3	4	4	4	4	3	4
38	081374040587	Rahman Al Amin, S.IP	4	4	3	4	4	4	4	4	4
39	081266711498	Syofyan Wahab	4	4	4	3	3	3	4	4	4
40	0813630382	Habibur rahman	3	3	3	4	3	3	3	3	4
41	082171034751	Leoneva	4	3	3	3	4	4	4	4	4
42	081363271302	Duski samad	2	3	2	3	3	2	3	3	3
43	08126733842	Dr. H. M. Rifki. M. Ag	3	3	3	3	3	3	3	3	3
44	08226767805	Sri Haryati	3	3	3	4	3	3	3	2	3
45	08126606654	Maman Sudarman	4	4	3	4	3	3	3	2	4
46	082169075855	Afif Maulana Isman	4	4	4	4	4	4	4	4	4
47	081270620279	Desrawati, S.Sos	4	4	4	4	4	4	4	4	4
48	081363817641	Teti Elfia	4	4	4	4	4	4	4	4	4
49	085356437577	Pebri Nina Yuliza	3	3	3	4	3	3	3	3	3
50	081363411959	Arini Nesa Putri	4	4	4	4	4	4	4	4	4
51	085263083484	Okdia Brisvi, S.P	4	4	3	4	3	4	4	4	4

No	No HP	Nama	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
52	08121573598	Dian Hanita	4	4	4	4	4	4	4	4	4
53	081378334035	Edisriani simanullang	2	2	3	4	3	3	3	3	4
54	085274149068	Yulisa Febriana, SE, M.Si	3	3	3	4	3	3	3	3	4
55	085363483938	Dewi Marni	3	4	3	4	3	4	4	3	4
56	082288113835	Benidarta	4	3	3	3	4	3	3	3	4
57	0838663080008	Erdimon	4	2	4	4	4	4	3	4	4
58	082386388678	Niken Agriyena, S.Sos, M.Si	3	4	3	4	3	3	3	3	3
59	081363489111	Syafrinaldi	4	4	4	4	4	4	4	3	4
60	085274021781	Lilis Mairizal	3	3	3	4	3	3	3	3	4
61	082284563729	Susi yuliantanty	3	3	4	3	3	4	4	4	4
62	085265613271	Fitri Inda Novrida	3	3	3	3	3	2	3	3	1
63	08116640502	Widia roza	3	4	3	4	3	3	4	3	4
64	071267100791	sussri ayu wandira	3	3	3	4	3	3	3	3	4
65	085263231250	Sukardi	3	3	3	4	3	3	3	3	3
66	081372562183	Yesi afriani	4	4	4	4	4	4	4	4	4
67	082385587466	Deswati	3	3	3	4	3	3	3	3	4
68	085272115149	Rara Arta Kencana	3	3	3	4	3	3	4	3	4
69	082169863737	Anggun Sutra	3	3	3	4	3	3	3	3	4





No	No HP	Nama	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
106	085221381466	Gustika Wasman	4	4	4	4	4	3	4	4	4
107	085355032343	Muhammad Fadhel	4	4	4	4	4	3	4	4	4
108	081364775133	Harryzal	4	4	4	4	4	3	4	4	4
109	08116616650	Rani Iqasari	4	4	4	4	4	4	4	4	4
110	08228533848	Sukma Mayliza	4	4	4	4	4	4	4	4	4
111	081363144700	Alirman Hamzah	4	4	3	4	3	4	4	3	3
112	083815170020	LUQMAN BUSTANUL HAKIM	3	3	3	4	4	4	4	4	4
113	085669064530	LUTFHI SURYATNA	4	4	4	3	4	3	4	4	4
114	081268108723	M.HIDAYATUL FAJRI	4	3	4	3	4	4	4	4	3
115	083897019531	MUCHAMAD BAGUS FAJAR	4	3	4	4	3	3	4	4	4
116	081260348380	MUHAMMAD AKBAR ROZAKH	4	3	4	3	3	4	4	3	4
117	082173424674	MUHAMMAD DZAKI MUBARAQ	3	3	4	3	3	4	4	4	4
118	081266513009	Muhammad iqbal	4	4	4	4	4	4	4	4	4
119	082169413218	MUHAMMAD NADHIF ALFATY	4	4	3	4	4	4	4	4	4
120	085272907660	Muhammad Qalbi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
121	085184038936	Mutiara Nasril	4	4	4	4	3	4	4	4	4
122	081372207825	MUTTAMILUL AZEEMA	4	4	4	4	4	4	4	4	4
123	089525160819	NALURI KASIH MAHACIPTA	3	4	4	4	3	4	4	4	4









No	No HP	Nama	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
196	083838415244	Angelina Ari Fitriani	4	4	4	4	4	4	4	4	4
197	081930155927	M.Khairul Hidayat	4	4	4	4	4	4	4	4	4
198	082257255965	Raisya A Zahra	4	4	4	4	4	4	4	4	4
199	082211160864	Annatira Berliana Cinta	4	4	4	4	4	4	4	4	4
200	082284666026	QINIQ RIVERA	4	4	4	4	4	4	4	4	4
201	085180699463	Muhammad Miftahul Fa'iz	4	4	4	4	4	4	4	4	4
202	082171736312	Rasya Aulia Cendikia	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Total			752	752	745	779	744	748	760	738	779
NRR			3.72	3.72	3.69	3.86	3.68	3.7	3.76	3.65	3.86
NRR Tertimbang			0.41	0.41	0.41	0.42	0.41	0.41	0.41	0.4	0.42
IKM			3.7								
Konversi IKM			92.5								
Nilai Layanan			A: Sangat baik								

<b>Keterangan :</b>	
U1 - U9	Unsur - Unsur pelayanan
NRR	Nilai rata-rata
IKM	Indeks Kepuasan Masyarakat
NRR Per Unsur	Jumlah nilai per unsur dibagi Jumlah kuesioner yang terisi
NRR tertimbang	NRR per unsur x 0.111 per unsur

<b>IKM UNIT PELAYANAN</b>			
<b>Mutu Pelayanan :</b>			
A	(Sangat Baik)	:	88,31 - 100,00
B	(Baik)	:	76,61 - 88,30
C	(Kurang Baik)	:	65 - 76,60
D	(Tidak Baik)	:	25,00 - 64,99

<b>No.</b>	<b>UNSUR PELAYANAN</b>	<b>NILAI RATA-RATA</b>
U1	Persyaratan	3.72
U2	Prosedur	3.72
U3	Waktu Pelayanan	3.69
U4	Biaya/Tarif	3.86
U5	Produk Layanan	3.68
U6	Kompetensi pelaksana	3.7
U7	Perilaku pelaksana	3.76
U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3.65
U9	Sarana dan Prasarana	3.86

**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)  
OPD BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN 2025**

NILAI IKM	Nama Layanan	
<b>93</b>	<b>Jumlah</b>	<b>: 202 Orang</b>
	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>: L = 102 orang / P = 100 orang</b>
	<b>Pendidikan</b>	<b>: SD = 0 orang</b>
		<b>SMP = 1 orang</b>
		<b>SMA = 112 orang</b>
		<b>DIII = 5 orang</b>
		<b>S1 = 46 orang</b>
		<b>S2 = 22 orang</b>
		<b>S3 = 7 orang</b>
	<b>Periode</b>	<b>: 01-11-2025 s/d 31-12-2025</b>

TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT

# DATA INDEKS DEMOKRASI INDONESIA PROVINSI SUMBAR (*sumbar.bps.go.id*)

<https://sumbar.bps.go.id/id/statistics-table/2/NjU5IzI=-metode-baru--indeks-demokrasi-indonesia--idi--provinsi-sumatera-barat.html>

**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Baranda Rencana Tablit Produk Layanan Informasi Publik

### [Metode Baru] Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Sumatera Barat, 2024

Terakhir Diperbarui : 24 September 2025

← Kembali Unduh JSON Bagikan

2024 2023 2022 2021

Freeze judul kolom

[Metode Baru] Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Sumatera Barat	
Provinsi	2024
Sumatera Barat	78,83

Keterangan Data :  
Sumber: Indeks Demokrasi Indonesia

#### Tabel Terkait

- [\[Metode Baru\] Aspek Indeks Demokrasi Indonesia \(IDI\) Provinsi Sumatera Barat](#)
- [\[Metode Baru\] Indikator Indeks Demokrasi Indonesia \(IDI\) Provinsi Sumatera Barat](#)
- [Indeks Demokrasi Indonesia \(IDI\) Provinsi Sumatera Barat](#)
- [Indeks Demokrasi Indonesia \(IDI\) Provinsi Sumatera Barat Menurut Aspek](#)
- [Indeks Demokrasi Indonesia \(IDI\) Provinsi Sumatera Barat Menurut Indikator](#)

21:45  
1/30/2026

<https://sumbar.bps.go.id/id/statistics-table/2/NjU4IzI=-metode-baru--aspek-indeks-demokrasi-indonesia--idi--provinsi-sumatera-barat.html>

**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Baranda Rencana Tarbit Produk Layanan Informasi Publik

Statistik Demografi dan Sosial

- Kependudukan dan Migrasi
- Tenaga Kerja
- Pendidikan
- Kesehatan
- Konsumsi dan Pendapatan
- Perlindungan Sosial
- Pemukiman dan Perumahan
- Hukum dan Kriminal
- Badaya
- Aktivitas Politik dan Komunitas Lainnya**
- Penggunaan Waktu

Statistik Ekonomi

Statistik Lingkungan Hidup dan Multi-domain

### [Metode Baru] Aspek Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Sumatera Barat, 2024

Terakhir Diperbarui : 22 September 2025

[← Kembali](#) [Unduh](#) [JSON](#) [Bagikan](#)

2024 2023 2022 2021

Freeze judul kolom

[Metode Baru] Aspek Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Sumatera Barat	
Aspek IDI (Metode Baru)	2024
Aspek Kebebasan	75,38
Aspek Kesetaraan	83,92
Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi	76,14

Keterangan Data :  
Sumber: Indeks Demokrasi Indonesia

#### Tabel Terkait

- [\[Metode Baru\] Indeks Demokrasi Indonesia \(IDI\) Provinsi Sumatera Barat](#)
- [\[Metode Baru\] Indikator Indeks Demokrasi Indonesia \(IDI\) Provinsi Sumatera Barat](#)
- [Indeks Demokrasi Indonesia \(IDI\) Provinsi Sumatera Barat Menurut Jenis](#)

21:46  
1/30/2026

<https://sumbar.bps.go.id/id/statistics-table/2/NjYwZlI=/-metode-baru--indikator-indeks-demokrasi-indonesia--idi--provinsi-sumatera-barat.html>

**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Barada Rencana Teknis Publik Layar Internet Publik

### (Metode Baru) Indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Sumatera Barat, 2024

Terakhir Diupdate: 22 September 2025

← Kembali Unduh → +100% ⬆️ Bagikan

2024 2023 2022 2021

Filtro justifikasi

Indikator IDI	(Metode Baru) Indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Sumatera Barat	2024
Tertingginya kebebasan berkeompok, berorganisasi, dan berpendapat di lingkungan keluarga		80,91
Tertingginya kebebasan berkeompok, berorganisasi, dan berpendapat antar masyarakat		100,00
Tertingginya kebebasan berkepercayaan		52,57
Tertingginya kebebasan berkeompok, berorganisasi, berpendapat, dan berkepercayaan dalam setiap kegiatan		50,00
Tertingginya hak memilih dan dipilih dalam pemilu		73,69
Pemerintah baik-baik bekerja		62,47
Pers yang bebas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya		68,81
Kestabilan gender		82,83
Partisipasi masyarakat dalam mengorganisir kegiatan politik melalui lembaga perwakilan		100,00
Anti korupsi sumber daya ekonomi		69,33
Akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial		84,83
Kestabilan kesempatan kerja antar wilayah		84,25
Akses masyarakat terhadap informasi publik		76,30
Kestabilan dalam pelayanan dasar		75,82
Kinerja lembaga legislatif		58,84
Kinerja lembaga yudikatif		69,98
Retorika penyelenggara pemilu		75,00
Pidana Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk memeriksa pejabat pemerintah		80,00
Jumlah pemerintah terhadap pelaksanaan lingkungan dan hancur hiliris masyarakat		74,78

Windows taskbar: Search, 21:41, 1/30/2025